MencariIndonesia
KitaDigdaya

IJ Kasimo, Kejujuran Si Jago Tua 22

Usai Pemilu Jual Pelana Kuda 80

60th
Histori . Biografi . Tradisi

Desember 2023 www.intisari-online.com

intisari

Smart and Inspiring

Pemilu Pertama Digelar di Yogya 32

SUARA DEMOKRASI SUARA RAKYAT

Ketika rakyat berdaulat melalui pesta demokrasi

INTM20231201
9 770535 490003
201350114
Rp 30.000,-/
Rp 31.000,- (Luar Jawa)

'PEMILIHAN UMUM TELAH MEMANGGIL KITA'

Mahandis Yoanata Thamrin
Editor in Chief

Saya selalu terngiang lirik lagu *Mars Pemilu* karya komponis Mochtar Embut. Barangkali karena masa kanak-kanak saya tumbuh bersama siaran TVRI dan RRI, era dominasi media negara. Setelah Orde Baru tumbang pada 1998, kita nyaris tak mendengarkannya lagi. Namun, Slank memopulerkannya kembali dengan gaya musik pop-rok.

Setiap orang memiliki kenangan tentang pesta demokrasi ini. Saya pertama kali menyaksikan arak-arakan kampanye pemilu saat kanak-kanak, jelang pemilu 1982. Klakson mobil dibunyikan, gas sepeda motor dimainkan, yel-yel diserukan.

Seingat saya tradisi kampanye dengan pamer kekuatan di jalanan yang rawan perseteruan ini berlanjut sampai awal zaman Reformasi. Namun, ajang pemilu belakangan ini mencoba cara-cara yang beradab untuk memengaruhi calon pemilihnya—baik melalui tayangan media sosial maupun debat antar pasangan calon yang ditonton publik. Meskipun demikian, perseteruan yang awalnya terjadi di jalanan, boleh jadi kini berpindah ke platform media sosial.

Bung Karno pernah mewanti-wanti kita perihal perseteruan jelang pemilu itu pada pidato jelang pemilihan umum pertama di Republik ini pada 1955.

"Rupanya orang mengira, bahwa suatu perpecahan di muka pemilihan umum atau di dalam pemilihan umum selalu dapat diatasi nanti sesudah pemilihan umum itu! Orang lupa: *ada* perpecahan yang tak dapat disembuhkan lagi. *Ada* perpecahan yang terus memakan, meng-grantes, terus membaji dalam jiwa suatu rakyat, sehingga akhirnya memecahbelahkan keutuhan bangsa [...] ." Kemudian, sambungnya, "Karena itu, segenap jiwa ragaku kepada bangsa Indonesia, 'Terlepas dari ideologi apa pun, —jagalah persatuan! Jagalah keutuhan!'"

Apakah pemilu identik dengan keresahan? Meski terkesan slogan, Mochtar Embut menghibur kita dalam liriknya, *"Pemilihan umum telah memanggil kita. Sluruh rakyat menyambut gembira."* **S**

intisari

Editorial

Editor in Chief
Mahandis Yoanata Thamrin
Editor
Thomas Tjahjo Widyasmoro
Visual Editor Heri Cahyadi
Graphic Designer Maha Sulthan Dwi Indra
Cartographer Warsono
Intisari Online
Yoyok Prima Maulana (Managing Editor), Ade Sulaeman (Editor), Afif Khoirul M, M. Habib Asyhad, Hermawan Susanto

Publishing

Founders P.K Ojong (1920-1980), Jakob Oetama (1931-2020)

Group Director Dahlan Dahi
Managing Director J. Dhanang Radityo
Deputy Group Director Harry Kristianto
Group Editorial Director Didi Kaspi Kasim

Business

Brand Strategic Group Director Ign. Gatot Widhiyanto
Brand Development & Partnership Director
Pius Anom Hendrikusumo
Partnership Manager Fitriana Pangaribuan
Strategic Audience Analysis Director
Asti Krismardiyanti
Group Sales Director Malikul Jibril
Account Director Nia Kurnyawati
Account Executive Muhammad Aris Pambudi, Vienanda Nur Ikhwalfi
Marketing Director Tari Khairani, Margaretha Anggrina
Marketing Manager Mohammad Essa Luthfani Cendikia
Marketing Executive Marthanina Jessica Putri, Athira Roosrania
Marketing Communication Director
Agung Wibawanto
Marketing Communication Manager
Giovanni Pattisina
Marketing Communication Officer Arvian Ramadhan, Bernardus Agus Widyawan
Circulation & Distribution Manager
DS Wardhana

GRID NETWORK | THE ENTHUSIAST HUB

Editorial Office
Gedung Gridnetwork
Perkantoran Kompas Gramedia
Jl. Gelora VII RT. 2 RW. 2 Kelurahan Gelora
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Phone: (021) 5309699/ 5369799
Faks: (021) 5320607
E-mail: *intisari@gridnetwork.id*

Advertising
Gedung Gridnetwork
Perkantoran Kompas Gramedia
Jl. Gelora VII RT. 2 RW. 2 Kelurahan Gelora
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Phone: (021) 5309699/ 5369799
E-mail: *iklangrid@gridnetwork.id*

Marketing Communication
Gedung Gridnetwork
Perkantoran Kompas Gramedia
Jl. Gelora VII RT. 2 RW. 2 Kelurahan Gelora
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Phone: (021) 5309699/ 5369799
E-mail: *marcomm@gridnetwork.id*

KOMPAS GRAMEDIA

Desain Sampul
Maha Sulthan Dwi Indra
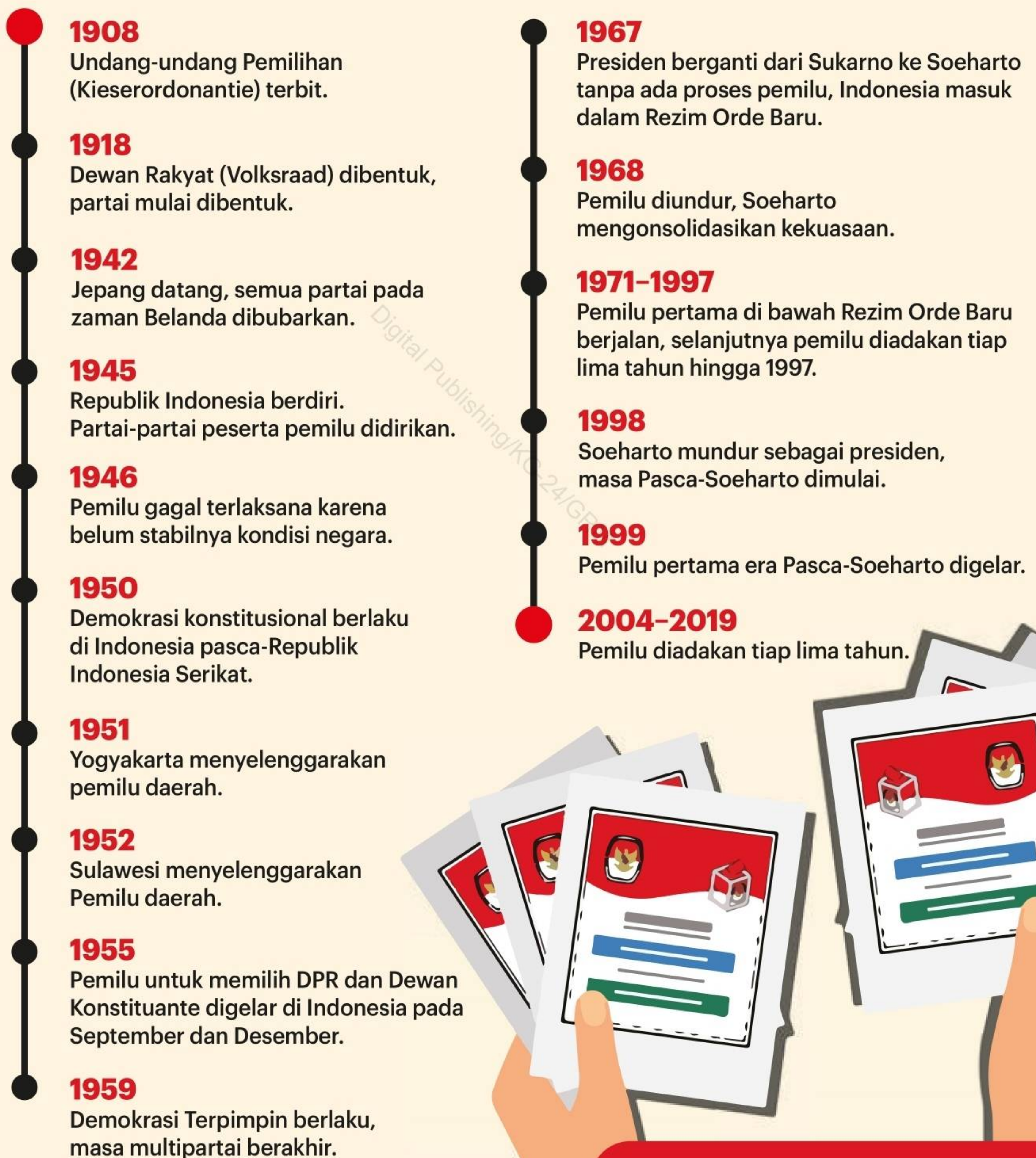
Foto sampul
Presiden Sukarno selaku kepala negara tengah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Kementrian Penerangan Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 15 Desember 1955.

Foto: ANRI/Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955.

INTROGRAFIS

LINIMASA PEMILU INDOENSIA

1908
Undang-undang Pemilihan (Kieserordonantie) terbit.

1918
Dewan Rakyat (Volksraad) dibentuk, partai mulai dibentuk.

1942
Jepang datang, semua partai pada zaman Belanda dibubarkan.

1945
Republik Indonesia berdiri. Partai-partai peserta pemilu didirikan.

1946
Pemilu gagal terlaksana karena belum stabilnya kondisi negara.

1950
Demokrasi konstitusional berlaku di Indonesia pasca-Republik Indonesia Serikat.

1951
Yogyakarta menyelenggarakan pemilu daerah.

1952
Sulawesi menyelenggarakan Pemilu daerah.

1955
Pemilu untuk memilih DPR dan Dewan Konstituante digelar di Indonesia pada September dan Desember.

1959
Demokrasi Terpimpin berlaku, masa multipartai berakhir.

1967
Presiden berganti dari Sukarno ke Soeharto tanpa ada proses pemilu, Indonesia masuk dalam Rezim Orde Baru.

1968
Pemilu diundur, Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan.

1971–1997
Pemilu pertama di bawah Rezim Orde Baru berjalan, selanjutnya pemilu diadakan tiap lima tahun hingga 1997.

1998
Soeharto mundur sebagai presiden, masa Pasca-Soeharto dimulai.

1999
Pemilu pertama era Pasca-Soeharto digelar.

2004–2019
Pemilu diadakan tiap lima tahun.

Sumber: "Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik" *(1981); Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1918 (1997);* "Sistem Pemilihan Umum Universal dan Parokial" *(1981); Sejarah Pemilu yang Dihilangkan: Pemilihan Umum dalam Kemelut Politik Indonesia Tahun 1950-an (2019).*

TEKS A.S RIMBAWANA | **INFOGRAFIS** SULTAN

DAFTAR ISI

8

MERAPAH JEJAK PEMILU DI INDONESIA

Khas

90

32

Merapah Jejak Pemilu di Indonesia

A.S. Rimbawana
Kontributor Intisari

Tak lama lagi publik Indonesia memasuki masa pemilihan umum 2024. Bulan-bulan mendatang berbagai kanal media pasti dipenuhi kampanye para capres–cawapres dan caleg. Bahkan, para simpatisan masing-masing kini sudah mulai bergerilya.

Anda mungkin bertanya, mengapa untuk menentukan pemimpin mesti dilakukan pemilu? Mari kita periksa linimasa gagasan pemilu di awal Republik berdiri.

Gagasan pemilu di Indonesia telah hadir sejak abad ke-20. Meskipun, tentu saja, wujudnya tidak persis seperti sekarang. Manuel Kaisiepo, mantan wartawan *Kompas* sekaligus penyunting Jurnal *Prisma* (1979–1983) dalam editorial *Prisma* No. 9, September 1981 menulis, “Pemilihan umum memang telah menjadi tradisi penting, bahkan hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia.” Pemilu jadi kian penting sebab berfungsi sebagai alat legitimasi atas kekuasaan yang ada. Bagi pergantian rezim, dukungan dan legitimasi inilah yang diburu.

Tunas gagasan

Kaisiepo bertutur, pemilu plus peranti hak pilih individu adalah budaya asing. Ia berasal dan tumbuh dari konteks “sosial--budaya Eropa”–lantas belakangan Amerika— dan merupakan hasil dari perkembangan sejarah yang lama dan bertahap.

Pemilu yang kita kenal saat ini bersemi di Eropa sejak berabad lampau. Sigid Putranto Widagdo telah berupaya melacak gagasan pemilu dalam tulisan di Jurnal *Prisma*. Menurutnya, bentuk awal pemilu telah eksis sejak masa Yunani kuno, antara abad ke-8–6 SM. “Pada masa itu beberapa jabatan yang menuntut kualifikasi istimewa diisi dengan orang-orang yang dipilih melalui pemilihan,” tulisnya dalam “Sistem Pemilihan Umum Universal dan Parokial”.

Demikian pula saat masa Romawi kuno, sekitar 140 SM. Orang-orang Roma saat itu juga telah mengatur cara pemilihan para wakil. “Walaupun cara yang digunakan masih dibilang primitif tetapi ide politik yang mendasarinya sangatlah besar bahkan menjadi sumber pemikiran politik modern yang kemudian tumbuh di Barat,” tulisnya.

Lambat laun, ide-ide yang

Dalam pemerintahan republik ini, gagasan pemilu berpilin dengan gagasan demokrasi. Perkembangan gagasan pemilu di Eropa kelak diadopsi oleh negara bekas jajahan. Musababnya, gagasan republik, pun demokrasi kelak juga dikenal oleh para aktivis pergerakan di tanah jajahan.

Gedung Volksraad yang sekarang menjadi Gedung Pancasila

FOTO: KITLV; PEWARNA: SULTAN

berakar dari Yunani dan Romawi kuno ini lantas dipelajari ulang di Eropa usai Abad Pertengahan. Kelak, berbarengan dengan gagasan pada era Pencerahan, pemilu turut memporakporandakan pemerintahan monarki di Eropa.

Contoh radikal adalah ketika monarki absolut –pemerintahan yang berada di tangan raja seorang— didongkel oleh Revolusi di Prancis pada abad ke-18. Cara penentuan pemimpin yang semula berdasar aspek keturunan semata, ditolak oleh rakyat Prancis saat itu. Selanjutnya, Prancis mengadopsi pemerintahan Republik. Kelak, bentuk pemerintahan republik juga populer di negara bekas jajahan. Bahkan, Republik jadi antitesis dari negara kolonial.

Dalam pemerintahan republik ini, gagasan pemilu berpilin dengan gagasan demokrasi. Perkembangan gagasan pemilu di Eropa kelak diadopsi oleh negara bekas jajahan. Musababnya, gagasan republik, pun demokrasi kelak juga dikenal oleh para aktivis pergerakan di tanah jajahan. Apalagi, gagasan soal pemilihan bertaut erat dengan gagasan pemerintahan mandiri (otonom). Di Indonesia, gagasan pemerintahan otonom mencuat pada abad ke-20. Kelak gagasan ini bersulih menjadi spirit kemerdekaan.

Indonesia yang otonom

Meskipun Indonesia telah

BAGAIMANA CARA MENENTUKAN

Adakah kriteria seorang pemimpin di Indonesia pra-kolonial? Adakah jejak pemilihan pemimpin layaknya pemilu? Salah satu upaya pelacakan terhadap kriteria pemimpin Jawa kuno itu bisa dilakukan dengan bersandar pada prasasti maupun sastra (kitab, *kakawin*) kuno.

Arkeolog Universitas Indonesia, Supratikno Rahardjo dalam *Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno sampai Akhir Majapahit* menulis, dalam prasasti Canggal (732 M), misalnya, gagasan tentang kepemimpinan ideal merupakan gabungan kemampuan membagi kekayaan sang raja serta meningkatkan kesejahteraan dan prestasi di bidang militer.

Ideal-ideal seorang pemimpin juga terus berkembang. Dalam temuan Rahardjo, ragam sumber Jawa Kuno dalam periode Mataram pra-Islam era Jawa Tengah mengesankan para pemimpin juga dihubungkan dengan pengetahuan di bidang keagamaan. “Gagasan tentang raja ideal, yakni raja yang juga memahami ajaran-ajaran yang termuat dalam kita-kitab suci,” tulisnya. Keterangan Rahardjo ini didasarkan pada prasasti Canggal dan Dinoyo.

Sementara itu, pada masa pemerintahan Mataram pra-Islam era Jawa Timur, perubahan ideal pemimpin sekali lagi terjadi. Pada masa ini, justru ditemui beberapa kualitas pemimpin yang bahkan tak muncul pada masa Jawa Tengah, seperti kemampuan berkesenian —terutama sastra dan pertunjukkan. Dalam *Negarakertagama* kitab berasal dari masa akhir Majapahit, misalnya, Raja Hayam Wuruk yang berkeliling di kerajaannya menyempatkan diri mencatat keindahan daerah yang dilewatinya. Salah satu kecakapan pemimpin dalam bersastra.

Lalu bagaimana cara peralihan antar-penguasa? Hanya pada era Majapahit hal ini tampak semakin jelas. Pada prasasti-prasasti sebelumnya, tidak begitu jelas bagaimana soerang raja bisa menggantikan pendahulunya.

Menurut Rahardjo, seorang bisa menjadi raja asalkan mengawini anak perempuan raja yang

PEMIMPIN DI JAWA PRA-KOLONIAL?

hendak digantikan. Meskipun, lagi-lagi, dalam sumber prasasti dan karya sastra tidak tegas menyebut hal demikian. "Satu-satunya yang dapat dipastikan adalah bahwa anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk menduduki tahta kerajaan. Meskipun jumlah raja perempuan terbukti timpang ketimbang laki-laki.

Kharisma juga masuk kualifikasi seorang yang hendak naik tampuk kepemimpinan. Ini adalah kualitas yang begitu istimewa, sehingga individu bersangkutan dapat dianggap, sebagaimana Rahardjo, "sebagai manusia yang unggul dan adikodrati". Hal yang agaknya mirip dengan Sukarno di masa Indonesia modern yang dielukan sebab gaya pidatonya yang amat memikat massa.

Lazimnya, pemimpin kharismatik ini muncul dalam situasi kritis. "Situasi semacam itu membutuhkan pemimpin yang kreatif, berwibawa dan memiliki keberanian luar biasa yang bisa membuatnya dikagumi oleh pengikutnya dan dianggap sebagai juru selamat," tulis Rahardjo.

Pada masa yang kurang lebih sama, muncul konsep "wahyu" yang cukup sohor. Orang-orang Jawa menganggap wahyu menjadi semacam legitimasi bagi penguasa baru. Wahyu tidak hanya satu jenis, tetapi beberapa —termasuk *wahyu kedaton*.

"Wahyu digambarkan dengan berbagai bentuk dan rupa — cahaya terang, "bintang", tapi paling sering terlihat sebagai bola cahaya biru, hijau, atau putih yang menyilaukan," demikian yang tertulis di Babad Tanah Jawi, seperti disitat oleh Soemarsaid Moertono, sejarawan, dalam *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI–XIX*.

Hal demikian sulit diterima pada masa sekarang. Sebab, suatu sistem membutuhkan logika pendukung yang mengitarinya. Sementara, kini zaman terus bergerak —telah berayun ke babak lain lagi, dan meninggalkan babak lainnya. Meniru sama persis tata cara lama tanpa bisa menggali daya kreatif tak ubahnya hanya melap-lap kebudayaan lama.

Anggota Volksraad Batavia.

FOTO: KITLV; PEWARNA: SULTAN

bersinggungan dengan VOC sejak abad ke-17, tapi negara kolonial Hindia-Belanda baru berdiri pada awal abad ke-19. Saat itu, penguasa Belanda membawahi wilayah koloni melalui perwakilan seorang Gubernur Jenderal. Jadi, kemauan Raja Belanda adalah titah bagi Gubernur Jenderal. Tak mengherankan bila Gubernur Jenderal memiliki kuasa begitu luas.

Sejak 1870-an, reformasi birokrasi digalakkan di tanah jajahan. Ide reformasi di tanah jajahan itu pun dianggap musykil oleh politikus Belanda konservatif. Mereka menganggap upaya yang telah dilakukan untuk mereformasi tanah jajahan tiada guna. Musababnya jelas prasangka yang menjangkiti otak-otak mereka: rakyat jajahan tidak terdidik, berbeda dengan kaum kulit putih.

Perubahan statuta pemerintah pada 1854 memuat keperluan negara koloni mengangkat seorang Menteri Tanah Jajahan. “Sejak itu gubernur jenderal tidak langsung bertanggung jawab kepada Raja, namun kepada sang pejabat baru, Menteri Tanah Jajahan,” demikian seperti ditulis Uji Winardi dalam “Hak Politik Bangsa Indonesia: Melacak Partisipasi Rakyat dalam Praktik Politik Kolonial”. Struktur macam ini juga masih mendapat kritik dari sebagian aktivis oposisi, terutama kritik terhadap kuasa Gubernur Jenderal.

Seiring kolonisasi terjadi, pranata-pranata sosial baru tercipta. Masyarakat perlahan meninggalkan kriteria-kriteria pemimpin tatanan lama. Pranata-pranata anyar itu maujud dalam sekolah dan gagasan tentang sistem pemerintahan. Pranata-

pranata baru itu banyak berdiri usai abad ke-20, ketika Politik Etis diberlakukan.

Politik Etis adalah gagasan untuk memberikan pendidikan di koloni oleh pemerintahan Belanda —saat itu pemerintahan dikuasai faksi liberal. Saking penting periode ini, Merle Calvin Ricklefs dalam *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004* menulis, "Periode saat Politik Etis muncul melahirkan perubahan yang begitu mendasar di lingkungan penjajahan sehingga orang tidak akan dapat memahami sejarah Indonesia pada awal abad ke-20 tanpa mengacu pada gagasan Politik Etis."

Abad berganti, Undang-undang Desentralisasi lantas disahkan pada 1903 di bawah pemerintahan liberal. Dari penetapan itu terdapat beberapa macam konsekuensi. Salah satunya adalah potensi membentuk pemerintahan daerah serta terbukanya saluran bersuara. Inilah kesempatan pertama bagi tanah jajahan memiliki pemerintahan otonom.

Di bawah rezim liberal, pemilihan selalu bertalian dengan kehendak memperbaiki tanah koloni. Pemerintah kolonial hanya bermaksud agar dapat meredakan riak-riak protes di tanah koloni —bukan untuk membebaskannya. Inilah yang disebut oleh Tania Murray Li, seorang antropolog, sebagai "kehendak untuk memperbaiki".

Menurut Li dalam *Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*, dengan cara yang sama, kedudukan Belanda diteguhkan oleh klaim bahwa para koloniallah "pihak yang tahu tentang bagaimana masyarakat harus hidup, apa yang terbaik bagi masyarakat, dan apa yang dibutuhkan masyarakat".

Usai UU Desentralisasi terbit, koloni di Jawa dibuat menjadi 32 praja, dan 15 wilayah. Kelak, pada 1922, diikuti oleh reformasi birokrasi Jawa dibagi lagi menjadi: Barat, Tengah dan Timur –dengan Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta, keduanya daerah khusus para pangeran Jawa) sebagai perkecualian. Namun, persoalan yang dihadapi pada masa otonom justru hanya seputar keuangan pusat dan daerah.

Hingga pada 1908, terbit maklumat *kieserordonantie* (Undang-undang Pemilihan). "Dengan adanya ordonansi ini, wilayah yang telah memiliki status otonom berhak menyelenggarakan pemilihan dewan untuk menjadi representasi warganya," kata Uji. Gagasan ini kelak mengkristal jadi cikal bakal pemilihan umum di alam Indonesia Merdeka.

Pun, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum mendorong agar pemerintahan Hindia Belanda lebih otonom. Maka itu, dibentuklah
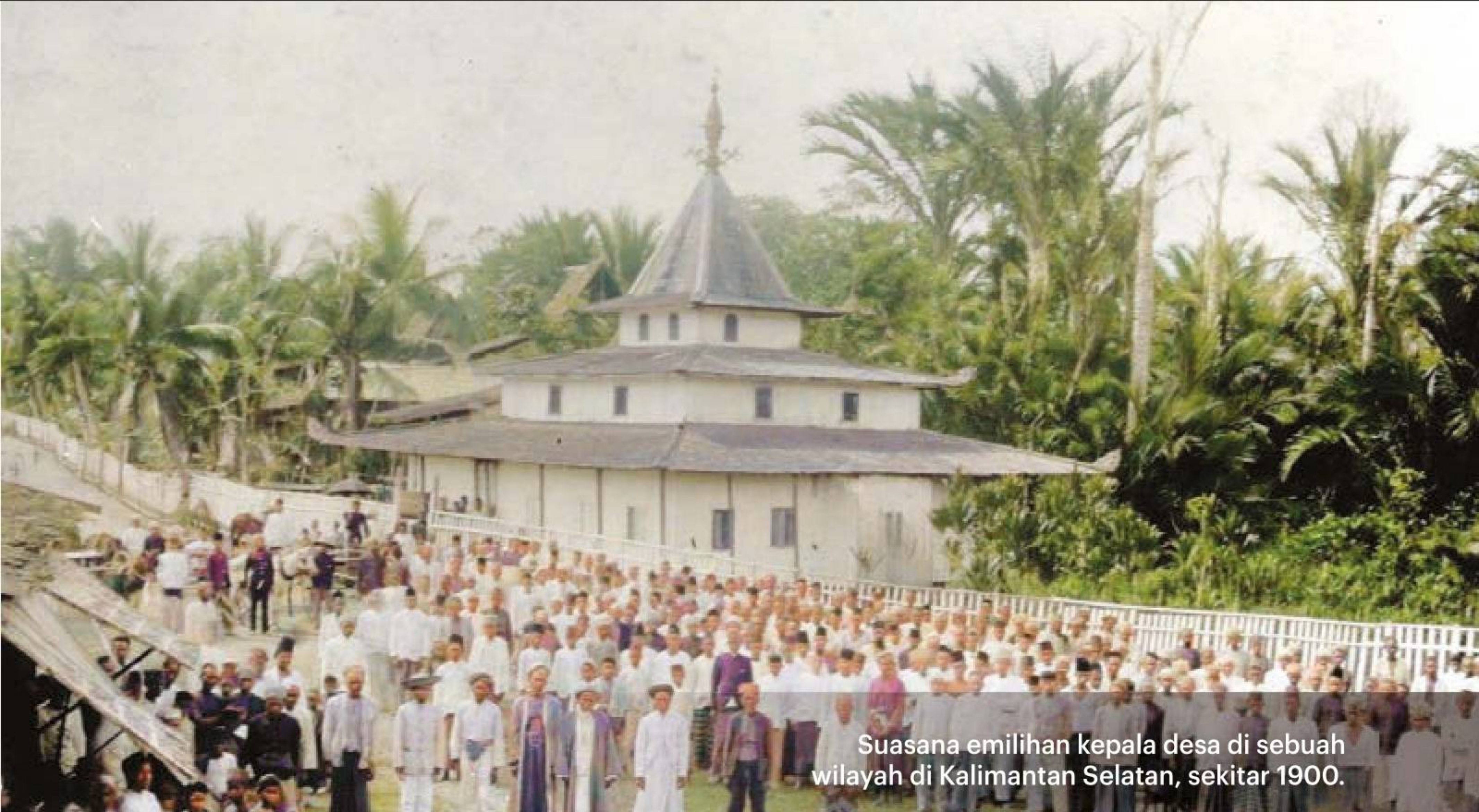
Suasana emilihan kepala desa di sebuah wilayah di Kalimantan Selatan, sekitar 1900.

FOTO: KITLV; PEWARNA: SULTAN

Volksraad pada 1918. Menurut Takashi Shiraishi, sejarawan Indonesia asal Jepang, dalam *Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa*, Volksraad beranggotakan tiga puluh delapan orang, dan setengahnya lagi diangkat oleh Gubernur Jenderal.

Namun mereka yang masuk dalam jajaran Volksraad atau Dewan Rakyat hanyalah yang menerapkan prinsip kerjasama dengan pemerintah. Maka itu, pihak-pihak oposisi tentu tidak punya kesempatan sama seperti mereka yang duduk di kursi Dewan Rakyat. Dewan Rakyat serupa komedi —kata para pemimpin muda pergerakan.

Shiraishi berpendapat, terlepas dari ejekan dari kaum progresif dan radikal muda, Dewan Rakyat jelas langkah maju menuju pemerintahan otonom. Selain, karena Dewan Rakyat menyediakan gelanggang bagi mereka yang hendak angkat bicara. Belum lagi suara-suara mereka juga akan diliput pers. Semua itu membuat Boedi Oetomo, Central Syarikat Islam (CSI), dan Insulinde mengubah diri menjadi partai politik.

Anggota Dewan Rakyat bumiputera dibatasi hingga lima belas orang —sepuluh di antaranya dipilih rakyat, sedang lima lainnya diangkat Gubernur Jenderal. Adanya peraturan tentang pengangkatan adalah untuk menjamin perlindungan bagi minoritas.

Sementara itu, anggota terpilih adalah mereka lolos melalui pemilihan tidak langsung dari dewan daerah, dewan kota serta dengan jumlah masih sangat terbatas. Melalui beberapa pembaruan, pada 1922 dan 1925, jumlah anggota ditingkatkan

menjadi 60 orang. Pada 1928, komposisi 30 Indonesia, 25 Belanda, 5 dari kelompok lainnya.

"Melalui pemilihan bertingkat rakyat yang berhak memilih wakil-wakilnya untuk duduk di dalam Volksraad. Setiap pemilih mewakili jumlah yang berhak pilih yang tidak ditentukan jumlahnya bagi perwakilan desa dan daerah," tulis Daniel Dhakidae dalam "Pemilihan Umum: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik".

Meskipun jumlah pemilih pribumi meningkat, tapi tentu saja saat itu tidak bisa membubuhi kata umum di belakang kata pemilihan. "Orang-orang yang diberikan kolonial hak pilih adalah orang pilihan pemerintah kolonial, dari kalangan yang sudah sangat tertentu pula," lanjut Dhakidae.

Situasi demikian bertahan hingga kedatangan Jepang pada 1942. Usai Belanda menyerah kepada Jepang pada Maret 1942, Pemerintah Militer Jepang segera membatasi gerak para nasionalis. Beberapa sejarawan bahkan menganggap Jepang lebih keras ketimbang Belanda. "Semua partai politik dilarang, lembaga pendidikan tinggi ditutup, dan Kenpeitai memonitor semua aktivitas politik," tulis Robert Cribb dan Audrey Kahin dalam *Kamus Sejarah Indonesia* itu.

Sebagai gantinya, orang-orang Indonesia diminta berpartisipasi dalam organisasi massa bentukan Jepang, seperti Gerakan Tiga A, Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), dan Jawa Hokokai. Namun, gemblengan ala militer Jepang juga memberikan bekal tersendiri bagi para pemuda Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh banyak tokoh politik masa itu. Suatu adat kebiasaan yang akan memandu para pejuang melewati kecamuk Revolusi.

Musabab aktivitas nasionalis begitu terbatas, lantas menurut Dhakidae, saat Indonesia diproklamasikan masyarakat politik Indonesia praktis tidak mengenal partai politik. Namun di sisi lain, Indonesia mesti memiliki partai politik.

> Soekarno juga urun pendapat, bahwa dirinya tegas menolak sistem monarki —seperti beberapa usulan dalam rapat kali itu. "Saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala Negarapun dipilih. Pendapat Sukarno ini mendapat dukungan, misalnya, dari Maria Ulfah, yang kelak menjabat Menteri Perburuhan itu.

Pemilu di alam republik

Tertutupnya kesempatan selama masa Belanda—Jepang membuat cita-cita memimpin negeri sendiri mengkristal saat Indonesia mencapai alam kemerdekaan.

Beberapa pekan sebelum kemerdekaan, perdebatan terjadi dalam sidang BPUPK pada 28 Mei–1 Juni 1945. Mohammad Yamin melontarkan gagasan ihwal republik sebagai bentuk negara. “Bukan negara golongan, negara angkatan atau negara bangsawan,” kata Yamin seperti dinukil dalam Robertus Robet, *Republikanisme: Filsafat Politik untuk Indonesia*.

Soekarno juga urun pendapat, bahwa dirinya tegas menolak sistem monarki —seperti beberapa usulan dalam rapat kali itu. “Saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala Negarapun dipilih. Pendapat Sukarno ini mendapat dukungan, misalnya, dari Maria Ulfah, yang kelak menjabat Menteri Perburuhan itu. Baginya, tiap putera Indonesia yang cakap tentu bisa dipilih jadi kepala negara.

Akhirnya, perdebatan tentang bentuk negara itu jatuh pada republik. Dan mereka betul-betul menolak sistem monarki dengan sepenuhnya sadar. Soal ini, Yamin kembali berpendapat, usai kemerdekaan monarki akan bermasalah. “Hanya pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat yang akan memiliki legitimasi sementara dinasti bertentangan sifat-sifat kemerdekaan rakyat.” Pilihan untuk menjadi Republik dengan sendirinya mengeliminasi dinasti ala monarki.

Seementara itu, pada 1940–1950-an tiap-tiap negara yang baru merdeka memiliki partai-partai politik. Mohammad Hatta, memutuskan maklumat pada November 1945 tentang pembentukan partai-partai. Sejak itu, tumbuhlah partai bak cendawan di musim hujan.

Dhakidae melihat pemilu di Indonesia pada mulanya bukanlah sebagai obral janji, melainkan euforia politik. Kesempatan sebuah bangsa baru merdeka yang ingin pula menikmati pengalaman demokratis secara nasional untuk pertama kali sepanjang sejarah yang pernah ditempuh. “Hampir tidak ada bangsa yang baru merdeka yang tidak menetapkan pemilihan umum sebagai program politik berikutnya.”

Partai-partai itulah yang bakal mengikuti pemilu. Rencananya pemilu yang hendak digelar pada 1946. “Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa kita, cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM DAERAH PEMILIHAN DJAKARTA RAJA

DENGAN 4 BUAH BILIK

E

I II III IV

4 4 4 4

D

7 6 5 6 7

C 3 3

2 2

B

1 1

A

FOTO: *STAR WEEKLY EDISI* 24 SEPTEMBER 1955
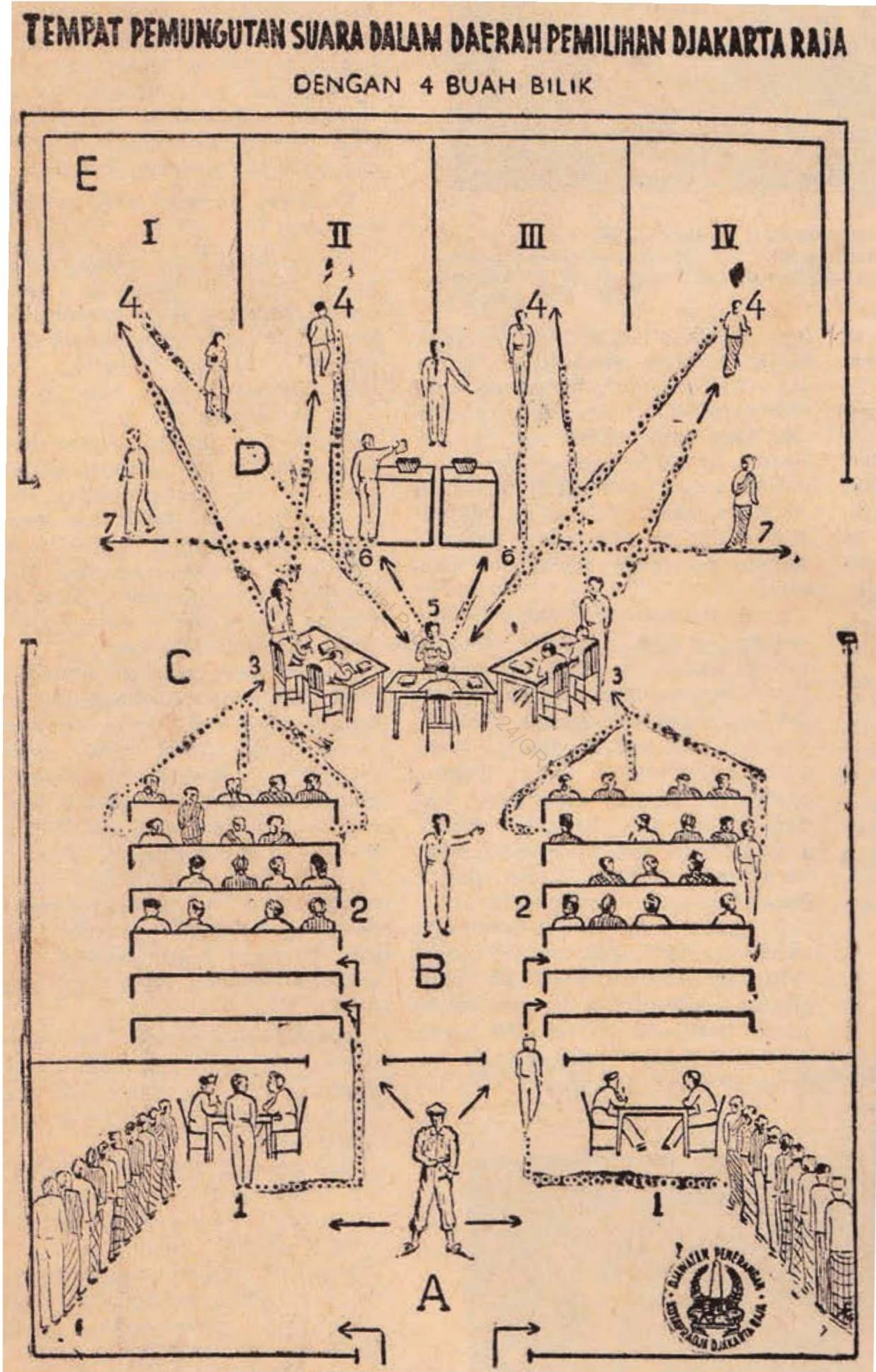
akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan Undang-Undang Dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat kita yang terbanyak," seperti disitat dari "Manifesto Politik November 1945" dalam *Pemikiran Politik Indonesia, 1945–1965* yang disusun oleh dua orang peneliti Indonesia, Lance Castles dan Herb Feith itu.

Namun pemilu skala besar gagal digelar karena kekacauan saat Agresi Belanda. Akhirnya berujung pada penundaan pemilu hingga situasi kembali kondusif. Usai memeroleh pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 1949, pada 1951 digelar pemilu daerah di Yogyakarta. Selang setahun pemilu digelar lagi, kini di Sulawesi.

Menurut pandangan Faishal Hilmy Maulida, dalam *Sejarah Pemilu yang Dihilangkan: Pemilihan Umum dalam Kemelut Politik Indonesia Tahun 1950-an*, pemilu-pemilu daerah tadi merupakan upaya yang baik demi menyiapkan Pemilu yang lebih besar untuk memilih DPR dan Dewan Konstituante pada 1955.

Akhirnya, pada September dan Desember 1955 pemilu berhasil digelar —satu percobaan demokrasi. Meskipun upaya demokrasi justru dikubur oleh Sukarno pada 1957. Namun, upaya pelaksanaan pemilu itu tetap dipandang baik oleh Ricklefs. "Karena dasar-dasar untuk dapat membangun demokrasi perwakilan hampir tak ditemukan. Dari Belanda dan Jepang, Indonesia mewarisi tradisi-tradisi, asumsi-asumsi, dan struktur hukum sebuah negara polisi."

Selain itu, Rakyat Indonesia kebanyakan juga masih mengidap buta huruf, miskin, terbiasa dengan kekuasaan yang otoriter dan paternalistik. Belum lagi, wilayah Indonesia begitu luas.

Maka, pada permulaan Republik, pemilu adalah jawaban atas kehendak rakyat dalam mengatur bangsa —yang otonom lagi berdaulat. Dan tentu saja bukan sekadar obral janji para politikus semata, seperti tahun-tahun belakangan ini. **S**

Mutiara Kata

"*Zonder* toleransi maka demokrasi akan karam"
—Soekarno, 17 Agustus 1954.

Dr. Mr. Tambunan, Ketua Umum Parkindo (Partai Kristen Indonesia), baru-baru ini kedatangan beberapa tamu. Pada suatu ketika pembicaraan sampai pada praktik-praktik penyogokan yang sering dilakukan terhadap para pejabat yang sedang berkuasa. Pak Tambunan bertanya, “Sudah pernah dicoba juga terhadap Pak Kasimo?”

Edisi Agustus 1963

I.J. Kasimo
Jujur, Setia, Sederhana, Berani

FOTO: WIKIMEDIA/KOMPAS

Jawab mereka, "Ah tidak perlu! Percuma. Lihat-lihat orangnya, dong!"

Wartawan terkemuka dari Yogyakarta pernah menulis tentang Pak Kasimo. Dalam tulisan itu antara lain dia minta maaf, karena pernah menyangka Pak Kasimo yang dulu selalu memakai kain dan ikat kepala itu pastilah bukan seorang revolusioner. Perkiraan tersebut diakuinya salah, setelah dia mengenal lebih dekat langkah perjuangan Ignatius Josep Kasimo.

Dalam suatu musyawarah di Yogyakarta, seorang guru besar ilmu hukum menerangkan sesuatu kepada hadirin, tetapi hadirin tak juga mengerti. Pak Kasimo tampil ke depan, seraya berkata, "Coba saya terangkan secara sederhana, sebab saya bukan, bukan Mahaguru." Baru persoalan menjadi terang dan gamblang bagi orang banyak.

Tiga peristiwa di atas mengungkapkan sifat-sifat khas dari I.J. Kasimo yang oleh Presiden Soekarno disebut "jago tua" umat Katolik Indonesia. Kejujuran, ketaatan, kesederhanaan, keberanian.

Kasimo berasal dari keluarga besar. Saudaranya sebelas orang, dia nomor 5, tetapi kemudian menjadi anak lelaki nomor 2. Persoalan ini akibatnya yang turut menentukan perkembangan wataknya lebih lanjut. Anak lelaki nomor satu diharapkan menjadi "priyayi". Karena itu dibebaskan dari pekerjaan membantu orang tua di rumah. Pekerjaan di rumah jatuh ke tangan Kasimo. Umur 7 tahun ia sudah gesit membantu ibunya yang membuka kedai sayur-mayur beserta rempah-rempahnya.

Guru yang berpengaruh kepadanya adalah Pastor van Lith dan Pastor Mertens. Kedua Pastor tersebut mengajar dengan teladan. Kasimo waktu itu sudah tertarik akan kerja keras kedua guru tersebut untuk memajukan suku Jawa dan terpikat oleh semangatnya yang "*sepi ing pamrih, rame ing gawe*", bekerja keras tanpa kepentingan sendiri.

"Pernah saya disengat lebah. Saya melayani orang membeli gula. Dalam gula banyak lebahnya. Nah, saya kena sengat," tuturnya sambil tersenyum. Ketika kemudian ibunya membuka usaha batik kecil-kecilan, dia membantu mencap, mengerok lilin batik sampai jauh malam. "Ibu tidak pernah punya

Pastor van Lith (kiri) dan Pastor Mertens (kanan), guru yang berpengaruh besar kepada Kasimo.

pembantu rumah tangga, kami yang meringankan pekerjaannya." Sejak kecil oleh ibunya, Kasimo dilatih senang bekerja keras.

Ayahnya seorang abdi dalem, seorang prajurit Mantrijeron yang berseragam merah-merah. Tugasnya setiap delapan hari piket di Istana Sultan, setiap 16 hari ronda berjalan berkeliling dari Alun-alun Selatan sampai Alun-alun Utara. Tiga tahun sekali menjelang perayaan Grebeg latihan berbaris. Tidak mengherankan, kalau kemudian salah seorang anaknya memilih karier dalam bidang politik.

Dari Sekolah Dasar *Stalenan* Gading (bukan HIS) Kasimo melanjutkan pelajaran ke Sekolah Guru di Muntilan. Seorang siswa yang kelak menjadi Romo Agung Soegijapranata waktu itu duduk di kelas 5. Romo Agung Djayaseputra kelas 6. Kasimo kelas 1. Kemudian Kasimo sempat melihat Romo Agung Soegija kembali dari Eropa sebagai mahasiswa calon imam, mengajar di Muntilan. Kepada para pemuda yang sebaya dengan Pak Kasimo, calon Romo Agung sering bercerita tentang gerakan kemerdekaan di Belgia. Cerita tersebut memikat hati mereka.

Guru yang berpengaruh kepadanya adalah Pastor van Lith dan Pastor Mertens. Kedua Pastor tersebut mengajar dengan teladan. Kasimo waktu itu sudah tertarik akan kerja keras kedua guru tersebut untuk memajukan suku Jawa dan terpikat oleh semangatnya yang "*sepi ing pamrih, rame ing gawe*", bekerja keras tanpa

Halaman dalam Kolese Xaverius Muntilan.

FOTO: JEJAKKOLONIAL.BLOGSPOT.COM

kepentingan sendiri.

Petuah berupa kata-kata yang jarang sekali diberikan oleh kedua guru tersebut. Pastor van Lith sering berkata, “Kamu semua harus bekerja untuk kemajuan bangsamu.” Di Muntilan Kasimo menerima pelajaran untuk menjadi guru dan tertarik oleh teladan kasih guru-gurunya, Dia meminta dipermandikan menjadi Katolik.

Pada tahun 1918 dia pindah ke Bogor, melanjutkan ke sekolah menengah pertanian. Di situlah bekal yang diberikan oleh gurunya, “Kau harus bekerja untuk kemajuan bangsamu” berkembang. Belum lagi berusia 20 tahun dia telah terpilih menjadi ketua Perkumpulan Pemuda Cabang Bogor.

Ia bergaul rapat dengan calon-calon pemimpin nasional dari Jong Java seperti Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Mr. Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. Soekiman, Wiwoho, bekas Dubes di Belgia.

Ajaran gurunya menemukan bentuk lebih konkret tentang bagaimana caranya “engkau harus bekerja untuk kemajuan bangsamu” yang masih hidup dalam penjajahan.

Ketika Kasimo tamat Sekolah Pertanian dan bekerja di Tegalgondo, dusun kecil antara Klaten-Kartasura, dia sering bertemu dengan teman sekolah semasa di Muntilan, F. Harjadi, waktu itu menjadi ketua Budi Utomo cabang Klaten.

Dari percakapan kedua pemuda

itu timbul pertanyaan yang makin mendesak, apakah tidak lebih baik apabila mereka mendirikan gerakan politik yang berasas Katolik?

Memang sudah ada Indische Katholieke Partij tetapi itu adalah partai politik orang-orang Katolik Belanda. Mereka hendak mendirikan partai Katolik yang nasional, yang "bekerja untuk kemajuan bangsamu". Ide tersebut menjadi kenyataan dengan lahirnya Perhimpunan Politik Katolik Jawa (PPKD) pada bulan Juni 1923. Mula-mula mereka masih mengadakan hubungan dengan IKP tetapi pada tahun 1925 sama sekali terpisah, karena pangkal berpijaknya memang berlainan.

PPKD yang semula bersifat lokal, menjelang tahun 30-an berubah menjadi nasional. Partai inilah yang pada tanggal 11 Juli 1963 merayakan pasca windu usianya dengan resepsi penuh syukur di Istana Negara. Dalam amanatnya, Presiden Soekarno memberi gelar "jago tua" kepada Pak Kasimo.

Dalam Kongres Solo tahun 1956 Pak Kasimo sempat mencucurkan air mata, "Dulu jika Partai Katolik berkongres, cukup di beranda rumah. Sekarang ruangan sebesar lima lokal kelas tidak cukup. Muncul banyak anak-anak muda yang pandai angkat bicara dan menunjukkan semangat berapi-api."

Peristiwa yang tidak akan dilupakannya sampai di surga. Kehadiran kongres di Jakarta lebih meluap lagi, para pesertanya datang dari seluruh pelosok Tanah Air. Bahkan ada yang selama enam bulan harus menempuh perjalanan. Mereka terangsang kepada tantangan, bagaimana dapat menyumbangkan asas dan kemampuan lebih besar lagi untuk mensejahterakan seluruh bangsa dan negara. Di atas Pancasila mereka mengeratkan pelukan dengan saudara-saudara sebangsa dari golongan manapun untuk bersama mengamalkan sila kelima-limanya.

"Ketika saya mulai bergerak di bidang politik, saya mendapat dua buah buku yang saya anggap penting bagi saya. *Sociologische Beginselen* karangan De Bruijn dan *De Katholieke Maatschappijleer* dari Dr. De Rovera, seorang penulis Spanyol. Dari buku pertama dan kedua saya amat tertarik oleh asas-asas nasionalitet atas asas kemerdekaan setiap bangsa yang dikemukakan dengan jelas dalam buku itu."

Kedua buku tersebut menjadi pegangan Pak Kasimo dalam pergerakan sosial politik. Bersama dengan organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya, iya turut serta memperjuangkan tercapainya kemerdekaan bangsa.

Ketika partai-partai terhimpun dalam GAPI, Pak Kasimo mewakili

partainya. Di situ dia berkenalan dengan para pemuka nasional Dr. A.K. Gani, Mr. Sartono, Mr. Moh. Yamin dari Gerindo, Otto Iskandar Dinata dan Ir. Djuanda dari Pasundan, Abikusno, Syahbudin Latif dari PSII.

Sebelas tahun lamanya dia menjadi anggota Volksraad bersama-sama dengan pahlawan Betawi Husni Thamrin. "Pendidikannya tidak tinggi, tapi pikirannya cerdas dan pandai bicara. Kalau bicara tidak berapi-api tetapi memikat dan meyakinkan," demikian kesannya tentang Husni Thamrin. "Saya mendapat banyak pelajaran dan pengalaman dari Volksraad.

Di zaman Jepang Pak Kasimo dimasukkan ke penjara. Dalam penjara bersama-sama dengan Prof. Soejono Hadinoto, Dekan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia. Partai Katolik waktu itu dibubarkan Jepang. Baru dibentuk lagi setelah Republik Indonesia lahir, yaitu pada tanggal 8 Desember 1945 di Yogyakarta.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I tahun 1947, Pak Kasimo selaku Menteri Muda Kemakmuran Rakyat mengikuti Presiden Soekarno menyingkirkan sementara waktu ke rumah perkebunan di daerah Sarangan, Madiun. Dua minggu lamanya dia tinggal serumah dengan Bung Karno bersama menteri-menteri Dr. Leimena dan Ir. Laoh. Bung Karno waktu itu disertai oleh Ibu Fatmawati, Guntur, Megawati dan bapak-ibu mertuanya. Menteri-menterinya Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. A.K. Pringgodigdo dan Wondoamiseno juga berada di sana, tetapi di rumah lain.

Sedangkan setengah dari anggota-anggota kabinet tetap tinggal di Yogyakarta. Hanya sebentar Bung Karno dan menteri-menteri tersebut menetap di Sangaran, kemudian kembali lagi ke Yogyakarta.

Setelah Belanda menduduki Yogyakarta dalam Perang Kolonial II tahun 1948, oleh surat kabar Belanda Menteri Kemakmuran Kasimo bersama Menteri Dalam Negeri Mr. Soetanto Tirtoprodjo diberitakan tertembak mati dalam mobil.

Ketika tentara Belanda menyerbu Yogyakarta, Pak Kasimo dan Pak Soesanto kebetulan berada di Solo mengunjungi keluarganya. Kedua menteri itu kemudian bergegas kembali ke Yogyakarta memburu sidang kabinet yang pasti diadakan berhubung perkembangan situasi.

Baru kira-kira 4 km dari Kartasura, dua pesawat terbang Belanda menyerbu kedua mobil yang ditumpangi oleh Pak Santo dan Pak Kasimo. Mobil hancur kena mitraliur, tetapi kedua menteri selamat karena mereka sempat
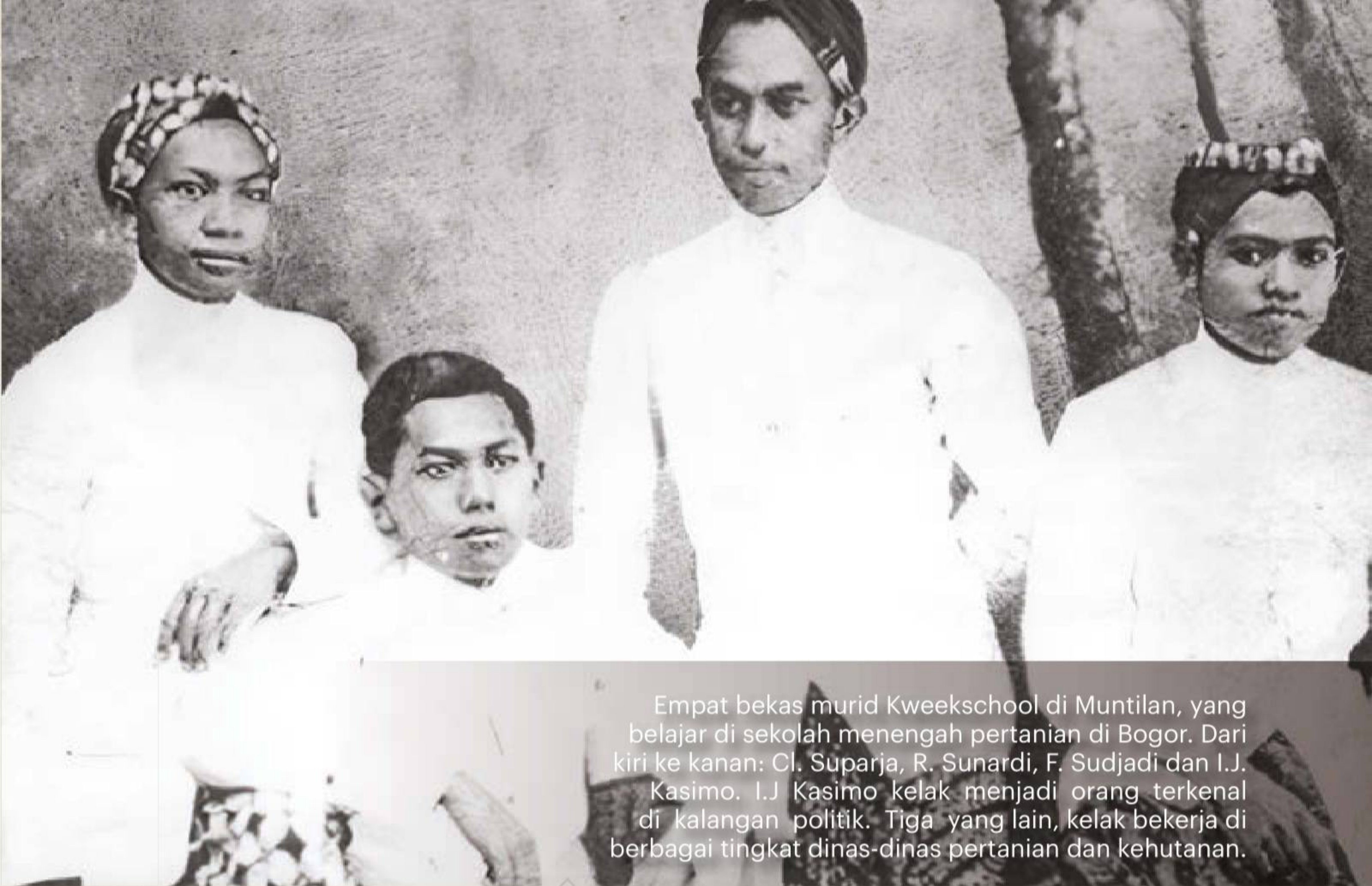
Empat bekas murid Kweekschool di Muntilan, yang belajar di sekolah menengah pertanian di Bogor. Dari kiri ke kanan: Cl. Suparja, R. Sunardi, F. Sudjadi dan I.J. Kasimo. I.J Kasimo kelak menjadi orang terkenal di kalangan politik. Tiga yang lain, kelak bekerja di berbagai tingkat dinas-dinas pertanian dan kehutanan.

FOTO: TIM KAS. 1992. *GARIS-GARIS BESAR SEJARAH GEREJA KATOLIK DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG*. SEMARANG: KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG.

bersembunyi di bawah rumpun bambu.

Keduanya kembali ke Solo, malamnya menuju Tawangmangu melalui perjalanan sebagai *menteri gerilya*. Mula-mula bersama Pak Santo, tetapi ketika turun dari Tawangmangu mereka terpisah. “Mobil saya belok ke kiri, Pak Santo tak melihat. Mobilnya dibiarkan membelok ke kanan.”

Rombongan gerilya Pak Kasimo terdiri atas Menteri Dr. Soekiman, Menteri Sosial R.P. Pandji Soeroso, Mayor Jenderal Soehardjo dan beberapa orang lagi.

Tujuh bulan lebih menteri Kasimo dan kawan-kawan bergerilya di sekitar Solo, Klaten dan Wonosari. Tidak terlantar makannya Pak?

Jawabnya sambil tertawa, “Oh, sama sekali tidak. Enak dulu dari sekarang.”

Setiap menetap di desa, tak lama kemudian tentu datang pesawat terbang atau patroli Belanda, “Rupanya ada mata-mata yang terus menguntit, sehingga kami harus pindah tempat terus-menerus.”

Pernah rombongan hendak menyeberang jalan besar, mendadak tank Belanda lewat. Menteri-menteri jongkok di bawah galangan. Meskipun anjing terus menggonggong, patroli Belanda lewat tanpa curiga.

Malam-malam R.P. Soeroso jatuh ke selokan. Ketika bangun, ia menghadap ke arah yang salah sehingga bukannya mengikuti rombongan di depan, melainkan bertolak arah. Tentu saja ia dicari-

Pak Kasimo menjadi Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat selama dua setengah tahun. Kementerian itu sekarang dipecah-pecah menjadi Departemen Perdagangan, Pertanian dan Perindustrian.

FOTO: X/@HARIANKOMPAS

cari dan baru ketemu keesokan harinya. Malam itu Menteri Soeroso kedinginan. Ia tiba di desa, dan masuk ke sebuah rumah tetapi disangka mata-mata musuh. Penduduk desa tidak memberikan tempat tidur. Semalam suntuk dia dibiarkan berjongkok di depan perapian mengeringkan pakaian dan badannya yang basah kuyup kehujanan.

"Kami pernah naik rakit seperti Jaka Tingkir sepanjang sungai Dengkeng di daerah Solo. Pesawat Belanda terus mengitari, sehingga terpaksa setiap kali bersembunyi di rumpun bambu. Di desa Ngawen, diserang dengan mitraliur dari atas. Untung selamat."

Selama bergerilya Pak Kasimo dan Brigjen. Soeprapto, Brigjen. Achmadi dan Menteri Maladi, yang ketika itu mengadakan siaran RRI dari Desa Jenawi, lereng Gunung Lawu. Di Wonosari berjumpa Prof. Dr. Soemantri, Pembantu Utama Menteri PTIP. Ketika itu dia membuka rumah sakit darurat untuk merawat gerilyawan-gerilyawan.

Setelah mendengar berita tercapainya persetujuan Roem-Roijen, hubungan Menteri Kasimo menuju Yogyakarta. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan Mr. Wirjono Prodjodikoro. Rupanya dia kurang terbiasa berjalan kaki atau memang kecapean. Sehingga pada waktu mendaki bukit jatuh pingsan.

Tanggal 29 Juli pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta, tanggal 30 Juli rombongan Menteri Kasimo masuk kota. Terus diajak berputar-putar memeriksa pos-

pos keamanan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Pak Kasimo menjadi Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat selama dua setengah tahun. Kementerian itu sekarang dipecah-pecah menjadi Departemen Perdagangan, Pertanian dan Perindustrian. Sejak pemulihan kedaulatan pernah juga ia menjadi Menteri Perekonomian selama tujuh bulan. Kepada para wartawan yang datang mewawancarai waktu itu dia menjawab, "Bekal saya hanya kemauan baik dan kejujuran. Moga-moga saya dapat berhasil menjalankan tugas saya."

Rakyat banyak kemudian menilai, dia sungguh-sungguh berhasil.

Dalam bidang pekerjaan, kepuasan yang sungguh-sungguh dirasakan olehnya, sewaktu menjabat Kepala Perkebunan Rakyat dari tahun 1951-1955. "Dalam waktu empat tahun, produksi gula naik dua kali dari 420.000 ton menjadi 840.000 ton." Diterangkan lebih lanjut hal itu disebabkan oleh sistem kemajuan tebu rakyat, persewaan tanah yang menguntungkan petani dan unsur-unsur lain. Yayasan Kopra mengalami zaman keemasan ekspor ketika dipimpin oleh Pak Kasimo. "Waktu itu disiplin masih baik," komentarnya.

Seringkali keluar ucapan Pak Kasimo, "Biasa toh, segala sesuatu ada manis-pahitnya." Ucapan tersebut mengungkapkan sikap hidup yang mendalam. Atas dasar itu Ignatius Josep Kasimo dapat menerima dengan ikhlas salib yang terpanjang di tengah keluarganya.

Umumnya orang dari Jawa Tengah kurang bisa mengatakan sesuatu dengan terus terang. Dalam hal ini Pak Kasimo agak berlainan. Terbawa oleh kesederhanaan hati dan keberaniannya, dia lebih suka berkata-kata dengan spontan terus terang daripada berliku-liku dan samar. Orang yang belum kenal, sekali waktu mungkin dapat merasa tersinggung.

Alangkah kayanya kita, apabila dapat mewarisi sifat wataknya, yang sederhana, jujur, setia dan berani! **S**

Mutiara Kata

"Pemilu adalah panggung di mana kita, sebagai warga negara, memainkan peran utama." **—Dwight D. Eisenhower**

Keriuhan Pemilu Coba-coba di Yogyakarta

Aufannuha Ihsani
Dosen Sejarah Peradaban Islam,
UIN Saizu Purwokerto

Di bekas vorstenlanden, tanah-tanah kerajaan, sebuah pesta demokrasi pernah digelar sebelum pemilu nasional pertama. Dengan segala keterbatasannya, tak hanya sukses, perhelatan ini kemudian menjadi barometer buat pemilu-pemilu setelahnya.

Satu diorama yang melukiskan suasana Pemilu tahun 1951 di Yogyakarta yang tersimpan di Museum Benteng Vredeburg.

FOTO: VREDEBURG.ID

"Jika DPR dipegang orang Islam, apakah setiap orang harus salat? Tidak!" Tulisan itu terpampang dalam pamflet-pamflet yang tersebar di beberapa sudut kota Yogyakarta menjelang pemilu. Yang menyebar, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), tentu saja ingin menekankan bahwa kalau nanti mereka menjadi mayoritas anggota dewan, mereka tidak akan membuat peraturan yang mewajibkan syariat Islam.

Bukan, yang dimaksud bukanlah kampanye Pemilu 1955 yang hasil akhirnya Masyumi menduduki peringkat kedua secara nasional. Pamflet-pamflet itu tersebar sekitar empat tahun sebelumnya, pada 1951, sebagai bagian dari

M. Nazir Salim

Soemardjan mencatat, ketika Jepang menduduki Yogyakarta pada 1942, Sang Sultan memutuskan tak akan lagi mengangkat patih. Semua urusan administratif dan pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh seorang patih, kini ia tangani sendiri.

keseluruhan proses Pemilu Daerah di Yogyakarta.

Ternyata, Pemilu 1955 memang bukanlah pemilu pertama yang diselenggarakan pascakemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, di beberapa tempat telah dilangsungkan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di tingkat daerah. Beberapa tempat itu, seperti yang dicatat oleh M. Nazir Salim dalam bukunya, *Membayangkan Demokrasi, Menghadirkan Pesta: Pemilihan Umum Yogyakarta, 1951*, adalah Kediri dan Surakarta pada 1946, Kalimantan Selatan pada 1948, Minahasa dan Yogyakarta pada 1951, dan terakhir Kotapraja Makassar pada 1952.

Di antara wilayah-wilayah tersebut, Yogyakarta patut

Prosesi upacara penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1940. Tampak Sri Sultan bersanding dengan Lucien Adams sebagai wakil pemerintah kolonial.

FOTO: GOODNEWSFROMINDONESIA.ID

mendapat perhatian tersendiri. Sebab, wilayah ini mendapatkan otonomi khusus sejak kemerdekaan hingga hari ini. Sebagai bekas *vorstenlanden*, wilayah kerajaan, tidak pernah ada pemilu untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur di provinsi ini. Bagaimana mungkin di tanah monarki ini berlangsung pemilu kurang dari dua tahun setelah Belanda angkat kaki?

Sang Sultan yang demokratis

"Keistimewaan" Yogyakarta ternyata bukan hanya pada statusnya. Lebih dari itu, keberadaan wilayah tersebut dan apa yang terjadi di sana pada dekade pertama setelah kemerdekaan tak dapat dilepaskan dari sosok rajanya, Sri Sultan Hamengkubuwana IX.

Sebelum resmi bertakhta pada 1940, ia telah terlibat perundingan yang alot dengan seorang pejabat senior Belanda, Lucien Adam, untuk membuat kontrak politik yang baru. Sang calon sultan, yang saat itu masih bernama Gusti Raden Mas Dorodjatun, menginginkan kekuasaan yang lebih independen dari pemerintah kolonial. Sesuatu, yang tentu saja, ditolak mentah-mentah oleh Adam.

Sepak-terjang Sri Sultan Hamengkubuwana IX selama periode-periode penting sepanjang masa akhir kolonial, pendudukan Jepang, hingga masa revolusi dilukiskan secara rinci oleh

Salah satu poster raksasa yang dipasang oleh Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta (Djapendi) dalam rangka sosialisasi Pemilu 1951.

FOTO: *BELAJAR DEMOKRASI DARI JOGJA, PEMILU 1951*

Selo Soemardjan dalam karya klasiknya, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Soemardjan mencatat, ketika Jepang menduduki Yogyakarta pada 1942, Sang Sultan memutuskan tak akan lagi mengangkat patih. Semua urusan administratif dan pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh seorang patih, kini ia tangani sendiri.

Maka mulailah, sejak saat itu, Sang Sultan berangkat *ngantor* ke kepatihan setiap pagi. Ia berurusan langsung dengan banyak orang, termasuk para pedagang dan masyarakat umum, mengenai masalah-masalah mereka. Ini tentu saja merupakan hal yang berkesan bagi rakyat kecil. "Apa yang tak sanggup mereka beli dengan kekayaan di masa lampau sekarang terwujud, yakni kehormatan untuk duduk berhadapan dengan Sri Sultan dan bahkan berunding sendiri dengannya," tulis Soemardjan.

Di masa ini pula, Sultan mememerintahkan untuk menyederhanakan ritus-ritus keraton yang rumit dan menelan banyak biaya. Semuanya dilakukan tanpa kemewahan yang mencolok sembari tetap menjaga nilai-nilai kesakralannya. Sultan juga aktif merombak susunan pemerintahan agar lebih efisien. Ia menghapuskan kewedanan sebagai satu wilayah administratif dan membentuk Panitia Pembantu Pamong Praja (PPPP) pada 1944. Untuk memaksimalkan kerja PPPP, tak

jarang Sang Sultan blusukan ke desa-desa!

Saat berita kemerdekaan tersiar ke Yogyakarta, Sang Sultan segera menyatakan dukungannya kepada republik yang baru lahir. Sehari setelah proklamasi, ia mengirim telegram kepada Soekarno dan Hatta untuk mengucapkan selamat atas terbentuknya negara Republik Indonesia. Dua hari berselang, pada 20 Agustus, ia kembali mengirim kawat untuk kedua proklamator tersebut. Atmakusumah, dalam *Takhta untuk Rakyat*, mencatat peristiwa tersebut. “Dalam telegram ini secara spontan ia menyatakan ‘sanggup berdiri di belakang pimpinan’ mereka,” tulis Atmakusumah.

Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) untuk wilayah ini pun segera terbentuk. Tugas utamanya, seperti yang kita tahu, adalah merebut kekuasaan dari tangan Jepang di daerah-daerah dan kemudian mendirikan pemerintahan republik di sana. Sultan ikut ambil bagian dalam badan ini. Pada Mei 1946, Sultan bersama-sama dengan KNID menyusun satu dekrit yang salah satu poinnya berisi pendirian sebuah dewan legislatif untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Soemardjan mencatat bahwa ada satu episode yang menegaskan komitmen Sri Sultan Hamengkubuwana IX terhadap demokrasi dalam kerja-kerjanya bersama KNID. Ia ditawari kedudukan ganda sebagai ketua dewan eksekutif dan legislatif sekaligus. Ini mungkin saja dilakukan mengingat status khusus dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi tidak, Sultan tidak menginginkan hal itu. Ia ingin hanya menduduki jabatan eksekutif saja. “Menurut pendapatnya,” tulis Soemardjan, “penerimaan tugas ganda akan berarti suatu langkah mundur ke arah pemerintahan otokratis dari sultan-sultan tradisional.”

Penuh Tantangan

Sejak saat itulah, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dewan perwakilannya sendiri. Akan tetapi, para wakil rakyat saat itu tidaklah dipilih seperti umumnya sekarang ini, melainkan ditunjuk oleh KNID bersama-sama dengan Sultan.

Yang disayangkan, hingga menjelang akhir masa revolusi, para anggota dewan itu tak banyak berperan dalam pemerintahan. Penyebabnya tentu saja adalah situasi yang penuh kekacauan akibat agresi militer Belanda I dan II, serangkaian perang gerilya, dan pendudukan Kota Yogyakarta oleh Belanda hingga akhir 1949. Susunan keanggotaan dewan pun sempat mengalami perombakan sebab adanya Peristiwa Madiun tahun

TIMELINE PEMILU 1951

Akhir Januari
Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat mengizinkan pembentukan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui suatu pemilihan umum.

8-10 Maret
Pemerintah DIY membentuk panitia pemilihan umum. Pakualam VIII sendiri mengetuai susunan kepanitiaan ini.

16-22 Juli
Pendaftaran penduduk dilakukan untuk mendata siapa saja yang dapat memilih dan dipilih.

30 Juli – 2 Agustus
Pengajuan calon pemilih (para "jago") yang akan dipilih oleh masyarakat umum.

23 Juli – 25 Agustus
Pendaftaran pemilih umum.

27 Agustus
Pemilihan pemilih di tiap kelurahan atau desa, hari "penjembelihan djago".

11-17 September
Pengajuan calon anggota DPRD di tiap kabupaten atau kota.

7 Oktober
Hari pemilihan anggota DPRD. Pemungutan suara dilakukan di tiap kecamatan.

15 Oktober
Penetapan hasil pemilihan anggota DPRD. Rencananya dilakukan tanggal 20, namun ternyata telah dapat dilakukan beberapa hari sebelumnya.

10 November
Seluruh proses pemilu dinyatakan usai.

24 Desember
Hari dilantiknya anggota-anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

1948, yang menjadikan hampir semua anggota yang terafiliasi komunisme dipecat.

Padahal, setelah Peristiwa Madiun itu, jumlah anggota bertambah dari 60 menjadi 70 orang. Tetapi tetap saja, mereka tak pernah mengeluarkan produk hukum yang penting bagi dewan eksekutif pada level provinsi. Seperti yang dituturkan Nazir, salah satu sebabnya adalah karena banyak anggota dewan secara langsung terlibat dalam perang gerilya. Pada akhirnya, menurut Nazir, "keberadaan anggota parlemen yang besar itu hanya sebagai simbol semata."

Tingkat melek baca pada akhirnya juga berpengaruh terhadap antusiasme mereka atas pemilu. Kebanyakan penduduk merasa bingung sebab ini pengalaman pertama mereka.

Maka itulah, selepas Belanda angkat kaki, situasi lebih damai, dan Menteri Dalam Negeri mengizinkan dibentuknya DPRD yang baru untuk Yogyakarta, pemerintah daerah tak melewatkan kesempatan untuk mengadakan pemilu buat pertama kalinya. Kepanitiaan pun segera dibentuk, rapat-rapat dilangsungkan, dan jadwal disusun. Masyarakat Yogyakarta akan menyambut pesta demokrasi pertama mereka.

Tapi semangat itu juga dibarengi dengan seabrek masalah. Lebih dari 90 persen masyarakat Yogyakarta pada saat itu masih buta aksara. Bagaimana mungkin mereka yang tak bisa baca-tulis huruf latin saat itu mesti didorong untuk memilih? Kantor Pusat Pemilihan Provinsi (KPPP) Yogyakarta akhirnya memutuskan bahwa Pemilu 1951 akan dilaksanakan secara bertingkat.

Sederhananya begini: masyarakat umum akan memilih wakil-wakil mereka yang berpendidikan. Wakil-wakil mereka yang terpilih ini pada akhirnya akan memilih partai atau organisasi massa yang kader-kadernya dicalonkan sebagai anggota dewan. Dari perseorangan pun bisa mencalonkan diri, tetapi ia mesti didukung oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang wakil yang telah terpilih pada putaran pertama.

Dalam prosesnya, kesulitan panitia pemilu telah terasa sejak pendataan penduduk. Yang boleh memilih adalah mereka yang telah berusia 18 tahun ke atas. Namun, banyak penduduk yang tak tahu tanggal lahir mereka masing-masing. Akibatnya proses pendataan ini menjadi tersendat-sendat.

Tingkat melek baca pada akhirnya juga berpengaruh terhadap antusiasme mereka atas pemilu. Kebanyakan penduduk merasa bingung sebab ini pengalaman pertama mereka. Yang bisa baca dan tulis, sebenarnya bisa mengajukan diri untuk dipilih sebagai calon pemilih. Tetapi mereka pun bertanya-tanya, apakah mereka akan dibayar. Mereka tentunya akan mengorbankan sebagian waktu dan tenaga mereka untuk dipilih dan memilih. Wajarlah, dalam benak mereka, jika mereka mesti diberi upah.

“Enggak,” kata Nazir saat

Seorang pemilih perempuan sedang memasukkan kartu suaranya ke dalam kotak salah seorang calon jago.

FOTO: *BELAJAR DEMOKRASI DARI JOGJA, PEMILU 1951*

dihubungi via telepon. "Saya tidak menemukan satupun data baik dari koran atau yang lain soal bayaran. Kalau ada bayarannya, pasti masuk di media," lanjut pria kelahiran Meranti, Riau ini.

Karena tidak dibayar itulah, panitia mesti bekerja keras menyosialisasikan pentingnya memilih dan dipilih. Dari data yang dihimpun oleh Nazir, panitia pemilu memanfaatkan berbagai macam cara, mulai dari radio, pamflet, poster dan spanduk di ruang-ruang publik, koran-koran, informasi di bioskop sebelum film diputar, hingga selebaran yang disebar dari udara dengan pesawat terbang!

Pelan-pelan, antusiasme masyarakat pun mulai muncul. Mereka bahkan punya istilah sendiri bagi para calon yang akan mereka usung, yang akan dipilih untuk memilih, yakni "jago". Jago-jago ini pada akhirnya merebak menjadi topik pembicaraan masyarakat menjelang pemilihan putaran pertama. Dalam harian *Nasional*, seperti dikutip Nazir, masyarakat mengingat pemilu putaran pertama tanggal 27 Agustuts 1951 sebagai hari "*penjembelihan djago*".

Gairah kampanye dan pemilihan

Idealnya, menurut Nazir, para jago merupakan usulan masyarakat. Tetapi, dalam praktiknya, partai-

partai mengorganisasikan hal ini, supaya peluang terpilihnya partai mereka masing-masing makin besar di putaran kedua nanti. Jadi misalnya, Partai Masyumi mengoordinasi satu wilayah tertentu. Mereka akan kumpulkan siapa saja yang jelas memihak Masyumi untuk dicalonkan menjadi jago. Partai-partai lain pun tak ketinggalan melakukannya.

"Mungkin tidak pengurus partainya, karena pengurus-pengurus partai yang penting itu yang nanti akan dicalonkan menjadi anggota dewan. Jadi jago-jago ini yang penting bisa ditengarai orangnya partai A, B, atau C, dan bisa dipengaruhi," papar Nazir.

Begitulah, strategi-strategi politik sudah mulai dilakukan sejak pencalonan para jago. Jumlah calon jago semakin banyak, ada 18.886 calon. Dari jumlah ini, akan diambil 7.320 orang saja, yang akhirnya akan memilih anggota dewan yang sesungguhnya pada putaran kedua. Angka 7.320 itu ditetapkan karena setiap jago yang terpilih akan mewakili kira-kira 250 warga Yogyakarta, yang jumlah total penduduknya saat itu mencapai 1,8 juta jiwa.

Para calon jago pun mulai berkampanye di daerah pemilihannya masing-masing. Layaknya pemilihan lurah atau kepala desa, mereka menggunakan simbol-simbol sebagai penanda pada hari H pemilihan. Ada yang menggunakan singkong, pisang, atau cangkul. Oleh sebab mereka dibatasi daerah pemilihannya masing-masing, banyak simbol-simbol yang sama dipakai di berbagai tempat. Simbol singkong yang digunakan oleh seorang calon jago di sebuah kecamatan di Gunungkidul, katakanlah, bisa saja juga dipakai oleh calon jago lainnya di wilayah Sleman.

"Simbol itu penting," kata Nazir. Sebab, dalam pengamatannya atas sumber-sumber yang ia temukan, tidak semuanya mengenal para jago itu. Apalagi, kebanyakan dari mereka tidak bisa membaca, sehingga mereka akan sangat dimudahkan dengan gambar-gambar tertentu.

Di hari H pemilihan, tanggal 27 Agustus, calon-calon jago di tiap Kantor Pemungutan Suara (KPS) atau Kantor Pembantu Pemungutan Suara (KPPS) itu akan didudukkan berjejer di atas panggung, lengkap dengan simbol-simbol yang mereka pergunakan. "Itu (simbol-simbolnya, *red.*) ada yang ditempel di punggung atau di dada mereka. Ada juga yang duduk, lalu di atasnya dipasang gambar-gambar, entah singkong, pisang, atau apalah," lanjut Nazir.

Tujuh ribu lebih jago telah terpilih. Pertarungan sebenarnya segera dimulai. Panitia telah menetapkan 290 calon anggota

dewan. Kebanyakan memang dari partai, namun ada pula calon yang mengajukan diri atas nama perseorangan. Syaratnya sederhana: ia mesti diajukan oleh minimal 10 orang jago.

Untuk partai sendiri, mekanismenya masih kabur. Dari 290 calon, Partai Nasional Indonesia (PNI) mencalonkan 75 orang kadernya, Masyumi sejumlah 40 orang, Partai Katholik ada 31 orang, dan Partai Indonesia Raya (PIR), mengajukan 27 orang. Jumlah itu belum ditambah dengan golongan-golongan yang bukan partai layaknya Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) yang mengajukan 10 orang atau Panitia Aksi Kesatuan Buruh Tani (PAKBT) yang mencalonkan 44 orang.

Siapa yang berhak menentukan jumlah calon tersebut? Mengapa PNI dapat mengajukan 75 orang calon sementara PPDI hanya boleh mengajukan 10 orang saja? Ini merupakan pertanyaan yang Nazir sendiri tak mendapatkan jawabannya. "Data-data yang saya temukan tidak menjelaskan detail-detail itu, mas," katanya.

Namun, satu hal yang jelas, adalah bahwa Pemilu Daerah 1951 di Yogyakarta didominasi para calon dari partai maupun golongan. Dan, karena didominasi orang-orang partai itulah, kontestasi kampanye antarpartai segera terlihat.

PNI memanfaatkan fakta bahwa Masyumi adalah partai dengan ideologi Islam. Mereka menggiring isu bahwa ideologi ini akan berakibat pada hukum dan undang-undang jika Masyumi menang. "Undang-Undang Islam akan berlaku, kalau umat Islam menang. Menang dalam pemilihan umum syarat mutlak mencapai negara Islam. Anggota DPR yang tepat, Nasionalis pembela rakyat," begitulah salah satu bunyi spanduk PNI.

Masyumi merespons hal ini dengan spanduk yang telah dikutip di awal tulisan ini, menegaskan bahwa mereka tak akan mewajibkan setiap orang untuk salat saat mereka memegang kursi mayoritas anggota dewan. Di lain spanduk, Masyumi juga tampak berusaha meyakinkan masyarakat Yogyakarta, dengan kekentalan budaya Jawanya, bahwa mereka tak berniat mengusik hiburan-hiburan rakyat. "DPR di tangan Islam, wayangan, sandiwara, tidak akan dilarang!" seru salah satu spanduk Masyumi.

Lain dengan PNI dan Masyumi, PPDI punya cara tersendiri. Dalam temuan Nazir, para kader organisasi ini memanfaatkan jalur birokrasi untuk mempengaruhi para jago yang telah terpilih untuk memilih calon-calon yang mereka ajukan. "Ya, namanya saja pamong praja, langsung bersentuhan dengan
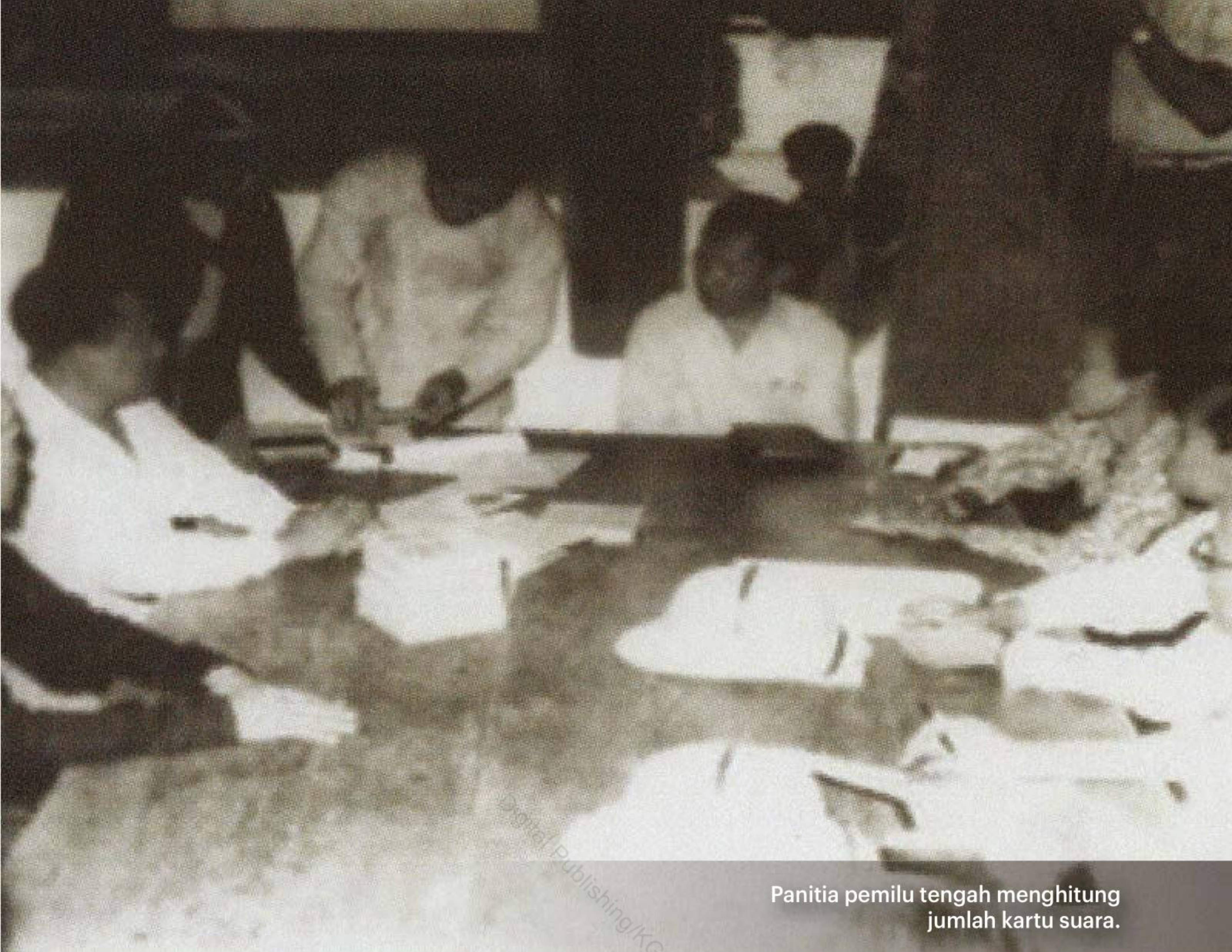
Panitia pemilu tengah menghitung jumlah kartu suara.

FOTO: *BELAJAR DEMOKRASI DARI JOGJA, PEMILU 1951*

masyarakat. PPDI itu kan isinya kepala-kepala desa dan pejabat-pejabat desa," kata dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) ini.

Sementara itu, PAKBT memilih melakukan kampanye diam-diam. Akibat dari masih terlarangnya PKI pascaperistiwa Madiun 1948, PAKBT yang berafiliasi dan scara ideologis dekat dengan PKI tak boleh melakukan kampanye secara terbuka. "Jadi mereka kampanye *door to door*, ke rumah-rumah. Mereka mengorganisir kampanye dengan keliling, jalan-jalan. Senyap," imbuh Nazir.

Berdasarkan keterangan itu, praktis hanya PNI dan Masyumi yang melakukan kampanye secara terbuka di ruang-ruang publik. Namun, menurut Nazir, ini pun tak lepas dari masalah. Masyumi kerap kali dikritik karena menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. *Kedaulatan Rakjat* dan *Nasional* adalah dua koran yang paling sering menyuarakan hal tersebut. Tapi toh hal itu tetap dibolehkan, sebab saat itu belum ada peraturan yang melarangnya. "Mereka mengkampanyekan calon-calonnya itu di masjid-masjid. Bahkan spanduk-spanduknya ada di sana," terangnya.

Arti penting Pemilu 1951

Pada 7 Oktober 1951, pemilu putaran kedua diselenggarakan secara serempak di tiap kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Panitia pemilu sejatinya merencanakan bahwa hasilnya akan diumumkan tanggal 20 Oktober, tetapi karena kerja keras mereka, hasil perolehan suara telah dapat ditetapkan pada tanggal 15.

Dari 40 kursi, Masyumi mendapat 18, PPDI mendapat 7, PKABT mendapat 5, dan PNI memperoleh 4. Sementara itu, Partai Katholik, Sekretaris Sekerja Pamong Praja (SSPP), dan PIR masing-masing mendapat dua kursi saja.

Strategi Masyumi, kendati menuai kritik, ternyata berhasil mengantarkan mereka mendapatkan kursi terbanyak di dewan legislatif. PNI, di sisi yang lain, meskipun mengajukan 75 orang calon, hanya mampu menempatkan empat wakilnya di DPRD. Yang tidak terduga adalah PPDI. Meski hanya mengajukan 10 orang calon, namun berkat kedekatannya dengan masyarakat dan strateginya memanfaatkan birokrasi, organisasi ini mampu mengantarkan 7 orang perwakilannya menjadi anggota dewan.

Pemilu 1951 bisa dibilang selesai pada pertengahan November tahun itu. Pelantikan anggota dewan yang terpilih dilakukan lebih dari sebulan setelahnya pada 24 Desember. Panitia pemilu pun dapat bernafas lega karena telah bekerja sebaik-baiknya terlepas dari semua keterbatasan dan tantangan yang mereka hadapi. Namun, dampak Pemilu 1951 tak berhenti di sana.

Selama beberapa bulan berlangsungnya proses pemilu itu, ribuan mata tertuju ke Yogyakarta. Meskipun Minahasa pada tahun itu juga melaksanakan pemilu daerah, orang-orang lebih mengikuti berita-berita soal pemilu di Yogyakarta.

Selama beberapa bulan berlangsungnya proses pemilu itu, ribuan mata tertuju ke Yogyakarta. Meskipun Minahasa pada tahun itu juga melaksanakan pemilu daerah, orang-orang lebih mengikuti berita-berita soal pemilu di Yogyakarta. Nazir menduga, hal itu karena faktor jarak. Yogyakarta lebih mudah dijangkau dari ibu kota ketimbang Minahasa. Sebab itulah, pemilu di Yogyakarta lebih menarik perhatian pemerintah

pusat daripada pemilu-pemilu lain di luar Jawa.

"Akibat pemilu itu, Jogja jadi masyhur, lho!" seru Nazir bersemangat. Dalam pengamatannya, pemberitaan bertubi-tubi tentang pemilu membuat Yogyakarta menjadi hidup kembali layaknya masa pergerakan di awal abad ke-20, saat banyak organisasi menggelar pertemuan-pertemuan besar di sana.

Tak sampai di situ, menurut Nazir, Pemilu 1951 di Yogyakarta ternyata menjadi acuan pemilu-pemilu setelahnya. Ada banyak kunjungan dari pemerintah-pemerintah daerah lain yang hendak melangsungkan pemilu. "Bahkan, Pemilu 1955 dan 1957, itu semua barometernya melihat Jogja. Jogja menjadi tempat studi, tetapi sistemnya kemudian diganti menjadi pemilu secara langsung," papar Nazir.

Padahal, seperti telah dijelaskan sebelumnya, panitia pemilu bekerja dengan penuh keterbatasan. Media komunikasi saat itu tak secanggih sekarang dan masyarakat masih betul-betul awam soal demokrasi. Dana dari pusat, sebagaimana ditulis oleh Nazir, juga selalu kurang dan terlambat turun. Akibatnya, mereka mesti berhemat sampai-sampai honor mereka pun dipangkas. Meski begitu, Pemilu 1951 di Yogyakarta tetap berjalan sukses. Semangat panitia begitu besar, lebih besar dari segala keterbatasan mereka.

Tahun depan, pada 2024, Indonesia akan kembali mengadakan pemilihan umum buat yang kesekian kalinya. Zaman berubah, teknologi makin mutakhir, dan masyarakat pun tentunya lebih modern. Tantangan bagi penyelenggara pemilu hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU), jelas berbeda. Namun, rasa-rasanya, semangat panitia Pemilu 1951, semangat menegakkan demokrasi, akan tetap jadi pelajaran yang relevan hingga kapan saja. **S**

Mutiara Kata

"Hak suara adalah instrumen terkuat untuk perubahan positif."

—Karl Schmidt-Rottluff
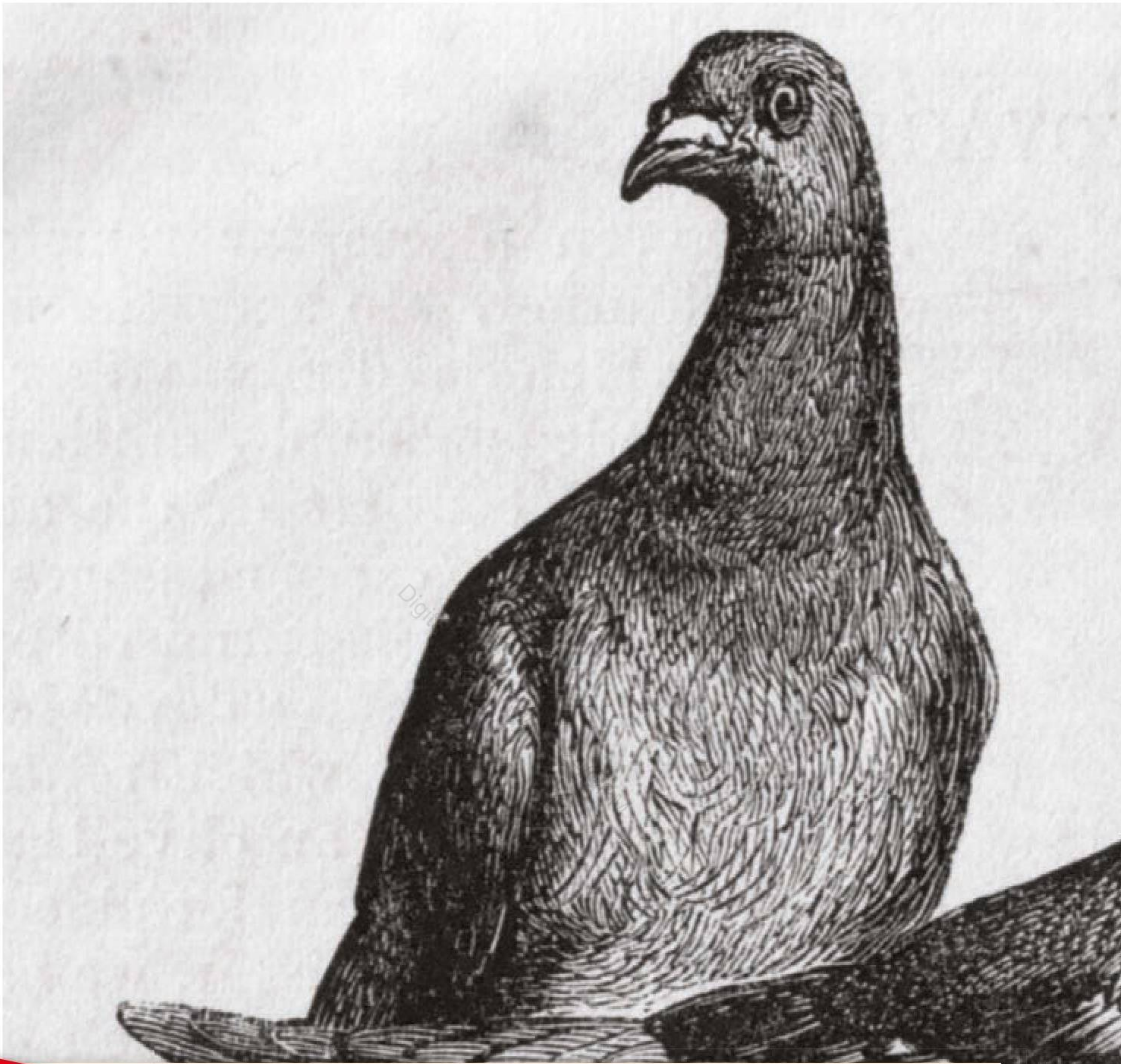
Penulis: **Rene**

Ini di tahun 1982. Entah apakah tahun depan ia akan dimintai bantuannya lagi. Tentu bukan untuk memilih atau bersedia dipilih untuk menghitung suara. Haliman Linggodigdo mempunyai banyak cerita lain tentang merpati di Indonesia.

Edisi September 1986

Merpati Pos Ikut Pemilu
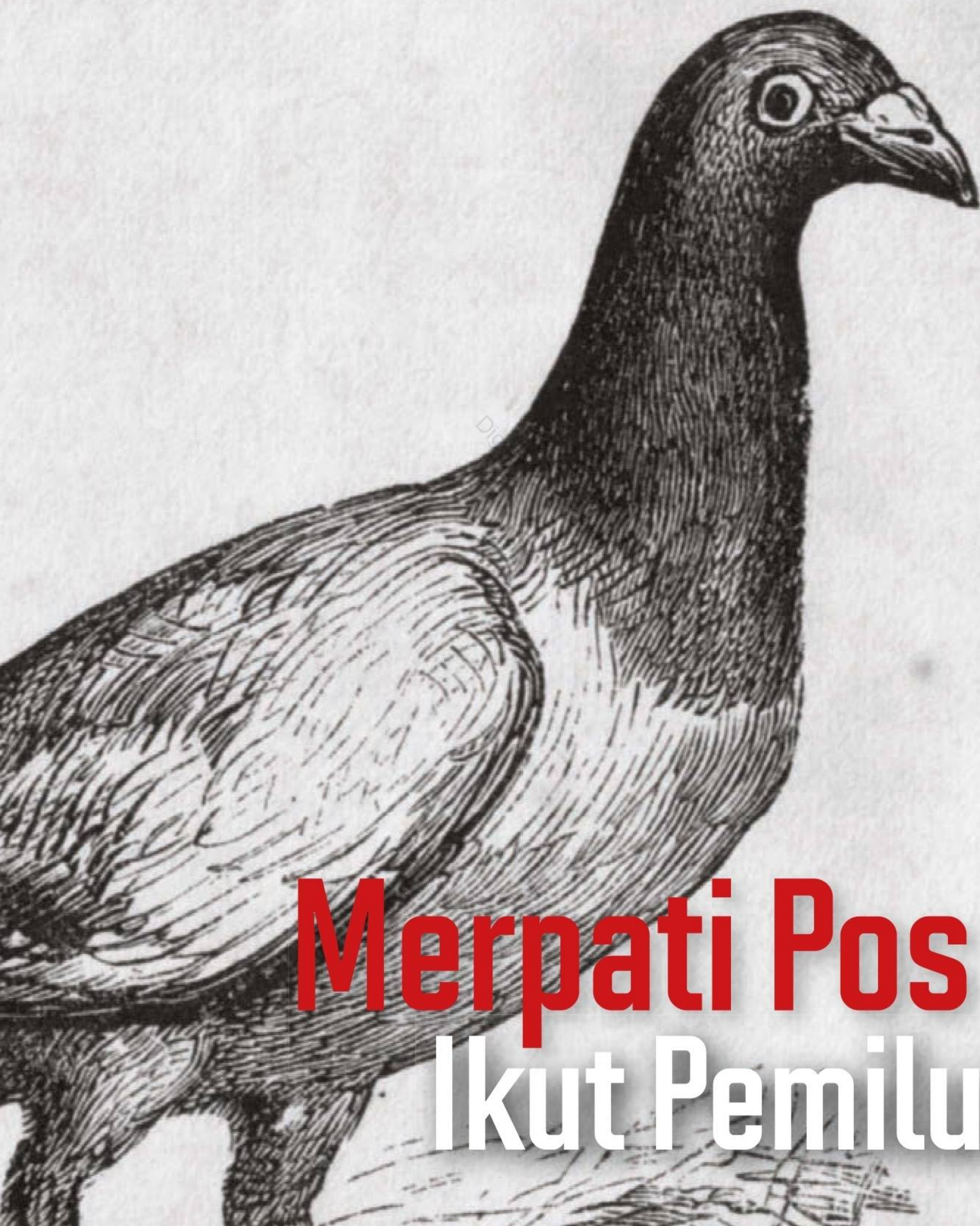
FOTO: WIKIEDIA/ *HARPER'S NEW MONTHLY MAGAZINE*

Ternyata merpati pos pun ikut pemilu. Kalau Anda tidak percaya, tanya saja ke Kantor Polisi Glodok, Jakarta.

Persatuan Olahraga Merpati pos Langlang Buana di Jakarta pernah diminta menyumbangkan 50 merpati untuk keperluan pemilu pada tahun 1982. Burung-burung itu dipelihara di Kantor Polisi Glodok, lalu dibawa ke daerah terpencil di Pulau Jawa.

Setelah penghitungan suara di pelosok-pelosok itu selesai dilakukan, beritanya dikirimkan dengan bantuan merpati pos. Ternyata berita yang diterima lebih cepat daripada yang dikirimkan melalui kendaraan bermotor.

Demikian cerita Haliman Linggodigdo (71), Sekretaris Persatuan Olahraga Merpati pos Seluruh Indonesia Cabang Jakarta, Lalang Buana.

Sejak zaman dahulu merpati pos memang dimanfaatkan untuk mengirimkan berita dan pesan. Mungkin malah jauh lebih banyak daripada sekarang, karena belum ada Satelit Palapa segala. Banyak kisah heroik pernah dialami oleh merpati pos, misalnya saja menyelamatkan ribuan pasukan dari serbuan musuh.

Lain Cina lain Indonesia

"Ketika umur saya baru tujuh tahun, ibu saya memberi saya uang, untuk membeli merpati biasa di pasar dengan ditemani seorang pembantu," cerita Haliman yang berasal dari Kebumen.

Guru yang berpengaruh kepadanya adalah Pastor van Lith dan Pastor Mertens. Kedua Pastor tersebut mengajar dengan teladan. Kasimo waktu itu sudah tertarik akan kerja keras kedua guru tersebut untuk memajukan suku Jawa dan terpikat oleh semangatnya yang "*sepi ing pamrih, rame ing gawe*", bekerja keras tanpa kepentingan sendiri.

Lima tahun kemudian setelah merpatinya berkembang biak, kandangnya kedatangan tamu yang tidak diundang, seekor merpati yang kakinya memakai cincin. "Saya pikir, kok burung ini lain dari yang lain?" kata Haliman. Namun, ia membiarkan saja tamu itu untuk menetap di kandangnya, sampai beberapa tahun lamanya dan menghasilkan banyak keturunan.

Ketika ia berada di Shanghai selama beberapa waktu, ia berkenalan dengan penggemar-penggemar merpati pos di sana.

Setiap minggu merpati harus disediakan 10 kg makanan yang terdiri atas campuran jagung, gabah, kacang hijau, dan kacang tanah.

FOTO: RBTH/ OLGA IGNATOVICH/MAMM/MDF/RUSSIAINPHOTO.RU

Dari mereka diketahui bahwa burung dara ras Tiongkok tidak dapat terbang cepat dan menukik dengan tajam seperti burung dara Jawa, tetapi mempunyai naluri untuk pulang yang lebih baik.

Mereka pun dilatih terbang malam dan dipasangi *sawangan* (semacam peluit) pada ekornya untuk memberi isyarat bahwa mereka telah mendekati kandang. Satu dua buah lampu petromaks digantungkan di atas kandang guna memudahkan burung-burung itu untuk kembali mengenali rumahnya.

Ketika Haliman kembali ke Kebumen, hobi memelihara merpati pos dilanjutkan kembali.

Mulai tahun 1948 ia pindah ke Jakarta dan tinggal di Jalan Mangga Besar. Selama berdiam di rumah saudaranya, Haliman kembali memelihara merpati biasa. "Sekitar tahun 1950 sudah banyak orang memelihara merpati pos, walaupun terbatas di kalangan orang Belanda," kata Haliman.

Kejadian di Kebumen terulang lagi. Kandang burung dara Haliman di Mangga Besar kedatangan seekor merpati pos dan selanjutnya berkembang biak menjadi banyak.

Juga perlu vitamin

"Memelihara merpati pos itu susah-susah gampang. Untuk masa sekarang, orang yang hanya berpenghasilan Rp 200 ribu sebulan jangan harap bisa melakukannya. Karena untuk mengikuti perlombaan dan

kebutuhan sehari-hari memerlukan biaya yang besar," ujar Haliman.

Haliman yang memelihara sekitar 25 ekor burung mengatakan bahwa setiap minggu ia harus menyediakan 10 kg makanan yang terdiri atas campuran jagung, gabah, kacang hijau, dan kacang tanah. Makanan yang diberikan pertama kali biasanya jagung dan gabah, selanjutnya baru kacang hijau atau kacang tanah.

"Merpati pos suka sekali kacang tanah. Kalau diberi sekaligus, yang lain pasti tidak akan dijamah," Haliman menjelaskan.

Kacang tanah kadang-kadang dijadikan pancingan bagi burung yang baru pulang dari perlombaan. Biasanya seekor merpati pos setelah dilepas pada jarak yang jauh tidak akan langsung masuk

BURUNG MERPATI POS

Untuk mempelajari navigasi udara seorang pilot membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dalam praktiknya ia akan dibantu berbagai peralatan canggih. Namun, lagi seekor burung merpati pos semua itu tidak diperlukan.

Dengan memiliki jangkauan pandangan yang cukup jauh, magnetisme dan semacam radar alamiah, merpati pos seakan mempunyai naluri misterius untuk kembali ke kandangnya, walaupun sebelumnya ia dilepaskan dari jarak yang sangat jauh.

Misalnya ada seorang pemilik merpati pos di Jakarta yang membawa unggas peliharaannya ke Cirebon dalam kandang tertutup dan di sana ia melepaskannya ke arah timur (berlawanan dengan Jakarta), maka hanya dalam tempo empat jam burung itu sudah kembali ke kandangnya di Jakarta. Bahkan tidak mustahil lebih cepat dari pemiliknya yang mengendarai mobil.

Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Prof. Ising, seorang sarjana Swedia, merpati pos mempunyai naluri khusus untuk bisa mendeteksi arah kandang dari tempat ia dilepaskan.

Dalam tulisan Haliman Linggodigdo pada **Intisari** nomor 35 tahun 1966 diuraikan bahwa seekor merpati pos yang sedang mencari jurusan akan terus menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Seakan-akan ia sedang mencari tanda-tanda yang mungkin bisa dikenalinya.

Menurut kesimpulan Prof. Ising, gerakan kepala burung itu secara

kandang, melainkan bertengger dulu di atas rumah. Untuk itu harus diberikan umpan kacang tanah. Setelah masuk kandang, pemiliknya bisa mencopot cincin perlombaan dari kaki burungnya. Selain makanan yang bergizi, kesayangan ini sering pula diberikan vitamin B kompleks. Bahkan supaya memiliki tenaga yang lebih besar, diberikan ramuan khusus yang terdiri atas madu dan ginseng.

Kandang bagi merpati pos sebenarnya tidak terlalu penting. Sebenarnya dengan menggunakan kotak bekas lemari dapur juga bisa. Sebab burung itu cepat mengerti bahwa kotak itu adalah rumahnya. Namun, ada baiknya kalau kita memberikan kandang yang lebih memadai.

Untuk merpati pos sebaiknya

alamiah menyebabkan adanya arus berputar pada cairan di dalam telinganya searah dengan rotasi bumi di bawahnya.

Dengan adanya gaya tarik bumi, cairan di telinganya bekerja sebagai kompas alam, sehingga ia dapat mengetahui jurusan yang harus dituju — ke Barat, Timur, Utara atau Selatan.

Alam membuat permainan pula, kata sarjana Swedia itu. Burung merpati pos itu dapat menentukan kedua garis khayal di atas bumi, ya itu garis lintang dan garis bujur. Ia mengemukakan pula bahwa sinar dan letak matahari dapat dijadikan pedoman.

Memelihara merpati memerlukan keuletan tertentu. Sekadar hobi saja tidak cukup, karena harus ditunjang pula dengan pengetahuan yang memadai. Menurut Haliman Linggodigdo, sekretaris Persatuan Olahraga Merpati Pos Seluruh Indonesia cabang Jakarta (Lalang Buana), merpati pos merupakan hasil persilangan yang gemilang dari berbagai jenis merpati biasa.

Oleh seorang Belgia, dulunya berbagai merpati pos disilangkan sesuai dengan masing-masing sifat khusus. Misalnya dicari merpati dengan kemampuan terbang tinggi, cepat dan mempunyai keuletan untuk terbang jauh.

"Jadi, sebenarnya merpati pos ini ciptaan manusia," ujar Haliman. Riwayatnya mulai ada sekitar 150 tahun yang lampau, ya itu diawali dengan penyilangan antara ras Carrier, yang merupakan burung pos asli berhidung besar, dengan ras Dragon dan Bagadette.

dibuatkan pintu keluar tersendiri, agar pada saat dibuka oleh pemiliknya, unggas-unggas ini dapat segera menghirup udara segar dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Di samping itu harus disediakan juga pintu masuk yang searah (*one way*, seperti katup), agar setelah mereka kembali ke kandang tidak bisa keluar lagi.

Haliman sendiri mempunyai kandang yang lumayan besar, diletakkan di bagian belakang rumahnya dan pintunya menghadap ke Selatan. Letak yang demikian dirasakan ideal.

"Kalau dulu kebanyakan kandang menghadap ke Timur. Sekarang lebih banyak menghadap ke Selatan, dengan bagian kiri dan kanan kandang dipasangi kawat. Maksudnya supaya sepanjang hari matahari bisa masuk. Kalau menghadap ke Utara, akan terlalu banyak angin," Haliman menjelaskan.

^0597^ yang hebat

Mengenai kandang burung, Haliman mempunyai cerita tersendiri. Sekitar tahun 1977-1978 oleh seorang rekannya ia diberikan seekor burung betina yang pernah menjauhi penerbangan dari Lombok ke Jakarta dengan nomor cincin Derby-74-0597.

Peristiwa itu terjadi ketika Haliman masih tinggal di Jalan Sentiong dan burung itu sengaja ia kurung karena khusus dipakai sebagai bibit unggul.

Sekali waktu burung itu terlepas dari kandang dan Haliman beranggapan bahwa burung itu pasti kembali ke kandang asalnya di Ancol, alamat temannya itu.

Ternyata tidak. Keesokan harinya burung betina itu masuk lagi ke kandangnya di Jalan Sentiong. Sejak saat itu, ^0597^ dibiarkan terlepas bebas setiap hari. Bahkan sering pula diterbangkan dari luar kota dan selalu kembali dengan baik.

Awal tahun 1985 Haliman pindah ke daerah Cipinang Muara. Sudah tentu ^0597^ diboyong juga. Sekali waktu burung itu terlepas lagi dari kandang karena tidak sengaja. "Wah, sudah pasti dia hilang," keluh Haliman pasrah. Ternyata dua hari kemudian, ^0597^ kembali ke kandangnya di Cipinang Muara.

Menurut Haliman, burung ini sungguh aneh bin ajaib. Dia bisa kembali ke kandangnya yang baru 13 bulan dia tinggali. Padahal belum pernah satu kali pun ia hinggap di genteng. Sejak saat itu ^0597^ diberi kebebasan terbang di sekitar kandang setiap hari.

Tidak boleh sakit

"Berbeda dengan merpati biasa, burung semacam ini tidak mau sembarangan diberi makan," kata Haliman. "Mereka hanya mau

Bibit merpati yang sekarang ada banyak didatangkan dari Negeri Belanda, Amerika Serikat dan Australia. Masing-masing jenis mempunyai keahlian tersendiri sesuai dengan keadaan alam asalnya.

FOTO: RBTH/ LEONID VELIZHANIN/TASS

makan jika sudah disediakan di dalam kandangnya. Jadi, biarpun ada orang lain mencoba-coba untuk memancingnya dengan makanan, hal itu akan sia-sia saja," ia menambahkan.

Selain itu, dibedakan dengan merpati biasa yang hanya dinilai kecepatan untuk perlombaan jarak pendek, merpati pos memerlukan makanan yang banyak mengandung lemak dan karbohidrat. Ini dimaksudkan agar badannya sintal untuk "penerbangan" jarak jauh.

Memberikan makanan pada merpati pos perlu perhatian khusus. Walaupun sudah ada menu tertentu, kebersihan makanannya harus dijaga agar jangan sampai mengandung cacing.

Ternyata cacing tidak dipandang bulu. Merpati pos dijadikannya juga tempat bersarang yang nyaman. Untuk membasminya, merpati pos harus diberi obat Peperisine. Derita lain yang juga dialami adalah oksidiosis, yaitu radang usus. Tidak ketinggalan penyakit pilek dan cacar. Burung yang pernah sakit sudah dianggap cacat, karena kemampuannya untuk terbang jarak jauh akan berkurang.

Bibit merpati yang sekarang ada banyak didatangkan dari Negeri Belanda, Amerika Serikat dan Australia. Masing-masing jenis mempunyai keahlian tersendiri sesuai dengan keadaan alam asalnya. Misalnya yang berasal dari Inggris mempunyai sifat yang sangat ulet. Karena mereka harus sering terbang dari Inggris menuju daratan Eropa melalui Selat Channel.

Merpati yang masih berusia muda mulai dilatih dengan jarak 3 km, berikutnya dilanjutkan dengan 16, 25, 40, sampai 100 km. Pada jarak 100 km harus dilakukan latihan secara teratur agar naluri mengenal arah kandang menjadi lebih tajam.

FOTO: RBTH/BUNDESARCHIV

Menurut genetiknya, merpati pos yang sebelumnya dengan yang sekarang perbedaannya tidak terlalu besar. Pada masa kini makin banyak merpati yang bersifat lebih unggul, karena teknik persilangan yang makin maju.

Jenis merpati di dunia ini jumlahnya ratusan. Hampir setiap negara mempunyai beberapa jenis. Misalnya Bricoux — ras Belgia, Osman —ras Osman (Inggris), Sion — ras Perancis dan ratusan ras lainnya. Dari berbagai ras yang sudah ada diperoleh hasil persilangan yang unggul, misalnya ras-ras H.V. Riel, Delbar, Stichelbout, Havenith, Trenton, Baker dan Paperman.

Melatih seekor merpati harus dimulai sejak ia berusia 40 hari. Anak burung itu mulai dilepaskan di sekitar kandang agar ia dapat mengenali lingkungannya. Usia ini dianggap cocok, karena kemampuan terbangnya masih lemah, sehingga kemungkinannya kecil untuk kabur.

Pada saat tertentu sebaiknya burung itu dilepas dari jarak yang sudah diatur. Untuk merpati yang masih berusia muda dimulai dengan jarak 3 km, berikutnya dilanjutkan dengan 16, 25, 40, sampai 100 km. Pada jarak 100 km harus dilakukan latihan secara teratur agar naluri mengenal arah kandang menjadi lebih tajam.

Naluri tertentu harus dimengerti dalam melatih merpati pos. Biasanya mereka akan mengikuti arah pegunungan yang agak

menonjol. Jarang sekali mereka melintasinya. Begitu pula pada saat melintasi sebuah anak sungai, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memutar.

Pada saat perlombaan berlangsung, mereka akan terbang berombongan. Jadi tidak perlu merasa khawatir kalau hanya satu-dua burung saja yang mempunyai kebiasaan menolak mengambil jalan pintas seandainya akan melintasi sungai atau pegunungan.

Perlombaan yang dilakukan untuk merpati pos cukup rumit. Kategori jaraknya dibagi menjadi tiga. Jarak dekat (300 — 400 km), menengah (700 — 800 km) dilepas dari Surabaya dan jarak jauh (1.200 km).

Pada saat perlombaan, ratusan merpati dikumpulkan pada satu kandang besar dengan berbagai kandang kecil di dalamnya. Setiap orang yang mengirimkan lebih dari satu burung, tidak boleh mengumpulkannya dalam satu kandang. Ini untuk menghindari terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi.

Bisa saja ketika akan dilepaskan, ada kandang tertentu yang mendapat kesempatan lebih dahulu. Atau malah sebaliknya, peserta dirugikan karena burungnya tidak diberi makan atau minum, padahal setelah itu mereka harus menempuh perjalanan panjang.

Untuk melepaskan ratusan burung di tempat yang jauh diperlukan petugas yang dapat dipercaya. "Sampai saat ini kami sering meminta bantuan seseorang yang berasal dari Timor Timur untuk mengkoordinasikan pelepasan burung untuk perlombaan. Karena dia sangat kami percaya," kata Haliman.

Di tempat pelepasan burung biasanya petugas ini minta bantuan pejabat gereja untuk menyaksikan dan mengesahkan awal perlombaan dengan membubuhkan tanda tangan pada secarik kertas yang antara lain bertuliskan mengenai waktu pelepasan dan dilakukan sesuai prosedur.

Hambatan untuk merpati pos yang dilepaskan dari jarak menengah umumnya hanya hujan atau angin yang berputar pada musim pancaroba, sehingga dapat menyebabkan burung itu turun dan mencari tempat perlindungan. Jadi jarak yang dapat ditempuh kurang dari sehari dan terpaksa tertunda beberapa jam.

Cemburu

Haliman Linggodigdo yang selama 20 tahun pernah menjadi juru bahasa Inggris pada sebuah SMTA di Jakarta lebih jauh menuturkan, kekhawatiran lebih besar terjadi untuk perlombaan jarak jauh. Selama dalam perjalanan merpati pos itu paling

tidak harus minum. Bahayanya kalau burung itu minum di sawah yang baru saja disemprot pestisida, bisa semaput. Jika ia minum di sungai, tidak akan menjadi masalah.

Dalam perlombaan biasanya digunakan lonceng, yaitu suatu alat khusus pencatat kedatangan burung. Selain cincin yang sudah paten (dipakai seumur hidup), merpati pos harus menggunakan pula cincin karet pada saat perlombaan.

Cincin itu dicopot dari kaki burung, ketika ia sampai di kandang dan dimasukkan ke dalam lonceng (*pigeon timer*) sekaligus disertai dengan penekanan tombolnya. Pada gulungan kertas yang ada di dalamnya tercatat jam waktu pulang. Cara kerjanya hampir sama dengan *cash register*.

Lonceng ini ada yang berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Sifat masing-masing lonceng milik anggota sebelumnya diberitahukan kepada panitia perlombaan. "Maklumlah kualitas lonceng 'kan tidak semuanya sama," kata Haliman. Namun, semua itu nantinya akan diperhitungkan pada saat lonceng diserahkan kepada panitia perlombaan.

Jarak antar rumah juga disesuaikan waktunya. Misalnya untuk burung yang dilepaskan bersamaan dari Surabaya, saat masuk ke Cipinang dan Grogol harus diperhitungkan, karena jarak antara kedua tempat itu jauh berbeda. Seandainya pada lonceng terlihat bahwa merpati masuk bersamaan di antara kedua tempat itu, maka jelaslah bahwa yang menang adalah yang berkandang di Grogol, karena jaraknya lebih jauh dari Surabaya.

Untuk menjaga agar jangan sampai pemilik lonceng mengotak-atik isinya, tutupnya dipasangi segel sesuai dengan perkumpulan di mana anggotanya bernaung.

Pernah ada peserta dari Taiwan yang nekat membawa merpati posnya dengan menggunakan pesawat udara. Kecurangan semacam ini disebabkan hadiah yang tersedia cukup besar, bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Banyak cara lain yang sering dipakai orang agar burungnya cepat sampai di kandang. Seekor burung jantan akan tergesa-gesa pulang, jika sebelum dilepas, pasangannya diletakkan sekandang dengan jantan lain. Menjadi juara dalam suatu perlombaan dapat menyebabkan harga seekor merpati pos menjadi sangat melonjak. Salah satu contoh adalah merpati yang pernah menjuarai penerbangan dari Lombok ke Jakarta berani ditawar sampai Rp 3 juta. "Padahal belinya cuma Rp 5 ribu," cerita Haliman, "yaitu ketika kebetulan ada seorang penggemar merpati pos yang ingin pensiun dan melelang semua burungnya."

Tinggal kandang

Memelihara merpati perlu suatu kontak batin. Baik itu pada saat membelinya, maupun pada perawatan sehari-hari. Memilih burung harus mempunyai *feeling* yang tajam. Karena dengan demikian hubungan yang akan berjalan dengan harmonis sampai saat dilangsungkannya perlombaan.

"Kalau kita membeli merpati pos, maka kita harus juga 'membeli' pemiliknya. Dalam arti, cara pemeliharaannya yang sebelumnya harus terus diterapkan. Kalau tidak, burungnya bisa loyo," ujar Haliman.

Menurut dia, untuk Indonesia pemeliharaan dan perkumpulan merpati pos hanya ada di Pulau Jawa. Pada tingkat Asia, penggemarnya berkumpul dalam Asian Racing Pigeon Fancier Federation yang berpusat di Taipei.

"Untuk tingkat Asia ini tidak ada persyaratan jumlah perkumpulan yang terhimpun di dalam suatu negara anggota. Berbeda dengan tingkat dunia, Federation Colombophile Internationale yang berpusat di Belgia mengharuskan setiap negara memiliki anggota minimum 100 perkumpulan," ujar Haliman.

Lebih lanjut ia menjelaskan, "Memang olahraga merpati ini sudah dikenal di dunia cukup lama. Di Indonesia penggemarnya dari anak-anak sampai kakek-kakek. Bahkan termasuk juga para dokter dan insinyur." Namun, ada punya yang "gemar" terhadap merpati pos milik umum.

Haliman menceritakan bahwa Pemda DKI pernah meminta sekitar dua ratus merpati pos untuk mengisi kandang burung terbuka di sekitar lapangan Monumen Nasional, Jakarta. Karena burung itu dianggap setia pada kandang. "Saya menganggap hal ini suatu gagasan yang baik. Agar kita bisa memiliki semacam Trafalgar Square yang ada di London," katanya.

Tidak sampai sebulan semua merpati itu lenyap. Yang tertinggal hanya kandangnya, karena isinya sudah digasak orang yang tidak bertanggung jawab. "Tepat seperti dugaan saya semula," ujar Haliman sedikit gemas. **S**

Mutiara Kata

"Menghormati hak suara berarti menghormati hak hidup."

—Lyndon B. Johnson

Pemilu 1955:
Ribut-ribut Berebut Daulat Rakyat
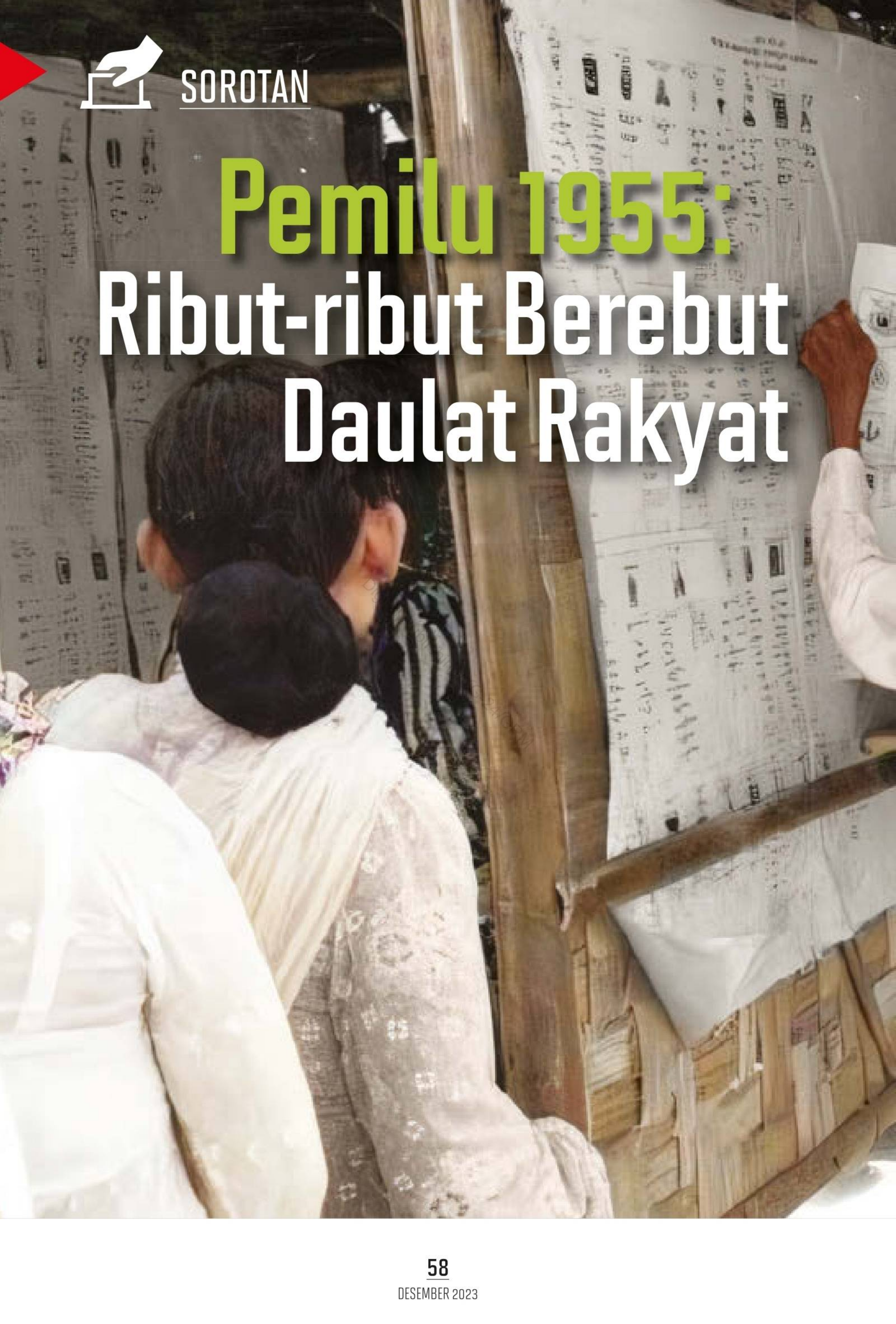
Faisal Hilmy Maulida
Peneliti Sejarah
dan Dosen Binus University @Malang

Membicarakan Republik Indonesia periode 1950-an, ibarat seperti benang kusut, sulit diurai dan dicari ujung pangkalnya. Indonesia yang harusnya seperti apa, justru dibentuk pada periode ini, malangnya justru banyak peristiwa dan sumber sejarah yang tak banyak terungkap bagaikan bab yang hilang.

FOTO: ANRI/NASKAH *SUMBER ARSIP JEJAK DEMOKRASI PEMILU 1955*; PEWARNA: SULTAN

Seorang Indonesianis, Ruth McVey bahkan menyebut periode ini sebagai "Indonesia seharusnya seperti apa", selain itu dikatakannya "Periode 1950-an adalah persoalan hakikat demokrasi dan bagaimana pengembangan demokrasi berjalan," tulis Adrian Vickers dalam *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (2013).

Sita van Bemmelen dan Remco Raben senada dengan pandangan tersebut, mereka menuliskan dalam *Antara Daerah dan Negara, Indonesia Tahun 1950-an* (2011) bahwa Historiografi Indonesia, untuk masa yang cukup lama, tahun 1950-an dianggap *terra incognita*, dan hanya sebagian kecil daerah di Nusantara waktu itu yang diteliti para ilmuan. Berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia telah menjadi topik dari beberapa kajian yang fundamental pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, tetapi setelahnya hampir tidak ada lagi penelitian yang dilakukan mengenai kurun waktu tersebut.

Kajian tentang Pemilu 1955 yang menjadi rujukan utama adalah *Interim Report Series* (1957) oleh Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University karya Herbert Feith yang berjudul *Indonesia Election of 1955*, yang kemudian dicetak ulang dengan terjemahan bahasa Indonesia, berjudul *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (1999)*. Melalui buku ini Feith menjelaskan rinci mengenai Pemilihan Umum 1955, dimulai dari latar belakang penyelenggaraan Pemilu, kampanye, pemungutan suara, hingga analisa mengenai perolehan suara.

Bila dibandingkan dengan India, sebagai sesama negara berkembang yang berhasil penyelenggarakan pemilihan umum pertama pada 1951-1952. Poedjoboentoro dalam *Pemilihan Umum di India* (1952) menuliskan bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk pemilu anggota *House of The People* (Dewan Perwakilan Rakyat di Pusat) tidak lebih baik dari pemilu pertama di Indonesia.

Tulisan lainnya yang merekam peristiwa Pemilu 1955 termuat dalam buku *Kemelut Demokrasi Liberal, Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton* (1992) yang merupakan surat-surat Boyd R. Compton selama tinggal di Indonesia dalam kurun waktu 1952-1956, tak kurang 50-an surat dan laporan

Formulir-formulir tanda gambar untuk pemilu sedang dicetak di Percetakan Negara Jakarta, 23 Juli 1955.

FOTO: ANRI/*NASKAH SUMBER ARSIP JEJAK DEMOKRASI PEMILU 1955*; PEWARNA: SULTAN

kepada International of Current World Affairs (ICWA). Isinya pengamatan dan analisa mengenai perkembangan masyarakat dan politik Indonesia tahun 1950-an. Ia menulis sisi-sisi kehidupan politik dan sosial Indonesia dari pengamatannya terhadap corak birokrasi pemerintahan, ketegangan pusat daerah, pertikaian ideologis antar partai, percekcokan di lingkungan tentara, dan dalam kerangka yang lebih spesifik, juga perkembangan kebudayaan nasional.

Secara garis besar, tulisan berkaitan Pemilu 1955 memberikan argumen mengenai sisi Demokratis Pemilu 1955. Munculnya pendapat demikian cukup beralasan, "Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tersebut sangat tinggi, sebanyak 87,65 persen tingkat partisipasi pemilih atau dengan kehadiran 39 juta orang ke tempat pemungutan suara dari total daftar pemilih sejumlah 43.104.464 orang, rinciannya 37.875.299 suara sah pada pemungutan suara 29 September 1955," tulis Herbert Feith (1999).

Bila dibandingkan dengan India, sebagai sesama negara berkembang yang berhasil penyelenggarakan

pemilihan umum pertama pada 1951-1952. Poedjoboentoro dalam *Pemilihan Umum di India* (1952) menuliskan bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk pemilu anggota *House of The People* (Dewan Perwakilan Rakyat di Pusat) tidak lebih baik dari pemilu pertama di Indonesia. Kurang lebih 176.600.000 orang berhak memberikan suara untuk memilih, sejumlah 107.578.000 orang atau 60,9 persen menggunakan hak pilihnya, dan 209.200 suara atau 1,9 persen dinyatakan tidak sah.

Disamping faktor partisipasi pemilih, William Liddle dalam *Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik* (1992) menyebut sisi demokratis Pemilu 1955 yang berbeda dengan pemilu era Orde Baru adalah tingkat kompetisi antar partai yang sangat bebas, meskipun konflik antar partai cenderung meruncing.

Program politik lintas kabinet

Pemilihan umum secara nasional yang berhasil terselenggara pada tahun 1955 tidak *"ujug-ujug"* terjadi begitu saja. Pasca revolusi, pemilihan umum menjadi isu politik yang penting dalam percaturan politik pada masa-masa itu karena ada pengharapan tinggi dari rakyat akan penghidupan sosial politik yang lebih baik pasca perang Revolusi Kemerdekaan (1945-1949). Periode setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda hampir setiap kabinet yang berkuasa menjanjikan atau merencanakan pemilihan umum sebagai program kerjanya.

Kabinet Hatta awalnya berencana untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk menghasilkan Dewan Konstitunte, hasil pemilihan akan menentukan apakah negara Republik Indonesia mengambil bentuk Kesatuan atau Federal. Namun ide ini gagal."Dorongan yang kuat untuk menjadikan negara kesatuan akhirnya membatalkan pemilihan umum ini," tulis Daniel Dakhidae dalam *Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik* (1986).

Awal tahun 1950-an, pemerintah mulai melakukan pembahasan mengenai pemilu dan memasukannya ke dalam agenda resmi. Wacana pemilu ini kembali bergulir hingga Kabinet Natsir dan Sukiman (Masjumi). Kabinet Sukiman dalam *Kabinet-kabinet Republik Indonesia* (1957), program ketiga kabinet ini menyatakan akan menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan itu dalam waktu singkat. Belum genap satu tahun memerintah dan belum sempat mewujudkan program tersebut, kabinet Sukiman jatuh

Setelah Undang-Undang Pemilihan Umum disahkan, wacana penyelenggaraan pemilu mulai digarap lebih serius. Kabinet Ali Sastroamijoyo I yang menjadi penerus Kabinet Wilopo meneruskan salah satu program politik Wilopo dengan menyetujui keberadaan Panitia Ad Hoc urusan Pemilihan Umum yang dibentuk oleh Kabinet Wilopo.

dan digantikan Kabinet Wilopo sejak 3 April 1952.

Pengganti Sukiman sebagai Perdana Menteri, Wilopo (PNI) berhasil merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (UU Pemilu). "Perumusan UU Pemilu telah digodok oleh kabinet Wilopo yang menjabat sejak 3 April 1952. Selama proses penyusunan UU Pemilu berbagai gangguan dialami oleh Kabinet Wilopo, salah satunya muncul dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. Setelah peristiwa itu meletus, muncul kekacauan di dalam maupun luar parlemen." tulis Subagio Reksadipuro dalam *Wilopo 70 tahun* (1979).

Menurut Abdul Haris Nasution dalam *Peristiwa 17 Oktober 1952, Ketika "Moncong" Meriam Mengarah ke Istana Merdeka* (2013), Peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi karena adanya campur tangan parlemen terhadap kehidupan militer dan adanya perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat. Peristiwa itu terjadi tidak hanya kesalahan dari pimpinan Angkatan Darat yang mengajukan usul kepada Presiden untuk membubarkan parlemen tetapi juga karena adanya upaya parlemen untuk campur tangan dalam urusan militer. Dalam kehidupan politik, peristiwa ini memberi dorongan terhadap terlaksananya pemilu pada tahun 1955.

Setelah Undang-Undang Pemilihan Umum disahkan, wacana penyelenggaraan pemilu mulai digarap lebih serius. Kabinet Ali Sastroamijoyo I yang menjadi penerus Kabinet Wilopo meneruskan salah satu program politik Wilopo dengan menyetujui keberadaan Panitia Ad Hoc urusan Pemilihan Umum yang dibentuk oleh Kabinet Wilopo. Panitia Ad Hoc ini terdiri dari pegawai Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kantor Pemilihan Pusat, dan Kantor Percetakan Negara.

Anggota sedang melakukan tugasnya menjaga keamanan di daerah Kebon Kacang, Jakarta 29 September 1955

FOTO: ANRI/NASKAH SUMBER ARSIP *JEJAK DEMOKRASI PEMILU 1955*; PEWARNA: SULTAN

Upaya awal dalam melaksanakan UU Pemilu ini, Kabinet Ali Sastroamijoyo I berkontribusi dalam pembagian daerah pemilihan untuk masing-masing daerah dalam kabupaten, kecamatan, dan desa berdasarkan Pasal 130 *jo*. Pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 1953. Hasil pembagian itu perlu diketahui, mengingat nantinya dalam pembelian dan pengiriman alat-alat kedaerah-daerah dapat berjalan efisien dan hemat. Untuk pembagian daerah ini dilibatkan gubernur dari tiap-tiap daerah.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I runtuh sebelum pemungutan suara berlangsung. Gantinya sejak 12 Agustus 1955, Kabinet Burhanudin Harahap (Masjumi) memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan jalannya pemilu yang telah disusun oleh kabinet sebelumnya. Kabinet Burhanudin Harahap memiliki tujuh program. Salah satu program adalah pelaksanaan pemilu, pada poin mengenai program tersebut berbunyi melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru. Kabinet ini pada akhirnya berhasil menyelenggarakan pemilu, dari proses pemungutan suara hingga penetapan hasil pemilu. Kabinet ini berakhir 24 Maret 1956 seiring dengan penyusunan kabinet baru yang disusun oleh formatur pemenang Pemilu 1955 (PNI).

Penculikan dan persoalan keamanan

Percobaan penculikan beberapa orang-orang pemerintah terjadi menjelang dilangsungkannya pemilihan umum. Salah seorang anggota Dewan Pimpinan Masjumi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kiai Haji Mansjur dengan dibantu Wardani warga Sentolo, Haji Moh. Dimjati warga Muntilan, Wates, Notosoedarmo (lurah Desa Wates), Hadisajadi (Pembantu Letnan Staf Reg. I Bat. XIII) dan Barodji (pegawai STP Negeri Wates) dilaporkan akan melakukan penculikan dan penggarongan terhadap orang-orang terkemuka yang menyokong pemerintah (PNI, PKI, dan lainnya), aksi ini direncanakan akan terjadi pada tanggal 12 atau 13 Januari 1954 jam 1 malam.

Aksi jahat itu urung dilakukan karena perencanaan aksi itu telah bocor dan Kiai Haji Mansyur telah ditangkap oleh Polisi Yogyakarta (Surat Kejaksaan Agung kepada Mahkamah Agung Indonesia No. PLK C.2/625/3/3 perihal penculikan terhadap orang-orang pemerintah dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959, jilid II: 1108).

Selama masa persiapan pemilu bahkan terdapat beberapa panitia badan penyelenggara pemilu di daerah yang diculik dan gugur ketika menjalankan tugas. Acting Gubernur Sulawesi, Donggeng Dg. Ngasa melaporkan kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Mei 1956 tentang adanya penculikan terhadap anggota panitia penyelenggara pemilu di wilayahnya.

“Mereka yang hilang adalah Andi Djije (Anggota PPP Pinrang) yang diculik di sekitar Pinrang pada 20 Agustus 1955 dirumahnya dan dibawa masuk ke hutan dan Muh. Junus (Anggota PPS Pinrang) yang hilang sejak 7 Juli 1955 di sekitar Pinrang, menurut keterangan korban dipaksa masuk hutan oleh gerombolan-gerombolan dengan disertai ancaman, keduanya belum kembali hingga laporan disampaikan.” tulis Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959, jilid II (1133).

Melalui laporan tersebut dilaporkan di Brebes, Jawa Tengah sejumlah 10 orang panitia penyelenggara pemilu gugur dalam menjalankan tugas. Kesepuluh orang tersebut antara lain, Achmad Sef (Wakil Ketua PPP Kabupaten Brebes), Abdoeldjamil (Anggota PPS Kecamatan Sirampog), Ranawidjaja (Wakil Ketua PPP Desa Tanggungsari, Kecamatan Ketanggungan), Machmoed (Anggota PPP Desa Sindangjaya, Kecamatan Tanjung), Djoemarta (Wakil

Ketua PPP Desa Tambakserang, Kecamatan Bantarkawung), Taklim (Lurah/Ketua PPP Desa Karangjokeng, Kecamatan Tanjung), Karnadi (Lurah/Ketua PPP Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan), Karsad (Carik selaku anggota PPP Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan), Soemar (Lurah/Ketua PPP Desa Sutamaja, Kecamatan Tanjung), Soemaid (Lurah/Ketua PPP Desa Mlajang, Kecamatan Sirampog). Semua korban dilaporkan meninggal akibat diculik kemudian dibunuh oleh sekelompok gerombolan-gerombolan pengacau.

Persoalan keamanan penyelenggaraan pemilu pertama ini bukannya tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah, Djawatan Kepolisian Negara berupaya memberi rasa aman persiapan jalannya pemilu dengan cara mengirimkan beberapa personilnya ke luar negeri untuk melakukan studi mengenai pengelolaan keamanan. Kepala Kepolisian Negara saat itu, R.S. Soekanto merencanakan pengiriman dua rombongan yang masing-masing terdiri tiga orang kader kepolisian.

"Rombongan pertama dikirim ke India, Pakistan, dan Birma, sedangkan rombongan kedua ke Jepang dan Filipina. Perjalanan rombongan ini direncanakan pada bulan Agustus/September 1953. Pengiriman rombongan ini dipandang perlu dilakukan supaya memberi pengetahuan dan pengalaman bagi personil kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah keamanan yang akan dihadapi pada penyelenggaraan Pemilu 1955," tulis Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri, jilid I (1908).

Menurut keterangan polisi, Djanawin, yang tinggal di Jalan Bekasi Timur V No. 14 A dilaporkan Wedana Jatinegara Singgih. Ia kemudian ditangkap di kediamannya dengan tuduhan hendak menjual surat suara Pemilihan Umum.

Nyoblos dua kali

Pemilu 1955 tidak berjalan mulus seperti jalan tol, ada saja riak masalah yang menghantam persiapan pemilu. Di Jakarta, petugas bagian keamanan Percetakan Negara Djanawin bin Nali didakwa mencuri surat suara pemilu. Kisah ini termuat dalam *Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri* tahun

1950-1959 (1926). Peristiwa ini menjadi besar hingga Ketua PPI (Panitia Pemilihan Indonesia), S. Hadikoesomo turun tangan.

Merujuk pada laporan polisi Jakarta Raya yang dibuat Inspektur Polisi Dua Soetojo menjelaskan, pada Sabtu, 27 Agustus 1955 pukul 16.15, Pembantu Inspektur Polisi Satu H.A. Boermeister dari kantor polisi Jatinegara, Ketua PPI Hadikoesomo, dan Wedana Jatinegara R. Singgih, serta dua orang lainnya membawa seorang pria bernama Djanawin bin Nali (37).

Menurut keterangan polisi, Djanawin, yang tinggal di Jalan Bekasi Timur V No. 14 A dilaporkan Wedana Jatinegara Singgih. Ia kemudian ditangkap di kediamannya dengan tuduhan hendak menjual surat suara Pemilihan Umum. Menurut keterangan Djanawin, ia mengambil surat suara itu di garasi mobil gedung Percetakan Negara pada Jumat, 26 Agustus 1955, sekitar pukul 16.00. Padahal Djanawin adalah pegawai yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di kantor itu.

Keesokan harinya, kertas itu dijual kepada seorang pedagang Tionghoa, Lauw It Tjoen (35). Menurut si pedagang, dalam keterangannya kepada polisi setempat, Djanawin datang kepadanya 27 Agustus 1955, sekitar pukul 11.30, dengan membawa setumpuk kertas untuk dijual. Ketika ditimbang, ternyata kertas itu berbobot 2 kg.

"Ketika itu saya ambil satu lembar dan saya lihat-lihat, ternyata surat itu adalah kertas suara, apakah masih berlaku atau tidak saya tidak tahu dan karena ragu-ragu saya tidak jadi membelinya dan saya minta dia bawa kembali kertas itu dan hanya dua lembar kertas saja yang ditinggalkan untuk bungkusan barang," terang Lauw It Tjoen kepada penyidik, seperti tercatat dalam berita acara pencurian di Kantor Polisi Jakarta nomor 1690/K/S.VI.

Lembaran kertas surat suara di toko Law It Tjoen itu diketahui Salim bin Simin, yang langsung melaporkannya ke Wedana Singgih dan Polisi Seksi VI Jatinegara. Mendapat laporan itu, polisi segera menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan penggeledahan di rumah Djanawin dan Lauw It Tjoen. Polisi menemukan beberapa lembar surat suara di tempat Lauw It Tjoen, namun yang lainnya tidak ditemukan.

Ketika ditanya polisi apakah ia telah mendapatkan izin dari pengawas percetakan negara ia mengakui memang tidak mendapatkan izin akan perbuatannya itu. "Saya memang

mengambil kertas surat suara itu tanpa seizin pengawas atau setahu siapapun juga dan saya merasa tidak menjual kertas itu sebanyak dua kilogram, hanya ketika saya berbelanja di toko Tionghoa yang ada di depan rumah saya sendiri, kertas suara yang empat lembar itu telah terbawa di dalam saku celana yang ketika saya mengambil uang, keempat kertas itu terambil dan telah saya serahkan kepada yang punya toko untuk dipakai bungkus," ujar Djanawin.

Meskipun melakukan pembelaan dihadapan polisi, Djanawin tetap tidak dapat lepas dari jerat hukum. Atas perbuatannya berdasarkan surat Kementerian Kehakiman yang ditandatangani Menteri Kehakiman Mr. Loekman Wiriadinata nomor JS.2/2/10/S/589/56, tersangka Djanawin dianggap melanggar pasal 362 KUHP. *Jo* pasal 115 UUD No. 7 tahun 1953 (L.N.No.29/1953) dan dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 4 November 1955 dengan lama hukuman 5 bulan dikurangi dengan waktu selama ia berada di dalam tahanan.

Kejadian lainnya terjadi di Wonosari, Yogyakarta, diwartakan harian *Nasional*, 18 Oktober 1955, pada saat pemungutan suara berlangsung. Seorang pemilih tertangkap melakukan pencoblosan hingga dua kali ketika pemilu parlemen dilangsungkan 29 September 1955. Seorang pemilih bernama Soemantri melakukan pencoblosan di TPS Kepek dan TPS Kakiman daerah setempat.

Uniknya menurut pengakuan Soemantri, tindakan itu dilakukan untuk melaksanakan kontrol, dengan maksud bahwa perbuatannya itu sebagai kontrol atas pekerjaan petugas-petugas pemungutan suara (PPS). Hal itu dianggap perlu oleh Soemantri agar dalam pemungutan suara Konstituante mendatang, kekurangan dan kesalahan itu dapat diperbaiki. Atas perbuatan tersebut, Soemantri dianggap bersalah karena melanggar Undang-undang nomor 7 Pasal 123 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Tentara boleh "nyoblos"

Pemilihan Umum 1955 memberikan kesempatan tantara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemberian hak pilih bagi anggota angkatan perang itu telah digagas sejak tahun 1952. Menteri Pertahanan kala itu, Sultan Hamengkubuwono IX berikirim surat kepada Perdana Menteri (Surat No. K9/5061/52) perihal tersebut pada 6 Desember 1952 dimuat dalam *Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959, jilid I* (1906).

FOTO: ANRI / NASKAH SUMBER ARSIP JEJAK DEMOKRASI PEMILU 1955; PEWARNA: SULTAN

Seorang petugas keamanan (anggota APRI) sedang memasukkan surat suaranya, 15 Desember 1955

Surat itu menyusul nota Panitia Ad Hoc Dewan Menteri dan anggota DPR sebelumnya, dalam surat itu diungkap mengenai pandangan Menteri Pertahanan tentang pelaksanaan hak pilih dari anggota Angkatan Perang (Tentara). Melalui surat itu Sultan Hamengkubuwono IX memberi masukan kepada Dewan Menteri untuk dijadikan pertimbangan bahwa pihaknya menyetujui anggota angkatan perang mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak pilihnya, baik aktif maupun pasif, sesuai dengan dasar-dasar demokrasi.

Meskipun demikian, Kementerian Pertahanan memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan hak pilih tersebut, yaitu mengingat keadaan di waktu pertempuran (operasi). Apabila suatu pasukan

sedang melaksanakan tugas pertempuran, maka segala tenaga, pikiran dan waktu perlu dipusatkan sepenuhnya pada pelaksanaan tugas itu supaya mendapat hasil sebaik-baiknya. Sebaliknya jika kepesertaan anggota Angkatan Perang dalam pemilu itu dapat mengganggu tugas pertempuran, maka disarankan oleh Menteri Pertahanan, pelaksanaan hak pilih dari anggota-anggota pasukan dalam keadaan tersebut ditunda.

"Mengacu pada Undang-undang No. 7 tahun 1953 pasal 3 tentang pemilihan umum, anggota Angkatan Perang mempunyai hak sebagai warga negara biasa untuk dipilih sebagai anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," tulis Penerangan Angkatan Darat dalam *Brosur Pemilihan Umum Untuk Angkatan Darat* (1954).

Saling sikut "palu arit" dan "bulan sabit"

Pemilu 1955 memberi ruang terciptanya rivalitas antara partai. Rivalitas paling mencolok antara PKI dan Masjumi. Manifes Pemilihan Umum PKI yang dimuat di *Harian Rakjat* tanggal 22 Maret 1954, PKI secara tegas menyatakan bahwa memberikan suara pada pemilihan umum nantinya akan menentukan arah kebijakan pemerintah Indonesia, dalam artian apakah Indonesia akan dikuasai oleh kelompok yang membela kaum imperialis, komprador dan tuan tanah yang artinya membiarkan penindasan, penghisapan, korupsi, birokrasi, kekacauan, dan krisis ekonomi. Maksud dari pandangan ini secara langsung ditujukan pada Masjumi-PSI tulis *Harian Rakjat*, 22 Maret 1954 dan *Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi (KOTI) 1963-1967* (254).

Memenangkan PKI dan partai-partai demokratis lainnya dan mengalahkan Masjumi-PSI yang dianggap anti persatuan, anti demokratis, dan anti-komunis adalah tujuan yang diperjuangkan oleh PKI dalam Pemilihan Umum tersebut. "Memilih Masjumi-PSI berarti bahwa gunting uang (gunting Syafruddin) akan kembali lagi, larangan mogok akan kembali lagi, Razzia Agustus dan Kudeta 17 Oktober akan kembali lagi, DI-TII semakin mengganas, harga barang makin meningkat dan harga karet tambah merosot. Memilih Hatta berarti bahwa provokasi Madiun (1948) akan berulang kembali," sindir PKI kepada Masjumi dan PSI dalam *Harian Rakjat*, 22 Maret 1954.

Pada 22 April 1955, Sekretariat CC (Central Comite) PKI membuat instruksi (Nota No. 8/1955) yang ditujukan kepada Comite, Anggota dan Calon Anggota yang isinya berupa seruan untuk menggalang kekuatan blok demokratis guna

FOTO: LIFE/ HOWARD SOCHUREK; PEWARNA: SULTAN

Muhammad Natsir
di kampanye Masyumi

mengalahkan Masjumi dan PSI. "Penggalangan kekuatan blok demokratis dalam pemilihan umum ini dilakukan terutama dengan mengadakan persekutuan-persekutuan dan kerjasama antara PKI dengan partai-partai demokratis lain, terutama partai-partai Nasionalis dan Islam yang demokratis. Persekutuan dan kerjasama itu diharapkan tidak hanya terjadi dalam menghadapi pemilu saja, tapi juga diperlukan sesudah pemilu," tulis CC PKI dalam *Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi (KOTI) 1963-1967* (270).

Menariknya, rivalitas PKI tidak dengan semua partai Islam. Kesepakatan PKI dengan salah satu partai Islam yaitu PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) secara resmi sepakat untuk tidak saling menyerang dalam kampanye pemilu. Kesepakatan kerjasama dengan PSII itu diinstruksikan kepada seluruh *comite,* anggota dan calon anggota melaksanakannya dengan penuh kesungguhan dan kebijaksanaan.

Dalam perkembangan berikutnya, PKI berusaha untuk menjalin komunikasi dengan PNI yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan kerjasama. Tujuan dikehendakinya kerjasama antara dua partai ini supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat merugikan kedua partai. Untuk mewujudkannya, segenap organisasi dan pimpinan PKI untuk menjalin kontak perundingan di berbagai tingkatan. Dengan adanya persekutuan dan kerjasama yang erat antara PKI dan partai-partai nasionalis dan Islam ini diharapkan dapat mengalahkan poros Masjumi dan PSI pada pemilu.

Langkah taktis membentuk poros kerja sama ini menurut Olle Tornquist dalam *Penghancuran PKI* (2017) merupakan metode perjuangan secara damai dan demokratis dalam kerangka strategi jangka panjang yang disusun oleh pemimpin PKI. Guna memperkuat posisinya, partai memerlukan perlindungan dari kekuatan-kekuatan antikomunis yang

menurut PKI terutama dihimpun dalam PSI dan Masjumi.

Mereka juga memiliki dukungan terbesar di AD. PKI dapat memperoleh perlindungan jika partai menawarkan dukungan kritis kepada PNI, dan kemudian juga Sukarno. Kaum nasionalis bermusuhan dengan kaum Islam ortodoks dan teknokrat sosialis.

Sementara itu dari kubu Masjumi, setelah Undang-Undang Pemilu disahkan Masjumi merespon cepat dengan segera mengeluarkan "Fatwa Alim Ulama" tentang Pemilihan Umum. Fatwa ini merupakan keputusan-keputusan penting muktamar alim ulama dan muballigh Islam se-Indonesia yang dilangsungkan tanggal 27 Rajab sampai 1 Sya'ban 1372 H (11-15 April 1953) di Medan.

"Dibuatnya fatwa ini setelah memperhatikan adanya Undang-Undang Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan memperhatikan isi surat Syura ayat 13 yang menyuruh menegakkan agama Islam, surat An-Nisa' ayat 144, surat Al Maidah ayat 51 dan surat Al-Mumtahinah ayat 1 yang maksudnya menentukan batas-batas orang yang boleh diangkat sebagai penguasa, kemudian Surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 yang isinya menyuruh menjalankan Undang-Undang yang sesuai dengan hukum-hukum Allah, surat An-Nisa' ayat 59 yang menyuruh menaati Allah, Rasul, dan Ulil'amri yang beriman, surat Al-Hadj ayat 11 dan surat Ali Imran ayat 110 yang maksudnya menyuruh berbuat kebajikan dan melarang kemungkaran, surat Al-Maidah ayat 35 yang maksudnya menyuruh mencari wasilah kepada Allah, dan Qaidah Usul yang berbunyi; 1e. *Lil-wasail hukmu'Imaqashid, dan 2e. Kullu ma la jatimmu'l wadjibu illa bihifahua wadjibun,*" tulis *Pedoman Perdjuangan Masjumi,* (1955).

DN Aidit di kampanye PKI

FOTO: LIFE/ HOWARD SOCHUREK; PEWARNA: SULTAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, difatwakan kepada kaum muslimin laki-laki perempuan yang telah mukallaf ('akilbaligh), wajib berusaha dan memberikan segala

macam bantuan dan pengorbanan untuk tercapainya kemenangan Islam dalam pemilihan umum. Selain mengeluarkan fatwa wajib bagi umat Islam Indonesia untuk memilih calon-calon yang memperjuangkan ajaran dan hukum Islam, untuk memperkuat kas partai dalam mengarungi jalannya pemilihan umum, Majelis Syuro Pusat Masjumi mengeluarkan putusan mengenai hukum pengeluaran zakat untuk kemenangan perjuangan umat Islam dalam pemilihan umum.

Putusan ini dikeluarkan dalam sidang selama Muktamar VII Masjumi tanggal 27 Robiul Akhir-3 Jumadil Akhir (23-27 Desember 1954) di Surabaya dan ditandatangani wakil Majelis Syuro Pusat, K.H Taufiqurrahman selaku ketua sidang dan H.M.S Suaidy sebagai sekretaris. Dikeluarkannya keputusan ini mengingat bahwa Masjumi berjuang mencapai terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara, dan jalan untuk mencapai maksud itu ialah mencapai kemenangan dalam Pemilihan Umum.

Pada Muktamar VII Masjumi, dijelaskan dalam *Putusan Kongres PPI Masjumi ke-VII* (1955) Majelis Sjura juga mengeluarkan fatwa bahwa komunisme itu "kufur" dan penganutnya dihukum sebagai "kafir" apabila dengan pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran mengikuti komunisme. "Menurut Masjumi, fatwa tersebut bukan semata-mata untuk mencapai kemenangan jangka pendek ketika menghadapi pemilu. Fatwa dikeluarkan sebagai kewajiban mengingatkan umat Islam dari bahaya komunisme," tulis Samsuri dalam *Politik Islam Anti Komunis* (2004).

Remy Medinier dalam *Partai Masyumi, Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral* (2013) menuliskan bahwa usaha melawan massifnya kekuatan PKI yang mulai bangkit pada dekade 1950-an, Masjumi melakukan propaganda anti-komunis untuk memperlihatkan wajah komunis sebenarnya. Sejak awal tahun 1950-an, tanpa kenal lelah para pimpinan partai Islam bahkan mengajak untuk menelaah sampai ke sumber-sumber asli doktrin musuh mereka. Natsir menguraikan kembali ajaran-ajaran Lenin yang bertujuan untuk menyingkirkan musuh-musuh revolusi.

"Jusuf Wibisono dalam pidato di Tanjung Priok pada 1954, mengisahkan pengalamannya, perjalanannya ke Moskow (pusatnya Komunisme) dan menyimpulkan kemustahilan kompromi antara agama dan komunisme (*Abadi*, 30 Maret 1954). Para pemimpin Masjumi menyerukan warganya untuk

mewaspadai usulan-usulan PKI yang ingin mengganti sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan prinsip kebebasan beragama, suatu langkah pertama menuju peresmian 'kebebasan propaganda anti-agama' (*Abadi*, 18 Januari 1955)," tulis Remy Medinier.

Perseturuan PKI dan Masjumi tidak sebatas perang gagasan, selama masa kampanye terjadi bentrok antar massa kedua partai di Kota Malang. Pertemuan antara massa pendukung kedua partai ini terjadi di Alun-alun Malang tanggal 28 April 1954. Suasana rapat akbar PKI yang dilaporkan dihadiri 200.000 orang ini berujung pada kerusuhan.

Versi *Harian Rakjat*, 30 Maret 1954, bahwa Rapat akbar yang dihadiri D.N. Aidit dan Eric Aarons, perwakilan Partai Komunis Australia ini berubah menjadi ricuh ketika rombongan Hasan Aidid (Masjumi Surabaya) mengeluarkan makian kepada D.N. Aidit ketika berpidato dengan mengatakan bahwa Kabinet Ali-Wongso kabinet kafir dan kabinet bohong.

"Suasana menjadi semakin tegang ketika di akhir acara Hasan Aidid dan kawan-kawan berusaha mengepung dan mengancam mereka yang duduk di tribun. Selain tokoh-tokoh PKI, tribun itu juga diduduki Haji Yusuf, Kiai Abdul Aziz, dan Kiai Abdul Munif

Disamping upaya menyebarkan brosur dan selebaran, salah satu faktor yang sangat penting bagi kampanye PNI adalah bantuan Presiden Sukarno. Selama kampanye pemilihan parlemen, Kabinet Burhanuddin Harahap melarang Sukarno berkampanye.

dari Jember juga mendapat makian yang sama. Suasana berubah menjadi kondusif ketika pihak keamanan berusaha meredakan situasi panas tersebut," tulis *Harian Rakjat*.

Sebaliknya, Hasan Aidid melalui surat kabar *Haluan*, 31 Maret 1954 dan 3 April 1954 membantah telah mengeluarkan pernyataan yang dituduhkan tersebut (Mengatakan Kabinet Ali-Wongso kafir dan bohong). Hasan Aidid mengatakan bahwa seluruh pernyataan itu semuanya telah diputarbalikkan dan tidak benar. Justru sebaliknya, menurutnya D.N. Aidit meminta kepadanya untuk menjamin keselamatannya dalam rapat akbar yang dihadiri massa Masjumi yang dipimpin Hasan Aidid, terlebih setelah Aidit mengejek pemimpin-

pemimpin Islam dan Wakil Presiden, Hatta. Berkaitan dengan kedatangannya di rapat akbar itu, Hasan Aidid juga membantah telah mempersiapkan sebelumnya karena kebetulan ketika rapat itu dilakukan ia beserta rombongan baru datang dari Batu.

"Kejadian dalam rapat akbar PKI di Malang itu bermula dari pidato Aidit yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan orang Masjumi, dan orangnya lebih baik dari orang-orang Masjumi," tulis surat kabar *Nasional*, 1 April 1954. Kemudian dikatakan lagi oleh Aidit bahwa apabila memilih Masjumi sama saja menghendaki masuk neraka dunia. Perkataan Aidit tersebut langsung disambut pemuda-pemuda Masjumi yang hadir dengan teriakan *"Bohong, Aidit palsu, Aidit perampok, ingat peristiwa Madiun sambil mengacungkan tinju ke arah podium."* (*Abadi*, 17 Mei 1954).

Kejadian itu disusul perkelahian antar-massa. Beberapa pemimpin Masjumi berusaha menenangkan massanya. Tetapi dijawab oleh massa tersebut bersedia tenang apabila D.N. Aidit mencabut ucapannya. Kemudian D.N. Aidit kembali naik podium dan mengatakan *"Saudara-saudara, jika diantara saudara-saudara ada yang merasa tersinggung dari kata-kata saya, maka saya minta maaf dan perlu saya nyatakan bahwa PKI tidak pernah menghina agama dan tidak anti agama."*. Massa berubah menjadi lebih tenang setelah Aidit mengucapkan permohonan maaf tersebut (*Haluan*, 3 April 1954).

Memanfaatkan pengaruh presiden

Ketika kampanye Pemilu 1955, PNI menyebar brosur dan selebaran. Salah satunya brosur bertema "Sistem ketatanegaraan menurut pendirian PNI/ Front Marhaenis dengan tanda gambarnya dalam Pemilihan Umum", tema lain seperti *Pokok-pokok sistem perekonomian menurut pendirian Front Marhaenis dengan tanda gambar dalam dalam Pemilihan Umum* juga turut disebarkan.

Brosur "Sistem ketatanegaraan menurut pendirian PNI/Front Marhaenis" yang diterbitkan Seksi Pen/Prop PNI (1955) disebarkan hingga tingkat cabang hingga pelosok desa. Inti dari brosur ini selain berfungsi sebagai media kampanye PNI juga bermaksud sebagai media pendidikan politik bagi rakyat Indonesia.

Paparan pada brosur sistem ketatanegaraan ini PNI menyelipkan tawaran konsep "pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat" untuk menarik minat calon pemilih untuk memantapkan diri memilih PNI dalam pemilihan umum. Demokrasi politik yang

dikehendaki PNI yaitu dasar persamaan kekuasaan untuk rakyat, untuk itu front marhaenis selalu menuntut hak memilih dan hak dipilih yang umum dan langsung, karena dasar persamaan kekuasaan bagi seluruh rakyat terletak pada hak memilih dan dipilih.

Disamping upaya menyebarkan brosur dan selebaran, salah satu faktor yang sangat penting bagi kampanye PNI adalah bantuan Presiden Sukarno. Selama kampanye pemilihan parlemen, Kabinet Burhanuddin Harahap melarang Sukarno berkampanye. Namun setelah hasil pemungutan suara pertama mulai masuk, kedudukan kabinet menjadi jauh lebih lemah dan begitu pula genggamannya terhadap presiden.

Selama dua bulan pemilihan Konstituante, Eliseo Rocamora dalam *Nasionalisme Mencari Ideologi, Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965 (1991),* merujuk pada *Suluh Indonesia,* 28 November 1955 dan *Suluh Indonesia,* 29 November 1955 menuliskan bahwa Presiden Sukarno melakukan pidato keliling yang lama dan menarik massa yang luar biasa. Misal selama minggu terakhir kampanye, Sukarno mengucapkan 38 pidato di 20 tempat yang berbeda-beda di Jawa Tengah.

Seorang wartawan Suluh Indonesia yang menyertainya dalam perjalanan ini mengatakan bahwa sekitar 5,8 juta rakyat datang untuk mendengarkan pidatonya. Bahkan, menurut Herbert Feith, banyak juru kampanye lokal PNI yang mengatakan secara terang-terangan bahwa partai mereka adalah partai "Pak Karno" (Presiden Sukarno).

Brosur-brosur kampanye PNI bahkan secara gamblang menulis secara tersurat bahwa Partai Nasional Indonesia yang bertarung dalam Pemilu 1955 merupakan front marhaenis yang sejak tahun 1927 dengan dipimpin oleh Bung Karno menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia melawan penjajah. Artinya bisa ditafsirkan bahwa PNI memanfaatkan popularitas Sukarno untuk meraih suara rakyat dalam pemilihan umum, selain itu bisa ditafsirkan pula bahwa Sukarno sebenarnya juga menghendaki Partai Nasional Indonesia untuk memenangi Pemilu 1955. Ini terlihat dalam kesamaan visi antara Sukarno dan PNI yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara, bukan berdasar salah satu agama maupun berdasar negara komunis.

Selain faktor Sukarno, Boyd R. Compton menganalisa hasil Pemilu 1955 menampakkan PNI sebagai partai orang Jawa yang besar, dengan dukungan kuat di daerah kebudayaan Jawa tradisional di Jawa Tengah dan kawasan-

Presiden Sukarno selaku kepala negara tengah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Kementrian Penerangan Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 15 Desember 1955.

FOTO: ANRI/NASKAH SUMBER ARSIP JEJAK DEMOKRASI PEMILU 1955; PEWARNA: SULTAN

kawasan barat Jawa Timur. Ketika kampanye berlangsung, menjadi jelas bahwa PNI mengandalkan dukungan aktif para pamong.

Kekuatan PNI di jajaran pejabat Indonesia, khususnya dari suku Jawa dapat ditafsirkan dalam dua cara. Pertama, dinyatakan bahwa PNI memanfaatkan kedudukannya di pemerintahan dari tahun 1953 sampai 1955 untuk menggiring para pejabat ke dalam partai, terutama para gubernur, residen, bupati dan camat yang membentuk hierarki eksekutif Indonesia. Kedua, para pejabat ini merupakan alat dalam mencapai kerja sama politik dari ribuan kepala desa di daerah-daerah mereka.

"Rival politik PNI juga menuding bahwa menteri penerangan (Ferdinand Lumban Tobing) yang mempropagandakan pemilu sampai ke desa-desa yang paling terpencil, telah digenggam dan digerakkan oleh PNI. Maka, kritik yang terlontar adalah bahwa PNI meraup dukungan dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruh para pejabat pemerintah yang bergabung ke dalam partai ini karena tekanan. Meskipun demikian, interpretasi ini agak dangkal. PNI telah bermain politik habis-habisan dan mungkin agak melewati batas dalam beberapa tahun terakhir. Partai ini tidak melewatkan setiap peluang untuk memperluas keanggotaan atau pengaruhnya, dan ia memang mungkin berhasil dalam menekan

banyak pejabat agar memegang kartu partai," tulis Boyd R. Compton.

Anggota-anggota paling berharga yang bergabung ke PNI dalam beberapa tahun terakhir menjelang pemilu adalah para pegawai negeri di tingkat kabupaten dan kecamatan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sumber perolehan suara PNI pada pemilu parlemen tanggal 29 September 1955 lebih dari lima puluh persen, mayoritas berasal dari para pejabat tinggi dalam hierarki eksekutif adalah bekas kaum bangsawan Jawa (priyayi), dan sejumlah besar pejabat lebih rendah dari kelas ini.

Para bangsawan ini masih punya tempat penting dan berpengaruh sebagai juru-juru bicara kebudayaan Jawa tradisional. PNI bukan partai para bangsawan, bukan pula partai feodal. Filsafat PNI memang mengandung semangat tradisionalisme Jawa, dan para bangsawan merasa partai ini sebagai tempat pertemuan yang menyenangkan, di mana gaya dan nilai-nilai kelas mereka berkelindan halus dengan konsep-konsep barat modern. Pidato-pidato Sukarno menunjukkan dengan jelas campuran kental gaya aristokratis dan slogan radikal.

"Penggalangan massa dari kelompok pamong praja untuk pemenangan pemilu itu seperti yang dilakukan oleh PNI Jawa Tengah. Para tokoh marhaenis yang duduk dalam dinas pamong praja/pamong desa membentuk Ikatan Pamong Rakyat Indonesia (IPRIN) dalam suatu konferensi di Purworejo, Jawa Tengah tanggal 28 Juni 1955. Didirikannya IPRIN ini bertujuan untuk menghimpun semua anggota pamong praja/pamong desa yang menghendaki terbentuknya masyarakat marhaenis serta membela nasib para anggotanya," tulis Boerhan, dkk dalam *Dua Windu DPD PNI Djawa Tengah* (1969).

Penghimpunan pamong praja beberapa bulan menjelang pemungutan suara ini dapat diartikan sebagai bentuk konsolidasi anggota PNI yang berada dalam struktur pemerintahan desa untuk merapatkan barisan dalam menyambut pemilu.

"Meskipun tidak ada tolok ukur mengenai kekuatan partai di lingkungan birokrasi Indonesia pada saat itu, umumnya telah disepakati bahwa PNI lebih berhasil dibandingkan dengan partai-partai lain. Alasannya, bukan semata-mata karena pada paro pertama 1950-an kekuasaan PNI di kabinet sama kuatnya dengan Masjumi. Misalnya, PNI menguasai Kementerian Dalam Negeri hanya dalam satu tahun pada pemerintahan Kabinet Sukiman, dan April 1951 sampai April 1952.

Juga bukan karena pengaruh PNI di kalangan korps pegawai tinggi sebelum perang, yaitu pamong praja. Golongan kecil di antara pamong praja yang menjadi anggota partai politik kebanyakan masuk PIR dan Parindra," tulis Eliseo Rocamora.

Pengerahan kader PNI di struktural pemerintahan untuk pemenangan pemilu menurut Nalenan dalam *Arnold Mononutu, Potret Seorang Patriot* (1981) dibarengi dengan pendelegasian kader-kader terbaik partai, termasuk yang telah memiliki jabatan. Seperti pendelegasian Arnold Mononutu untuk terjun sebagai calon anggota DPR, padahal sebelumnya ia telah memiliki jabatan duta besar. Berhubung partai mendelegasikan dirinya untuk terjun dalam pemilihan umum, ia merelakan jabatan duta besarnya itu. DPP PNI mendelegasikannya untuk bertarung untuk Pemilu DPR daerah pemilihan Maluku. Meskipun begitu, Arnold Mononutu gagal menjadi anggota DPR karena perolehan suaranya tidak mencukupi, ia baru berhasil pada pemilihan berikutnya dan berhasil menjadi anggota Konstituante.

Disamping faktor-faktor di atas, kemenangan PNI di Pemilu 1955 juga tidak lepas dari keberhasilan PNI dalam mengkonsolidasikan kekuatan Front Marhaenis dan mengkampanyekan "PNI adalah Partai Politik bagi Seluruh Rakyat", "Persamaan Kekuasaan Bagi Seluruh Rakyat", Persamaan Kemakmuran Bagi Seluruh Rakyat". Barisan Marhaen atau Front Marhaenis terdiri dari organisasi-organisasi seazas dan sehaluan dengan PNI, antara lain Pemuda Demokrat Indonesia, Wanita Demokrat Indonesia, Persatuan Tani Nasional Indonesia (Petani), dan Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI). Organisasi-organisasi ini telah sepakat menjadikan PNI sebagai pelopornya. Hal ini seperti tertuang dalam *Manifes Pemilihan Umum* (1954) yang diterbitkan PNI Tjabang Kota Besar Surabaja. **S**

Mutiara Kata

"Jangan biarkan politik memisahkan kita, biarkan pemilu mempersatukan kita." **—John F. Kennedy**

Usai Pemilu, Sepeda dan Pelana Kuda Dilego

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari setiap penyelenggaraan "pesta demokrasi", termasuk peristiwa yang penting, menarik ataupun lucu. Sekadar untuk berkaca sambil menyaksikan pemilu keenam yang jatuh pada tanggal 9 Juni 1992, di bawah ini disodorkan pengalaman pertama kali Indonesia menyelenggarakan pemilu plus kerepotan-kerepotan yang menyertainya.

Edisi Juni 1992

FOTO: HENDI JO

Persis di usia 10 tahun, republik ini menyelenggarakan "pesta demokrasi" yang pertama, tepatnya pada tanggal 29 September 1955. Pemungutan suara ini diadakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.

Bak perhelatan akbar, negeri yang masih muda ini mau tak mau harus menanggung segudang kerepotan. Kalau dinamakan pesta, ini jelas bukan sekadar "Semar Mantu". Yang repot seluruh negara seluas sekitar 1.904.357,7 km^2.

Saat pencoblosan tanda gambar pemilu 1955 di Nusa Tenggara

Itu sebabnya, serangkaian persiapan dilakukan setahun sebelumnya. Sejak Februari 1954 telah dibentuk panitia *Ad Hoc* yang beranggotakan Mendagri, Menkeh plus Menkeu. Karena berbagai kepentingan dan meluasnya permasalahan yang dihadapi, 4 Agustus 1954 Perdana Menteri dan kedua wakilnya diikutsertakan untuk bertanggung jawab atas perencanaan serta pelaksanaan pemilu. Bahkan 22 Agustus 1955, menjelang hari H, keanggotaan panitia pemilihan umum yang diketuai R. Hadikusumo diperluas dengan masuknya Menpan dan Menhub ke dalamnya.

Bagaimana tidak repot? Dalam hiruk pikuk "pesta demokrasi" ini

Suka duka pengalaman penyelenggaraan pemilu pertama ini tak hanya dialami panitia pusat. Daerah-daerah pelosok pun diwarnai kerepotan yang tak kalah menariknya. Di beberapa daerah yang agak sukar dicapai dengan kendaraan bermotor, bermacam persiapan pemungutan terlambat dan tidak kunjung usai.

kurang lebih 172 partai terlibat. Dari data jumlah penduduk sebesar 77.987.879 jiwa, yang punya hak pilih hanya 43.104.464 orang. Untuk menangani pelaksanaan pemilu, 807.996 orang petugas lapangan dikerahkan di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh penjuru Nusantara, baik untuk memilih anggota DPR maupun Konstituante.

Tak lupa, pelana kuda

Daftar kerepotan akan terlihat semakin panjang kalau kita sempat melongok sekelumit kegiatan yang dilakukan panitia pemilihan umum dari mulai persiapan, pelaksanaan
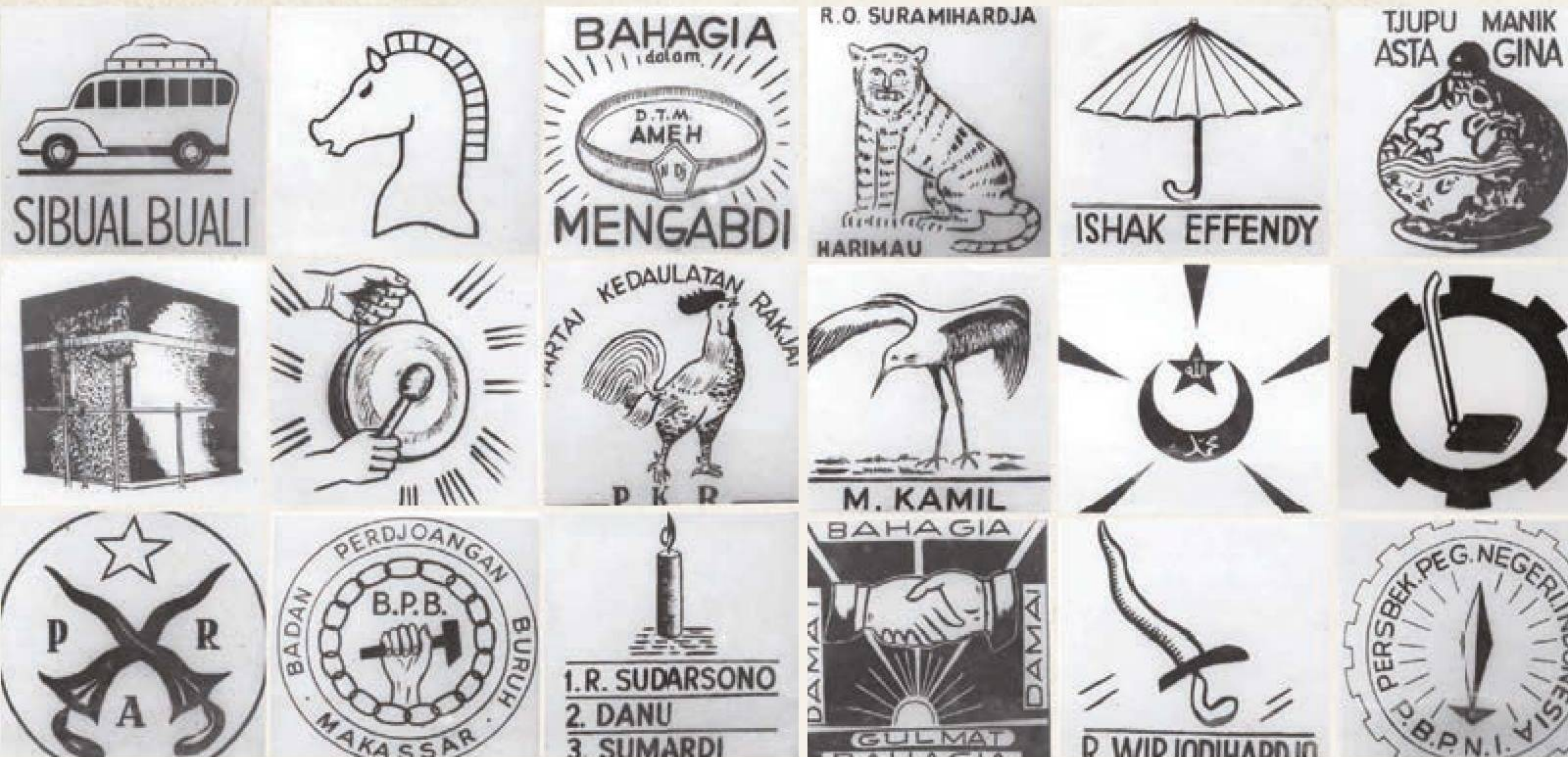
Beberapa tanda gambar kontestan Pemilu 1955, baik itu partai politik, organisasi masa, maupun perorangan.

FOTO: ANRI/NASKAH SUMBER ARSIP JEJAK DEMOKRASI PEMILU 1955

sampai dengan pembersihan. Sebagai gambaran sepintas, untuk belanja peralatan panitia harus menyediakan 6.895 mesin ketik, 199.825 kotak suara, dan 3.197.397 ton kertas HVS. Untuk melengkapi sarana akomodasi para petugas di lapangan panitia membeli 220 kendaraan pick up merk Dargo dan De Soto plus persediaan 1.040 ban mobil, 4.978 sepeda dan 315 pelana kuda. Peralatan "aneh" yang disebut belakangan ini diperlukan para petugas pendaftar pemilih di daerah NTT untuk memakai kuda sebagai pengganti sepeda.

Untuk mencetak tanda gambar pada kontestan pemilu, panitia meminta jasa 29 percetakan, termasuk Percetakan Negara.

Suka duka pengalaman penyelenggaraan pemilu pertama ini tak hanya dialami panitia pusat. Daerah-daerah pelosok pun diwarnai kerepotan yang tak kalah menariknya. Di beberapa daerah yang agak sukar dicapai dengan kendaraan bermotor, bermacam persiapan pemungutan terlambat dan tidak kunjung usai.

Karena terlambatnya pengiriman uang atau pengangkatan anggota Penyelenggara Pemungutan Suara, pelatihan petugas pun terlambat. Akibatnya, banyak terjadi kekeliruan dan kesalahan pada pemungutan suara dan perhitungan suara.

Misalnya di Surabaya (35.000 pemilih dalam satu PPS). Anggota PPS diangkat 10 September, lantas dilatih tergesa-gesa.

Karena datangnya alat-alat tulis dan mesin ketik dari pusat terlambat, terlambat pula pembuatan kutipan daftar pemilih sehingga menimbulkan kesulitan. Berhubung surat-surat suara baru datang akhir Agustus, 40 orang pegawai PPS Surabaya terpaksa bekerja-siang malam selama 20 hari. Mungkin pula karena ini, seorang di antaranya meninggal mendadak tanggal 8 September.

Kalau pada pemilu sekarang, ketepatan waktu pencoblosan sangat penting dalam mengesahkan suara, tidak demikian pada pemilu 1955 ini. Kelambatan dalam berbagai hal memaksa beberapa bagian daerah tak bisa serentak melaksanakan pemungutan suara pada 20 September 1955. Misalnya, Kabupaten Bengkalis dengan 448 PPS-nya baru melaksanakan pemungutan suara 16 September 1955. Kabupaten Karo (Sumatera Utara) terlambat karena keliru menerima surat-surat suara yang mestinya untuk Sumatera Tengah. PPS Kota Beru Kalimantan Selatan, karena ombak besar dan letaknya jauh, baru bisa melaksanakan pemungutan suara 6 - 31 Oktober. Begitu pula daerah Aceh Tengah baru 3 November,, Aceh besar 25 Oktober.

Pers Barat kecele

Surat kabar *Indonesia Raya* terbitan Jakarta, 30 September 1955, menulis di antaranya: "Sukarlah kiranya menghindarkan rasa terharu ketika kita melihat dari segala lapisan sama-sama berbaris menyampaikan suara mereka ke kotak suara. Sayanglah kejadian bersejarah ini tidak dapat terjadi serentak di seluruh tanah air. Juga amat disayangkan, banyak orang tidak bisa ikut memberikan suaranya karena persiapan-persiapan pemilu yang tidak sempurna. Hendaknya segera diadakan penyelidikan penyelidikan yang tertib mengenai sebab-sebab kartu pemilih hilang, hingga orang yang telah terdaftar jadi tidak ikut memilih dan macam-macam kelalaian lain yang menyebabkan banyak pemilik kehilangan hak pilihnya."

Bagi rakyat kita hari pemilihan umum ini adalah kesempatan mereka yang pertama merasakan hak dan kekuasaannya. Hari itu adalah hari pernyataan, bahwa rakyatlah yang berdaulat di negeri ini. Walaupun mungkin perasaan dan kesadaran ini belum meluas benar.

Sementara itu di Kantor Berita Antara menyiarkan, para peninjau Eropa mengira akan terjadi kegaduhan hebat di Indonesia selama pemilu. Bagaimana kelirunya gambaran dan ramalan-ramalan pers di Eropa umumnya, Belanda khususnya, dilaporkan oleh wartawan Antara di

Sebagian dari pers Eropa Barat, yang dalam hal pemberitaan tentang Indonesia menerima bahan dari para wartawan di Belanda, juga menimbulkan kesan kuat bahwa mereka yakin pemilu Indonesia itu akan kacau dengan penuh keributan.

Amsterdam:

"Soal-soal sekitar adanya kegelisahan dan ketidaknyamanan di Indonesia merupakan bahan-bahan komentar yang tidak kering-kering bagi sebagian besar pers Belanda. Pada hari menjelang dilakukannya pemilu pertama di Indonesia, hampir semua surat di Netherland sepenuhnya sepaham bahwa pemilihan umum pertama di Indonesia itu tidak akan dapat berlangsung tiada dengan pertentangan-pertentangan hebat."

Sebagian dari pers Eropa Barat, yang dalam hal pemberitaan tentang Indonesia menerima bahan dari para wartawan di Belanda, juga menimbulkan kesan kuat bahwa mereka yakin pemilu Indonesia itu akan kacau dengan penuh keributan.

Tapi lambat laun mereka mengetahui, dan menarik kesimpulan, bahwa ramalan-ramalan itu tidak benar. *The Observer* melaporkan, "Para peninjau salah pandangannya." Pemungutan suara di Indonesia ternyata berlangsung dalam suasana aman dan semangat yang baik. Menurut laporan wartawan John Stirling, yang spesial dikirim ke Indonesia untuk mengikuti jalannya pemilu pertama, dikatakan sebagai berikut:

"Apakah (parlemen Indonesia nanti) akan dipimpin oleh golongan Islam dan Sosialis ataukah oleh kaum Nasionalis dan Komunis, yang terang ialah, bahwa golongan-golongan yang memimpin itu telah mendapat mandat dari rakyat Indonesia, mandat yang telah diberikan dengan bebas dan kemauan tegas pada tempat-tempat pemungutan suara." **The Observer* juga menambahkan; "ini adalah suatu kemajuan besar bagi Indonesia dan Asia Tenggara."

Harga seorang anggota DPR Rp600.000,-

Setelah pelaksanaan pemilu selesai, orang tentu akan bertanya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk tiap-tiap anggota itu. Berapa "berat" seorang anggota DPR/ Konstituante?

Untuk menjawab pertanyaan itu, ditelitilah berapa ongkos pemilihan

TPS untuk anggota APRI di Balai Prajurit Nusantara, Jakarta 15 Oktober 1955

FOTO: ANRI/NASKAH SUMBER ARSIP JEJAK DEMOKRASI PEMILU 1955

seluruhnya untuk kemudian dibagi dengan jumlah anggota yang telah terpilih. Berhubung belanja untuk pemilihan kembar ini disatukan, maka dalam perhitungan ini jumlah anggota pilihan untuk DPR dan Konstituante disatukan pula.

Neraca pengeluaran terakhir dari Panitia Pemilihan Indonesia September 1957 menunjukkan angka Rp 492.535.488,37, sedangkan jumlah anggota DPR/ Konstituante yang telah dipilih adalah 257 + 514 = 771 anggota. Jadi harga atau "berat* seorang anggota DPR/Konstituante ialah = Rp 638.826,83.

Namun perlu diterangkan lebih jauh, ini baru yang dikeluarkan oleh PPI, belum dihitung pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Kementerian Penerangan,Dewan Keamanan Nasional, partai-partai yang terlibat dan organisasi lainnya. Kesimpulannya, demokrasi memang mahal.

Mahalnya demokrasi itu tidak hanya dibayar dengan uang. Seluruh kawasan Indonesia dilaporkan sebanyak 107 petugas pemilu, meninggal sewaktu menjalankan tugas. Ada yang meninggal karena dibunuh gerombolan pengacau, dianiaya maupun diculik. Untuk itu disediakan anggaran uang duka masing-masing ahli waris menerima santunan Rp 5.000,-.

Berakhirnya pemilu pertama dengan sukses memang tak terlepas dari partisipasi segenap petugas dan kerjasama rakyat bangsa ini. Menurut laporan terakhir panitia

pemilihan umum pertama, setelah mengadakan perhitungan akhir atas semua pembiayaan pemilu, didapati sisa anggaran sebanyak Rp 12.567.010,-. Kelebihan uang ini antara lain didapatkan dari hasil penjualan bekas surat-surat suara, bekas TPS, kotak suara serta peralatan-peralatan yang tak digunakan lagi. Dari sisa uang tersebut Rp 5 juta disisihkan untuk pembangunan gedung Panitia Pemilihan Indonesia yang letaknya di Jl. Matraman Raya 40 Jakarta.

Surat kaleng

Kerepotan versi lain bisa juga dilihat ketika Indonesia mengadakan pemilu 2 Mei 1977. Keharusan untuk menyelenggarakan pemilu di luar negeri seperti termaktub di dalam ketetapan MPR maupun undang-undang, membuat "pesta demokrasi" kali ini memiliki dimensi yang lebih bervariasi.

Salah satu tindakan pertama yang harus diambil Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah meminta izin kepada negara-negara di mana pemilu RI akan diadakan. Ini mesti, karena sebagai warga dunia kita mesti mengikuti Konvensi Wina 1963. Hampir semua negara memberikan persetujuan resmi. Swiss yang menganut prinsip netralitas kurang sreg dengan kegiatan politik negara tertentu di kawasannya. Jerman Barat pun waktu itu agak segan memberikan izin. Akhirnya mereka tidak keberatan, asalkan kegiatan pemilu tidak diadakan secara mencolok.

Karena faktor kepraktisan, pada umumnya pendaftaran calon pemilih dilakukan per pos. Hanya saja melacak tempat tinggal warga WNI di luar negeri bukan pekerjaan gampang. Banyak WNI yang tidak melapor bila mereka pindah alamat, terutama mahasiswa. Tak heran cukup banyak formulir yang dikirim balik ke panitia.

Karena kesulitan-kesulitan lain yang khas, masa pendaftaran yang mesti ditutup pada tanggal 19 Juli 1976, diperpanjang sampai 15 September 1976. Ada 42.971 calon pemilih yang disahkan. Ini cuma 60% dari seluruh jumlah warga yang berhak memilih. Gejala yang menarik ini, setelah ditelusuri ternyata bersumber dari pelbagai sebab.

Ada yang diperkirakan terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak mengacuhkan masalah pemilu lagi, seperti banyak WNI di Singapura dan Hongkong. Ada yang sedang dalam proses mendapatkan kewarganegaraan baru, sehingga kalau ikut pemilu Indonesia mereka khawatir proses menjadi warga negara lain itu terhambat. Ini banyak terjadi di Malaysia, Suriname dan Belanda. Ada yang tidak cuma ogah ikut,

tapi menentang pemilu kita karena perbedaan pandangan politik. Ini banyak terjadi di beberapa negara Eropa Barat. Di Jerman Barat sampai terbit surat kabar stensilan yang mengkritik pemilu Indonesia. Sedangkan di Swedia, walaupun tak banyak warga Indonesia di sana, ada warga WNI yang sampai menulis surat kaleng kepada rekan-rekannya agar tidak mencoblos. Yang bersikap paling kritis adalah warga kita di Negeri Belanda, Jerman Barat dan Belgia. Maklumlah banyak orang di antara mereka yang mahasiswa. Mau tak mau mereka mendapat pengaruh juga dari cara berpikir yang lebih ke arah liberal.

Karena kondisi kependudukan WNI di masing-masing negara, persoalan yang muncul juga bersifat khas. Misalnya di Filipina. Waktu itu hanya 20% WNI yang tinggal di Mindanao atau Sulu yang berstatus pendatang legal. Untunglah tanggapan pemerintah Filipina terhadap pemilu kita sangat positif.

Di PPS Kota Kinabalu tercatat 15.335 orang calon pemilih. Untuk memperoleh angka ini, petugas pendaftaran harus mendatangi pusat-pusat perkebunan karena banyak WNI yang bekerja di sana. Pendaftaran yang juga dilakukan lewat pos ini sangat sulit, karena tenaga pendaftar kurang, daerah yang harus didatangi sangat luas, tempat tinggal menyebar, pendidikan WNI amat rendah, banyak yang masih buta huruf dan perhubungan masih sulit. PPS ini mencakup Sabah dan Sarawak. Padahal di Konjen Kinabalu ada terdaftar ± 40.000 WNI yang legal bekerja di sana.

Perlu sukarelawan

Di Jeddah dan Yaman Selatan, sulit diperoleh daftar WNI yang pasti. Kesulitan pos dan jauhnya jarak antar kota di mana para WNI berada semakin mempersulit pendaftaran. Untung da sukarelawan-sukarelawan yang mau menjadi penghubung. Kesulitan muncul di Medina, karena paspor para mahasiswa ditahan oleh kepala sekolah atau imigrasi untuk ditukar dengan izin tinggal. Padahal syarat calon pemilih adalah paspor. Tapi masalah ini bisa terselesaikan juga.

Suriname kasusnya agak lain. Kalau di negara-negara lain, persiapan pemilu diusahakan tidak mencolok, di negara kecil ini pemilu untuk WNI mendapat publikasi serius: diumumkan secara terus-menerus di radio. Seperti di Jeddah dan Yaman Selatan, di sini juga ada penghubung-penghubung sukarela. Uniknya, yang menjadi penghubung malah keturunan Indonesia yang sudah menjadi warga negara Suriname.

WNI yang berada di Suriname,

pada umumnya berasal dari Jawa Tengah. Walaupun mereka berada di sana sejak berusia sekitar 18 tahun, bahasa maupun kebudayaan mereka tetap bertahan. Di negeri ini, pendaftaran lewat pos ditiadakan karena pelayanan pos masih jelek. Masalah lain, banyak dari paspor mereka yang sudah kadaluarsa, banyak yang pindah alamat tanpa memberitahu dan ada yang masih buta huruf.

Berbeda dengan WNI di Negeri Belanda. Banyak dari mereka sudah tidak mengerti bahasa Indonesia lagi, sampai harus dibantu ketika mengisi formulir. Ditambah dengan faktor pengaruh gerakan RMS, dari 15.000 orang yang sebenarnya mempunyai hak pilih yang mendaftar hanya 2.753 orang.

Anggaran untuk PPLN jelas cukup besar: Rp 230 juta (kurs dolar AS terhadap rupiah waktu itu kira-kira seperlima kurs sekarang). Ternyata biaya riilnya Rp 200 juta lebih.

Dari 56 perwakilan RI di seluruh dunia, hanya di Seoul dan Ankara perbandingan antara jumlah pencoblos dan pemilik yang disahkan mencapai angka 100%. Tidak berarti semuanya kurang dari itu. Baghdad misalnya, malah mencapai hampir 103% (berarti ada pencoblos tambahan). Entah kenapa, persentase terendah justru Lagos (cuma 52,45%), yang jumlah WNI-nya tak seberapa. Kota-kota di Eropa Barat, di mana terdapat WNI yang kritis terhadap pemerintah Indonesia, angka persentasenya berkisar antara 70% - 80%. Den Haag malam mencapai 86.45%.

Setelah "pesta" berakhir panitia pusat bukannya tidak berterima kasih. Ada empat perwakilan: Kota Kinabalu, Hongkong, Davao dan London yang diberi piala penghargaan. Mereka dianggap sukses baik secara organisasi maupun keterampilan, dalam mengatasi tantangan fisik dan politik di tempat mereka bertugas. Penghargaan begini mungkin amat tepat, karena tidak seperti petugas-petugas PPS di dalam negeri, para petugas PPS dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di luar negeri waktu itu tidak dibayar. **S (Sumber: Lembaga Pemilihan Umum RI/Lily/Djs)**

Mutiara Kata

"Demokrasi memerlukan partisipasi aktif, termasuk di dalamnya adalah hak memilih." **—Paul Wellstone**

FOTO: WIKIMEDIA/*DARI PEMBERONTAKAN KE INTEGRASI: SUMATERA BARAT DAN POLITIK INDONESIA, 1926-1998*; PEWARNA: SULTAN

Muhammad Iqbal
Sejarawan IAIN Palangka Raya

Pemerintah Orde Baru berusaha meraih suara "Islam politik" melalui pembentukan organisasi Islam resmi dan penggunaan organisasi yang sudah ada seperti GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam), kelompok yang dibentuk titimangsa 2 Maret 1950 di Sukabumi, Jawa Barat. Partai Golongan Karya sendiri lebih menaruh perhatian kepada agama Islam. Ia tampak mengambil alih peranan yang sejak dulu merupakan bidang para ulama.

Kiprah Ulama dalam Golkar dalam Pemilu 1971

GUPPI didirikan oleh sekelompok ulama tradisional yang merasa terpanggil untuk mempertahankan kelangsungan hidup pondok-pondok pesantren yang sedang mengalami banyak tantangan. Pendidikan Islam semakin terdesak karena kian meluasnya pendidikan umum modern *ala* Barat (sekuler) di Indonesia.

Kemunculannya menimbulkan rasa kurang nyaman pada Nahdlatul Ulama, yang tersudut dalam persaingan karena peningkatan program-program sosial, pendidikan, dan melampaui usaha-usaha pemerintah di bidang dakwah.

Sebenarnya, GUPPI, yang menyatakan mendukung Golkar tahun 1971, sebagian besar terdiri dari para pegawai Departemen Agama yang tidak mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat, sedangkan para juru dakwahnya kerap kali merupakan anggota partai Islam baru, Parmusi (Partai Muslimin Indonesia).

Berbeda lagi nasib Masyumi. Pada 5 Juli 1968, melalui Keputusan Presiden, dibentuk penerusnya, Parmusi. Menghadapi campur tangan pemerintah yang mencolok, Muhammadiyah, golongan modernis terbesar dalam Masyumi memilih menjauhi politik.

Memang hubungan NU dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada awal Orde Baru sedemikian dekat sehingga pejabat militer daerah (Laksusda) sering meminta persetujuan NU, sebelum memberi izin pembukaan kembali kantor-kantor lokal Partai Nasional Indonesia (PNI).

Bila ABRI merayu Islam

Menurut R. William Liddle dalam *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuatan Politik* (1992), sejak awal Orde Baru, partisipasi kaum Islam tradisionalis sangat penting, bukan hanya di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, melainkan juga di bidang administrasi. NU berusaha menempatkan para aktivisnya dalam jabatan wali kota, kepala kantor wilayah (Kakanwil), dan lain-lain. NU percaya pemerintah tidak akan bisa membentuk lembaga-lembaga anyar di daerah tanpa bekerja sama dengan NU.

Memang hubungan NU dengan Angkatan Bersenjata Republik

Pawai Kampanye Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam Pemilu 1971 di daerah Kemayoran Gempol, Jakarta, 28 Mei 1971

FOTO: *PERANAN ULAMA DALAM GOLKAR 1971-1980: DARI PEMILU SAMPAI MALARI*

Indonesia pada awal Orde Baru sedemikian dekat sehingga pejabat militer daerah (Laksusda) sering meminta persetujuan NU, sebelum memberi izin pembukaan kembali kantor-kantor lokal Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kemesraan yang mulai sedikit terganggu oleh protes-protes terhadap kemajuan partai baru, Golkar, mengalami guncangan yang lumayan terasa pada pemilihan umum yang akhirnya dilangsungkan tahun 1971. Hal ihwal ini merupakan kesempatan bagi partai Islam tradisionalis untuk mengukur kekuatannya dibandingkan sekutunya. Meskipun sikap ABRI terhadap partai-partai politik tetap tidak begitu jelas, namun ambiguitas itu menjadi sirna pada saat kampanye Pemilu, ketika ia secara terang-terangan mendukung Golkar.

David Reeve dalam bukunya, *Golkar of Indonesia: an Alternative to the Party Systems* (1985) mengisahkan, bahwa pada masa Orde Baru, GUPPI berkesempatan untuk berkembang lebih dinamis. Titimangsa 28 Januari 1971, bertepatan dengan Musyawarah Nasional (Munas) GUPPI di Jakarta, ia secara resmi bergabung ke dalam Golkar.

GUPPI kemudian berkembang pesat dan menjadi organisasi massa Islam yang cukup disegani. Basis massa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam ini bertumpang

Kampanye Nahdatul Ulama (NU) dalam Pemilu 1971. K.H.A. Sjaichu menyampaikan pidatonya di depan massa di lapangan daerah Tebet, Jakarta, 28 Mei 1971.

FOTO: *PERANAN ULAMA DALAM GOLKAR 1971-1980: DARI PEMILU SAMPAI MALARI*

tindih dengan basis NU. Akan tetapi meskipun basis massanya sama, ia tetap mengambil posisi non-afiliatif terhadap NU.

Dari daftar yang dikeluarkan GUPPI sampai tanggal 28 Januari 1971 tercatat kurang lebih 3.000 guru pondok pesantren resmi masuk GUPPI. Beberapa tokoh NU seperti KH. Tubagus mengeluh bahwa namanya muncul dalam daftar komite ekskutif GUPPI tanpa persetujuan mereka. Cara-cara semacam itu dilakukan Golkar untuk menarik massa muslim sebanyak-banyaknya.

Awal penggabungan GUPPI ke Golkar, lebih dari 800 kiai diundang untuk menghadiri Munas yang menunjuk Soedjono Hoemardani, yang *notabene* "abangan", sebagai pelindung. Seperti perihalnya sebagian besar perwira ABRI, Soedjono Hoemardani memiliki pandangan-pandangan yang sekuler dan tidak dipercayai oleh pemimpin-pemimpin muslim.

Hanya berselang satu bulan setelah Munas-nya yang perdana di Jakarta, GUPPI telah sibuk dengan serangkaian kegiatan besar-besaran untuk mendukung program memenangkan Golkar dalam pemilihan umum perdana dalam masa Orde Baru.

Seperti dirilis dalam surat kabar *Harian KAMI*, edisi 8 dan 9 Agustus 1973, adalah K.H. Hasbullah Bakri yang secara terbuka pernah melontarkan klaim bahwa dukungan massa Islam kepada Golkar pada pemilu 1971 ialah

hasil dari perjuangan kampanye ulama. Bahkan bisa dikatakan Golkar akan silang selimpat sekali memenangkan suara Islam tanpa GUPPI.

Lantas, bagaimana GUPPI melakukan pendekatan kepada massa Islam?

Heru Cahyono dalam *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: dari Pemilu sampai Malari* (1992), meneroka bahwa GUPPI menggunakan isu-isu modernisasi pesantren sebagai tema sentral. Perjuangan dan kampanye ormas ini menjelang pemilu 1971 harus dikaitkan relevansinya dengan gagasan tentang suatu harapan di masa depan.

GUPPI menjanjikan akan melakukan perbaikan pendidikan Islam. rakyat langsung diintroduksikan cara mengatasi kesulitan dana pembangunan pesantren, yakni dengan masuk GUPPI. Pondok-pondok pesantren diyakinkan akan mendapat jalur untuk memperoleh dana segar.

Alkisah, Kiai Hasbullah Bakri, seorang "orator ulung" dalam kampanye Golkar yang sukses menggarap wilayah-wilayah yang termasuk paling religius (seperti Padang, Pariaman, Agam, dan lima puluh kota di Sumatra). "Apa sebabnya umat muslim perlu menyokong Golkar?" ujarnya.

Menurutnya ada lima argumentasi logis, yaitu: *Pertama,* Golkar melakukan pembangunan yang nyata dan bermanfaat. Dan apa yang dinamakan pembangunan oleh Golkar itu, di dalam terminologi Islam dapat disebut "amal saleh".

Kedua, Golkar ingin menghilangkan bekas-bekas dan hasil-hasil negatif dari aktivitas partai politik (parpol) dalam membina pemerintah RI selama ini, dalam perihal ini ialah perjuangan ideologi politik.

Ketiga, Golkar mempunyai rencana pembangunan yang menuju masyarakat adil dan makmur, yang telah dibuktikan pelaksanaannya tidak sekadar omong kosong.

Keempat, Golkar jelas mempunyai rencana yang baik terhadap pembangunan Islam di Indonesia. Jadi, para ulama dan Golkar memiliki rencana khusus guna perbaikan pendidikan Islam.

Dan *kelima,* tidak ada satu pun alasan yang menghalangi umat muslim Indonesia untuk menyokong Golkar.

Munculnya persaingan

Para ulama GUPPI, sambil membawa slogan ideologis–amat berperan di dalam upaya menarik massa Islam sebanyak-banyaknya, karena slogan non-ideologis Golkar kurang dipercayai (tidak begitu menarik) bagi umat muslim–biasanya langsung

mempertanyakan kemampuan NU di dalam mengatasi tuntutan perbaikan pendidikan Islam.

Mereka mempertanyakan kepada kiai-kiai itu tentang gedung yang bobrok, rusak, sarana dan prasarana pendidikan yang minim, dan semacamnya.

Pemberian insentif-insentif material rupanya begitu efektif di dalam upaya menarik dukungan pesantren sebanyak-banyaknya. Berbagai insentif material cukup ampuh untuk meluluh hati kiai-kiai yang paling berpengaruh sekalipun.

Contoh paling terkemuka mengenai hal ihwal itu ialah keberhasilan GUPPI memengaruhi K.H. Tarmudzi, seorang ulama asal Jawa Timur yang mengelola lebih dari seratus pondok pesantren. Pada mulanya, Tarmudzi bersikeras menolak tawaran masuk Golkar.

Namun setelah tokoh GUPPI mengisyaratkan adanya insentif material yang tidak kecil jumlahnya untuk dana perbaikan pendidikan di pesantren-pesantrennya, Tarmudzi bersedia melepaskan keraguannya terhadap Golkar.

Begitu pula halnya dengan K.H. Ali Maksum. Dia begitu terharu dengan bantuan yang amat besar dari pemerintah Orde Baru. Menurut Robert Edward Elson dalam *Suharto: a Political Biography* (2001), bahkan Presiden Suharto sendiri berkesempatan mengunjungi Pesantren Krapyak, Yogyakarta yang kala itu memiliki sekira 800 orang santri. Ali Maksum amat terharu. Terang bahwa dengan Golkar atau tidak, soal perbaikan pesantren memang menjadi pikiran sejumlah ulama.

Seperti dikatakan Ali Maksum kepada majalah *Tempo*, edisi 7 April 1971, setelah menerima kunjungan Suharto bahwa dia tidak ingin pembicaraannya dengan presiden dikaitkan dengan politik, "Politik bukan bidang saya, yang saya pikirkan adalah bagaimana memodernisasikan kurikulum dan memperbaiki pondok pesantren."

K.H. Musta'in Romly, seorang kiai yang memperoleh bantuan sebesar lima puluh juta ditambah kredit khusus dari pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pesantrennya yang berlokasi di Jawa Timur, kemudian bahkan menganjurkan persatuan antara ulama dengan *umara* (pemerintah).

Musta'in Romly begitu gembira dengan bantuan yang amat besar, meskipun disadarinya makna politis dari dana-dana bantuan dan kunjungan presiden itu. Sementara itu, ada pula tokoh pesantren yang datang menawarkan diri kepada GUPPI dengan sejumlah harga yang dia minta, berikut berapa besar massa yang berhasil dia bawa.

Sepak terjang ulama GUPPI sudah tentu amat menggusarkan dan menimbulkan keguncangan-
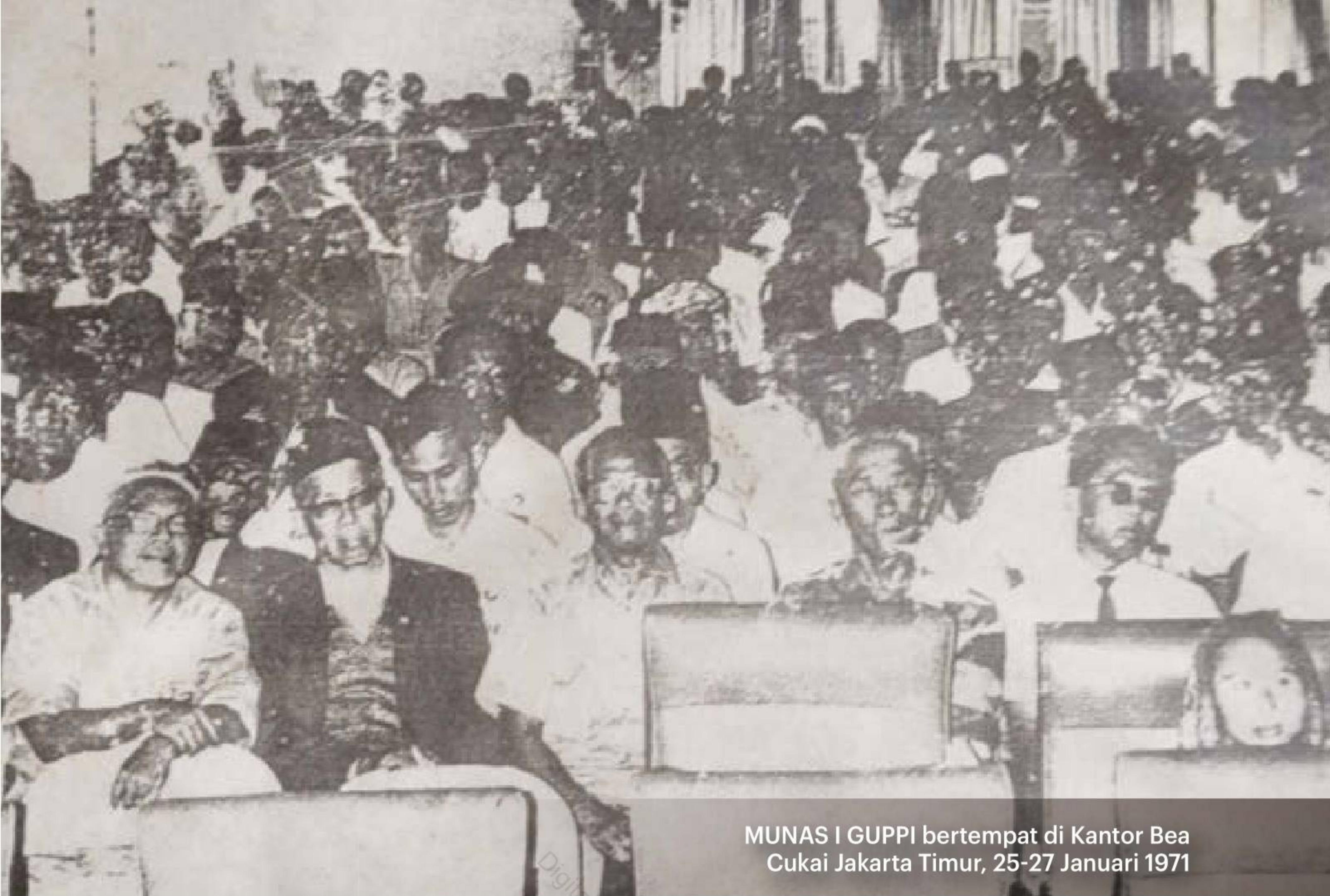
MUNAS I GUPPI bertempat di Kantor Bea Cukai Jakarta Timur, 25-27 Januari 1971

FOTO: *PERANAN ULAMA DALAM GOLKAR 1971-1980: DARI PEMILU SAMPAI MALARI*

keguncangan dalam tubuh partai NU. Kegusaran-kegusaran para politikus partai NU mulai dilontarkan sekira awal April 1971, menyusul praktik-praktik intimidasi, tekanan, bahkan kekerasan yang memberi warna suasana menjelang pemilu.

Ketua Pengurus Pusat Muslimat NU, Wahid Hasyim, sampai memperingatkan pemerintah, bahwa kesabaran rakyat ada batasnya, kendati dia menyerukan pula kepada warga NU agar bersabar. Menghadapi situasi penuh intimidasi itu, jauh sebelum masa kampanye dimulai, kalangan parpol tergerak untuk bereaksi.

Menurut Ahmad Baso dalam bukunya, *Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama* (2021), titimangsa 18 April 1971, media massa melaporkan bahwa sekira 700 alim ulama NU seluruh Indonesia berkumpul di Jombang, Jawa Timur dari tanggal 15 sampai 18 April 1971. Dalam pertemuan tersebut mereka mengeluarkan sebuah seruan yang masyhur dengan nama "Fatwa Djombang". Isi seruan adalah wajib hukumnya bagi setiap umat muslim dalam pemilihan umum nanti untuk menusuk tanda gambar partai Islam. Tujuan seruan itu ialah untuk memenangkan Islam dalam menegakkan ajaran-ajarannya.

Kecaman partai NU terhadap GUPPI juga ditujukan kepada para ulama pendukungnya. Bahwa memang ada semacam ketidakpuasan tentang bantuan

Ketua Umum GUPPI, Syarifuddin Moh Amin, di depan MUNAS I GUPPI, Januari 1971.

FOTO: *PERANAN ULAMA DALAM GOLKAR 1971-1980: DARI PEMILU SAMPAI MALARI*

partai NU pada bidang pendidikan, tetapi ditilik dari keyakinan pribadi alim ulama maupun para pengikutnya yang seluruhnya adalah *Ahlussunnah Wal Jamā'ah* (*Aswaja*) tidak mungkin ulama seperti Musta'in Romly meninggalkan NU.

Sementara itu pengamat lain mulai mempersoalkan kedudukan Syarifuddin sebagai Ketua Umum GUPPI sekaligus merangkap Ketua Direktorat Pendidikan Agama dalam Departemen Agama. Perangkapan jabatan itu menggambarkan bahwa daerah pengaruh NU sedang dalam peralihan, meskipun diyakini belum jadi begitu sempit seperti kedudukan PNI dalam Departemen Dalam Negeri.

Namun seperti halnya Syarifuddin dan beberapa rekan bekas partai NU lain yang menjadi pengurus inti DPP GUPPI, ulama NU yang akhirnya masuk Golkar telah siap dengan segala konsekuensi atas pilihan itu.

Ken Ward dalam *The 1971 Election in Indonesia: an East Java Case Study* (1974) menerangkan bahwa hasil Pemilu 1971 mencerminkan represi politik yang berlangsung di Indonesia setelah penghancuran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai pro-Sukarno. Golkar memenangkan 65,6 persen atau 227 kursi di parlemen, NU 18,7 persen, dan PNI hanya meraih 6,9 persen.

Hasil ini amat mengejutkan, mengundang diskusi sengit, dan

GUPPI diperkenankan mengikuti berbagai rapat untuk mendiskusikan pelbagai rencana kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan oleh departemen itu. Lewat saluran itu, sebenarnya pemerintah memberi kesempatan kepada GUPPI untuk memberi "warna" kepada pelbagai kebijakan pemerintah.

tanda tanya dari para pengamat dalam dan luar negeri. Orang menuduh dengan penuh kecurigaan bahwa kemenangan itu dicapai dengan penuh kecurangan, paksaan, dan atau menggunakan kekuasaan ABRI.

Menurut Harold Crouch dalam *The Army and Politics in Indonesia* (2007), Ali Moertopo merupakan tokoh militer yang paling berperan dalam kemenangan Golkar itu melihat kemenangan yang demikian mengesankan ini merupakan sumber legitimasi, dan dengan penuh kebanggaan mengisyaratkan betapa besar kekuasaan yang ada pada Golkar sebagai kekuatan politik baru. Bagaimanapun, banyak pihak setuju bahwa ABRI dan birokrasi sebagai pendukung kemenangan Golkar ini, di samping dukungan dana yang besar, serta intimidasi dan operasi intelijen.

Persaingan dan pertengkaran sengit

Menurut Daniel Dhakidae dalam "Pemilihan Umum di Indonesia", *Prisma* No. 9, September 1981, setelah pemilu 1971 membuktikan kemenangan mutlak bagi Golkar, pemerintah menunjukkan kepercayaan yang besar kepada GUPPI. Pemerintah menyadari peranan ormas ini yang cukup besar dalam menggalang massa pesantren di perdesaan.

Selanjutnya, pemerintah menciptakan saluran-saluran struktural yang memungkinkan dikaitkannya GUPPI dengan sistem politik, khususnya dalam kaitannya dengan Departemen Pendidikan & Kebudayaan (P&K). GUPPI diperkenankan mengikuti berbagai rapat untuk mendiskusikan pelbagai rencana kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan oleh departemen itu. Lewat saluran itu, sebenarnya pemerintah memberi kesempatan kepada GUPPI untuk memberi "warna" kepada pelbagai kebijakan pemerintah.

Untuk menambah jumlah anggota, di samping dengan pendekatan persuasif, tokoh-tokoh

GUPPI juga langsung mengadakan mobilitasasi. Suatu aturan yang mulanya hanya berlaku di lingkungan Direktorat Pendidikan Agama Departemen Agama mengharuskan seluruh jajarannya untuk membentuk GUPPI, serta semua pegawai di lingkungannya wajib menjadi anggotanya.

Kepada kiai-kiai yang berpengaruh (seperti K.H. Mohamad Tarmudji) ditawarkan insentif-insentif material, seperti penyediaan dana untuk pesantren-pesantren mereka atau membiayai perjalanan kiai-kiai ke luar negeri. Dukungan dana dari asisten pribadi (aspri) Soedjono Hoemardani amatlah besar dan teratur demi suksesnya program ini.

Menurut Andrée Feillard dalam *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (1999), pasca pemilu 1971 terjadi perkembangan menarik. GUPPI kerap bersikap keras dan kurang kompromi terhadap pelbagai kebijakan pemerintah. Mereka membangkitkan pertentangan-pertentangan, khususnya di Departemen Agama dan Departemen P&K. GUPPI menunjukkan sikap yang kurang kompromi khususnya dalam soal-soal yang berkelindan dengan hukum Islam dan keimanan Islam.

Kepengurusan GUPPI hasil Munas Januari 1971 menempatkan sekelompok ulama yang semula berkarier di Departemen Agama dalam posisi-posisi penting di dalam organisasi GUPPI. Ulama itu Sebagian besar bekas simpatisan partai NU.

Di dalam Departemen Agama, mereka menguasai jajaran Direktorat Pendidikan Agama sejak Kabinet Pembangunan I. Kiai-kiai itu di bawah kepemimpinan K.H. Syarifuddin, M.A. yang memegang sekaligus jabatan Ketua Umum GUPPI dan Direktur Pendidikan Agama.

Kelompok Syarifuddin inilah yang kerap menggalang penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Termasuk di dalam kelompok ini ialah: Drs. H.M. Jamhari, ketua I Pergunu (Persatuan Guru NU) dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Agama pada Sekolah Umum di Direktorat Pendidikan Agama, H. Zainuddin, Dahlan S.H., Drs. Toha. Walaupun Soedjono Hoemardani dan Ali Moertopo mempunyai pengaruh besar atas organisasi GUPPI, tetapi sampai awal 1974, kelompok Syarifuddin memainkan peran yang dominan di dalam organisasi GUPPI.

Memudarnya Persaingan, Muncul Penyingkiran

Malapetaka 15 Januari 1974 atau Peristiwa Malari 1974 merupakan fenomena politik tersendiri untuk GUPPI. Meskipun

Aktivitas penentangan yang kerap dilakukan GUPPI kepada pemerintah, pada akhirnya memojokkan posisi ulama berhaluan keras. Muktamar II GUPPI tahun 1975 memberi kesempatan kepada ulama yang benar-benar loyal kepada pemerintah untuk mengisi posisi-posisi penting di dalam struktur organisasi.

secara organisatoris mereka tidak tersangkut kasus Malari, tetapi beberapa tokoh pentingnya ditangkap oleh pemerintah dengan tuduhan terlibat peristiwa Malari, sekaligus tersingkir dari kepengurusan GUPPI. Qodratullah tokoh GUPPI yang dianggap loyal kepada pemerintah Orde Baru mengemban tugas awal untuk menertibkan GUPPI dari unsur-unsur yang tidak loyal kepada pemerintah.

Aktivitas penentangan yang kerap dilakukan GUPPI kepada pemerintah, pada akhirnya memojokkan posisi ulama berhaluan keras. Muktamar II GUPPI tahun 1975 memberi kesempatan kepada ulama yang benar-benar loyal kepada pemerintah untuk mengisi posisi-posisi penting di dalam struktur organisasi ini, sedangkan ulama berhaluan keras yang diragukan loyalitasnya menduduki posisi-posisi sisa.

Dikisahkan oleh Megan Brankley Abbas dalam bukunya, *Whose Islam: The Western University and Modern Islamic Thought in Indonesia* (2021), Jenderal Ali Moetopo mendorong masuknya kelompok pendidik lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berorientasi modern dan dipandang lebih rasional.

Kelompok itu dipimpin oleh Drs. H. Kafrawi M.A., terdiri dari: H. Zarkowi Suyuthi, Drs. Muzayin Arifin M.Ed., Dr. Muljanto Sumardi M.A., Drs. H. Ali Hasyim. Sejak naiknya Prof. Dr. Mukti Ali sebagai Menteri Agama, kelompok ini menduduki posisi penting pada jajaran Departemen Agama, menyaingi kelompok Syarifuddin.

Setelah Muktamar GUPPI tahun 1975, praktis kepengurusan GUPPI didominasi oleh tokoh-tokoh yang berpikiran "rasional", yang lebih bisa berkompromi dengan pihak pemerintah. Para kiai berhaluan keras yang tidak tersingkir, tetap menunjukkan ketegarannya di dalam membela ajaran Islam, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk menandingi ulama kompromis yang terang-benderang

mendukung segala kebijakan pemerintahan Suharto.

Semenjak 1975, praktis suara-suara keras GUPPI mulai banyak berkurang, meskipun tidak bisa disebut lenyap sama sekali. Menurut Syafiq Hasyim dalam *The Shariatisation of Indonesia: the Politics of the Council of Indonesian Ulama* (2023), tahun 1975, pemerintah mendorong lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, yang di dalam organisasi ini pemerintah secara progresif meningkatkan pengaruhnya. Pemerintah tidak merealisasikan pembubaran GUPPI, tetapi mulai memikirkan untuk mengurangi peranan politiknya.

Maka tatkala titimangsa 24 Mei 1978 Majelis Dakwah Islamiyah Keluarga Besar Golongan Karya (MDI Golkar) lahir, praktis peranan GUPPI tersaingi. Tidak seperti kelahiran MUI, kelahiran MDI menimbulkan banyak kontroversi. Dugaan lahirnya MDI, terjadi perubahan menyolok dalam AD/ART GUPPI hasil Muktamar IV GUPPI tahun 1980, banyak perannya yang dikurangi sehingga ia kini hanya membidangi bidang pendidikan Islam semata.

Sementara itu, seperti yang diceritakan oleh Mujiburrahman dalam karyanya, *Feeling Threatened: Muslim-Chritian Relations In Indonesia's New Order* (2006), bahwa sejak 29 Maret 1978, Alamsyah Ratu Perwiranegara memulai tugasnya di Departemen Agama. Datangnya Alamsyah membawa perubahan penting di GUPPI dan di Departemen Agama. Sejak pertama berkuasa di Departemen Agama, Alamsyah mulai memikirkan untuk menyingkirkan kelompok Kafrawi dari Departemen Agama.

Akan tetapi, sebelum dia merealisasikannya, dia merasa perlu untuk terlebih dulu menyingkirkan kelompok Kafrawi dari kepengurusan GUPPI. Maka disusunlah suatu operasi untuk menyingkirkan kelompok Kafrawi.

Operasi yang didukung penuh oleh kelompok Syarifuddin ini, ternyata tidak saja menghasilkan tersingkirnya kelompok Kafrawi, tetapi lebih dari itu mengikis pengaruh Soedjono Hoemardani dan Ali Moertopo. Kepengurusan GUPPI hasil Muktamar tahun 1980 tidak saja menyingkirkan pengikut-pengikut setia Ali dan Soedjono, tetapi juga sekaligus menempatkan orang-orang kepercayaan Alamsyah di sana.

Arkian, pemerintah Orde Baru membatasi jumlah partai menjadi tiga; hal ihwal itu memaksa semua partai Islam melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara partai-partai nasionalis, sekuler, dan Kristen bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar menjadi

Seusai MUNAS, para Ulama GUPPI menghadap Presiden di Istana Negara, 28 September 1971.

FOTO: *PERANAN ULAMA DALAM GOLKAR 1971-1980: DARI PEMILU SAMPAI MALARI*

partai ketiga dan partai terbesar sepanjang periode kekuasaan Orde Baru, dan memenangkan setiap pemilu sejak 1977 hingga 1997.

Apa yang bisa kita petik dari riwayat ini adalah untuk menciptakan negara yang demokratis, pemerintah tidak boleh otoriter. Demokrasi akan muncul dan langgung lewat proses pemilihan umum yang demokratis.

Demokrasi membutuhkan kondisi-kondisi awal yang memadai. Misalnya, tingkat perkembangan ekonomi tertentu, pengetahuan serta keterampilan politik yang memadai di antara penduduknya, dukungan elite politik (termasuk para ulama) terhadap demokrasi. Juga tradisi *rule of law* dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang cukup kuat, kebudayaan yang menunjang, dan sebagainya.

Semua ini dibutuhkan sebelum kebebasan menyatakan pendapat dan pemilu yang *luber* bisa diselenggarakan. **S**

Mutiara Kata

"Pemilu bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang melibatkan diri dalam proses." **—Hillary Clinton**

BULAN INI

9 Desember 1987

Gerakan Intifada Lahir di Palestina

Intifada atau "perlawanan" pertama kali dilakukan di Jalur Gaza oleh para pemuda Palestina. Perlawanan ini sebagai reaksi meninggalnya empat warga Palestina setelah bertabrakan dengan truk Israel. Para pemuda protes dengan melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Dari situasi ini lahirlah Hamas, cabang dari Ikhwanul Muslimin yang akhirnya melakukan perlawanan bersenjata melawan Israel.

5 Desember 1945

5 Pesawat Pembom AS Hilang Di Segitiga Bermuda

Lima pesawat pembom "Flight 19" dengan 14 awak berangkat pukul 14.10, namun dua jam kemudian ada laporan bahwa kompas tidak berfungsi dan akhirnya hilang kontak. Pukul 19.27 sebuah pesawat Mariner dengan 13 awak berangkat mencari, namun ikutan hilang hingga kini. Total ada 6 pesawat dengan 27 awak yang dinyatakan hilang akibat "cuaca buruk".

15 Desember 1891

Olahraga Bola Basket Diciptakan

James Naismith yang menciptakan permainan ini adalah guru olahraga asal Kanada yang mengajar di perguruan tinggi Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia sengaja membuat sebuah olahraga di ruangan tertutup untuk mengisi liburan musim dingin siswanya. Inspirasinya adalah permainan semasa James kecil. Pertandingan resmi pertama basket diadakan 20 Januari 1892.

DALAM SEJARAH

Penulis: **Tjahjo Widyasmoro**

24 Desember 1865

Konfederat Perang Sipil AS Mendirikan Ku Klux Klan

Ku Klux Klan (KKK) adalah organisasi yang menggunakan teror demi agenda supremasi kulit putih di Amerika. Kelompok ini berdiri usai Perang Sipil hingga 1870. Lalu pada 1915 muncul jilid keduanya yang masih ada hingga kini. Ciri kelompok ini adalah mengenakan pakaian jubah putih mirip hantu karena mereka beranggapan orang-orang kulit hitam percaya takhyul.

30 Desember 2006

Saddam Husein Dieksekusi Mati

Mantan Presiden Irak ini divonis mati pada 5 November 2006 atas tuduhan penindasan terhadap warga Syiah pada tahun 1980-an. Setelah proses banding satu bulan kemudian sesuai dengan prosedur hukum di Irak, Saddam akhirnya tetap digantung pada 30 Desember di Camp Justice.
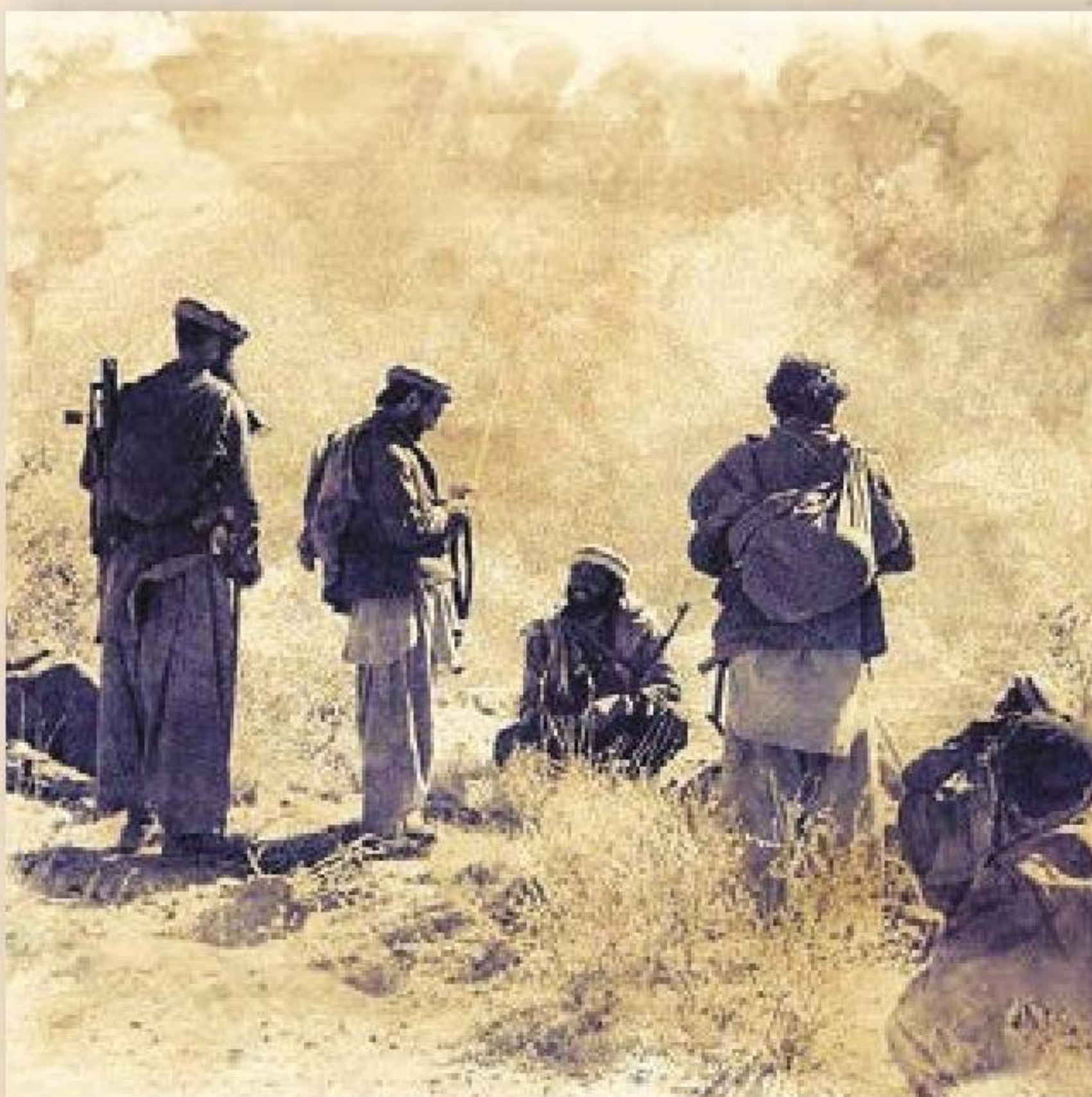
24 Desember 1979

Uni Soviet Menginvasi Afghanistan

Invasi dipicu kudeta di Afghanistan pada 1973 yang menggulingkan monarki dan didirikannya republik. Namun karena terjadi konflik di pemerintahan akibat salah satu faksi berhaluan komunis, Uni Soviet ikut campur dengan masuk ke negeri itu. Aksi ini berlangsung sampai 1989 dan melahirkan kelompok perlawanan Taliban.

FOTO: HET GEHEUGEN/BEN HANSEN

Penulis: **Solichin Salam**

Pada 1948, tokoh pergerakan yang dijuluki Si Kancil ini mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI), partai berhaluan kiri yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan. Sayangnya saat Pemilu 1955, PSI gagal meraih suara. Bahkan pada 1960 partai itu dibubarkan Sukarno. Syahrir akhirnya ditangkap tanpa diadili yang menyebabkan kondisi kesehatannya memburuk. Saat ia akhirnya berupaya berobat ke Swiss, ajalnya menjemput.

Edisi April 1967

Mengenang Kembali: Sutan Syahrir

Pada tanggal 9 April 1966, setahun yang lalu Sutan Syahrir meninggal dunia di Zurich, Swiss. Pada waktu itu rakyat terkejut dan hampir-hampir tidak percaya, karena tidak tahu kapan Syahrir pergi ke luar negeri.

Apalagi belakangan rakyat mendengar bahwa kepergiannya dalam pertengahan tahun 1965 itu untuk berobat, sesudah beberapa kali menderita sakit dalam tahanan. Sehingga rakyat menjadi bertanya-tanya adakah yang meninggal di Zurich dalam status tahanan politik itu adalah Sutan Syahrir, yang dikenal rakyat sejak di mana kolonial Belanda sebagai pejuang kemerdekaan, hingga dibuang ke Boven Digul bertahun-tahun bersama Bung Hatta, kemudian diasingkan ke Banda Neira.

Adakah yang meninggal dunia itu adalah Syahrir yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia di masa permulaan revolusi fisik dahulu?

Sutan Syahrir yang dikenal sebagai perdana menteri yang "sederhana" pakaian dan hidupnya, serta terkenal sebagai negarawan dan diplomat yang ulung. Sehingga "senyum"-nya diakui oleh Lord Killearn, sebagai "senyuman-diplomat". Benarkah yang wafat itu adalah Bung Syahrir yang dahulu memperjuangkan serta membela perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum internasional? Dengan demikian rakyat bertanya-tanya dalam hati sekitar berita kewafatannya.

Sebelum Indonesia merdeka, Syahrir berkorban dan hidup menderita untuk kemerdekaan bangsa dan tanah airnya yang dicintainya, tapi anehnya sesudah Indonesia merdeka, Bung Syahrir juga berkorban dan menderita dalam alam kemerdekaan. Hampir-hampir jasa dan namanya dihapus serta hendak dilupakan oleh lawan-lawan politiknya begitu saja.

Kita berpikir dan hampir-hampir tidak percaya, jika benar yang meninggal itu adalah Sutan Syahrir yang oleh Sarojini Naidu pernah dijuluki sebagai **"***Atomic bomb of Indonesia***"**, lalu apa salahnya? Rakyat ingin tahu. Kiranya Bung Syahrir ditahan serta dijebloskan ke dalam penjara akibat fitnah dari lawan-lawan politiknya. Syahrir meringkuk dalam penjara sejak 16 Januari 1962, tanpa proses

Hari sabtu, Jenazah Sutan Syahrir tiba di Schiphol. Tubuhnya ditempatkan di gedung atom dimana masyarakat dapat memberi penghormatan terakhir.

FOTO: HET GEHEUGEN/COR MULDER

serta tidak pernah diajukan ke depan pengadilan. Padahal negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dan bukan negara kekuasaan. Akan tetapi demikianlah praktiknya di masa rezim orde lama yang terkenal dengan "100 Menteri"-nya.

Belakangan ternyata Bung Syahrir tidak bersalah. Ajaib bukan. Dan untuk mencegah kemarahan rakyat atas penahanannya yang sewenang itu, diakuinya Syahrir sebagai Pahlawan Nasional. Akan tetapi apa hendak dikata nasi sudah menjadi bubur. Dahulu Syahrir berjuang untuk Indonesia Merdeka, untuk itu Syahrir rela dan bersedia berkorban. Di samping itu Syahrir dahulu juga ikut membina dan berjuang untuk Republik Indonesia.

Akibat perjuangannya itu menyebabkan Syahrir ditahan, dijebloskan ke dalam penjara kemudian diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahwa sewaktu permulaan revolusi fisik dahulu, Bung Syahrir pernah hendak ditembak dengan pistol oleh tentara NICA, dan kediaman resminya di Pegangsaan Timur 56 pernah dilempari granat, untung Syahrir nyaris dari maut.

Sebelum Indonesia merdeka, Syahrir berkorban dan hidup

Sutan Sjahrir di acara Sidang
BP-KNIP di Malang 1947.

FOTO: WIKIMEDIA/ANRI

Berita kewafatannya tentu membuka mata para generasi muda—Angkatan '66—untuk berjuang terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Berjuang melenyapkan kezaliman dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

menderita untuk kemerdekaan bangsa dan tanah airnya yang dicintainya, tapi anehnya sesudah Indonesia merdeka, Bung Syahrir juga berkorban dan menderita dalam alam kemerdekaan. Hampir-hampir jasa dan namanya dihapus serta hendak dilupakan oleh lawan-lawan politiknya begitu saja. Seakan-akan Syahrir itu tidak pernah ada, dan tidak mempunyai andil ataupun jasa terhadap Republik Indonesia.

Meskipun lawan politiknya berusaha demikian, namun Tuhan itu Maha Adil dan Maha Kuasa, bisa berbuat sesuatu menurut kehendakNya. Manusia-manusia boleh merencanakan sesuatu, tapi ketentuan terakhir adalah di tangan Tuhan jua. Usaha dan tipu muslihat lawan-lawan politiknya itu ternyata sia-sia juga. Sebab tuhan tidak meridhoi-Nya.

Berita kewafatannya tentu membuka mata para generasi muda—Angkatan '66—untuk berjuang terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Berjuang melenyapkan kezaliman dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kepahlawanan Syahrir, bukanlah pemberian ataupun hadiah, akan tetapi itu memang sudah menjadi hak dan miliknya, yang telah ditebusnya dengan pengorbanan dan penderitaan, di masa kolonial maupun di masa kemerdekaan.

Di masa kolonial dahulu, dihentikannya studinya, lantaran Ibu Pertiwi memanggilnya pulang ke tanah air. Setibanya di tanah air, Bung Syahrir berjuang dan ditangkap, ditahan serta dijebloskan ke dalam penjara, kemudian dibuang ke Boven Digul di Irian Barat, dan Banda Neira.

Jepang masuk. Syahrir dibebaskan. Tapi Syahrir tidak tinggal diam, berjuang di bawah tanah menentang fasis Jepang. Sesudah proklamasi, Bung Syahrir tampil sebagai ketua BP KNIP, dan diangkat kemudian sebagai Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia, merangkap sebagai Menteri Luar Negeri. Di masa pemerintahannya inilah lahirnya Perjanjian Linggarjati yang terkenal.

Masa jabatannya adalah di dalam

Duta Besar Indonesia di Belanda Sudjarwo Tjondronegoro menghibur Ibu Sjahrir, Maria Duchateau

FOTO: HET GEHEUGEN/BEN HANSEN

masa-masa yang penuh kesulitan dan bahaya. Karena Indonesia baru saja merdeka, belum punya apa-apa. Luar negeri pun belum mengenal Indonesia, sehingga berkat perjuangannya yang gigih, dunia kemudian mengakui kebenaran perjuangannya yang gigih, dunia kemudian mengakui kebenaran perjuangan Bangsa Indonesia. Dari bangsa yang selama ini dikenal sebagai bangsa jajahan, kini diakui dan dihormati dunia sebagai bangsa yang merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jabatan Perdana Menterinya di waktu itu bukan main beratnya, penuh bahaya dan kesulitan. Meskipun menjadi Perdana Menteri, namun pakaian maupun cara hidupnya tetaplah sederhana.

Maklumlah di waktu itu Bung Syahrir adalah benar-benar sebagai "*A Fighting Prime Minister of Indonesia*" yang termuda di seluruh dunia, karena baru 36 tahun usianya. Begitu pula sewaktu Syahrir memperjuangkan serta membela perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia di luar negeri bersama Haji Agus Salim, adalah dalam kesederhanaan dan penuh keprihatinan.

Segala ongkos hidupnya di sana adalah secara berdikari, tidak seenak duta-duta besar kita sekarang yang dapat foya-foya dan hidup senang. Sebaliknya diplomat Syahrir dahulu berjuang dan membina hubungan Indonesia dengan dunia internasional dari

Mantan Perdana Menteri Ir. Willem Schermerhorn, ketua Komisi Jenderal sesaat setelah perang, turut berbela sungkawa kepada Ibu Sjahrir.

FOTO: HET GEHEUGEN/COR MULDER

ketidakadaan dan kekosongan. Berjuang dalam kemelaratan penderitaan dan keprihatinan nasional. Itulah selintas kilas ingatan rakyat Indonesia terhadap Jasa dan Perjuangan Sutan Syahrir.

Syahrir, menurut Prof. Schermerhorn lebih menonjol sebagai seorang negarawan, daripada seorang politikus. Kini ia telah pergi meninggalkan kita. Kehilangan dan kepergian Syahrir sebagaimana dikatakan Dr. Koets, dari Partij van den Arbeid,—adalah merupakan suatu kehilangan yang sangat besar.

Syahrir pergi, sesudah berbakti dan mengabdikan hidupnya bagi Indonesia. Iya telah berbuat sesuatu, apa yang ia bisa dan telah memberikan sesuatu apa yang ia punya untuk bangsa dan tanah airnya. Marilah kita teruskan perjuangannya... agar cita-citanya masyarakat sosialis Indonesia "Pancasila" tercapai! **S**

Mutiara Kata

"Pemilu bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab setiap warga negara." **—Franklin D. Roosevelt**
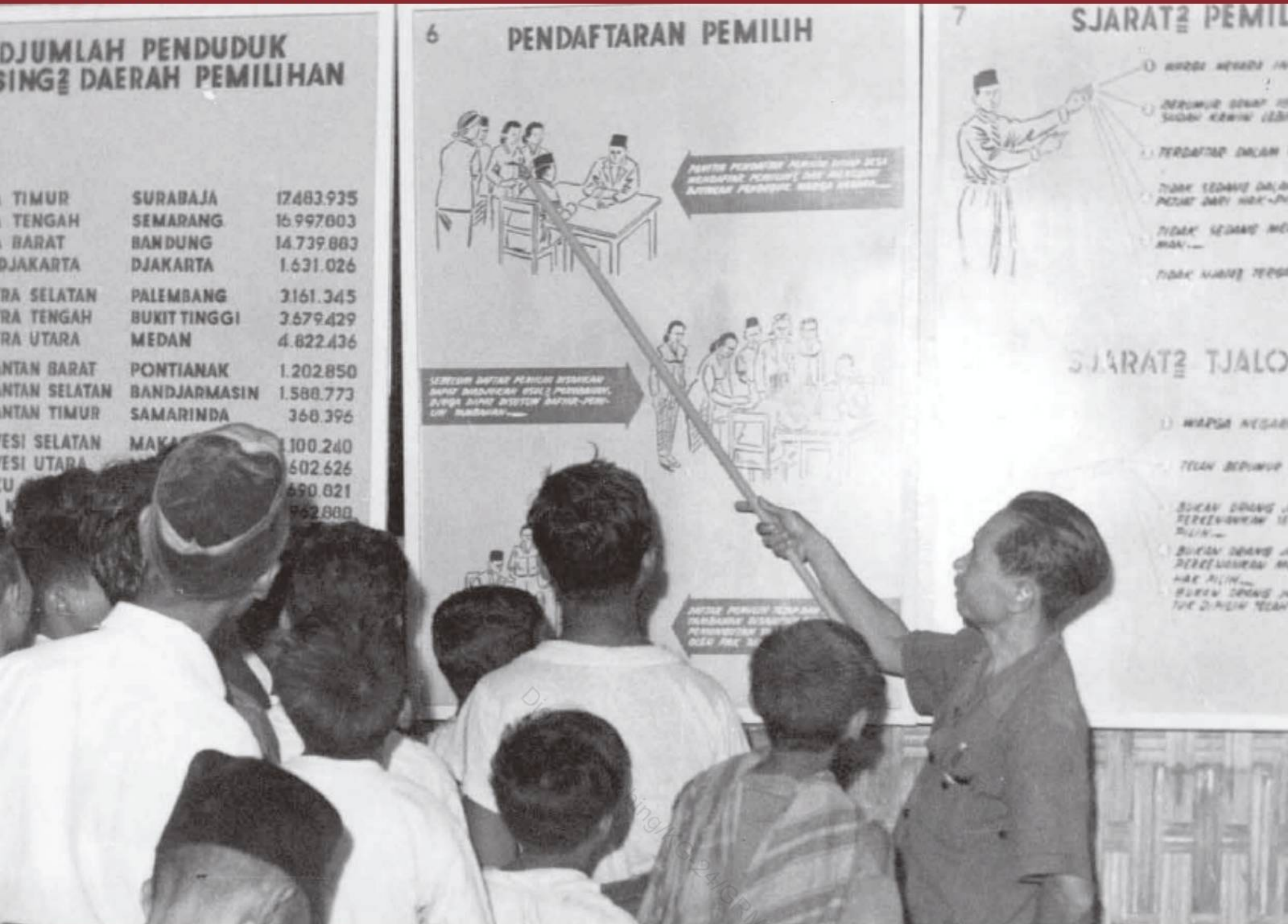
MENYAMBUT PEMILU PERTAMA 1955

Seorang petugas memberikan sosialisasi kepada warga terkait Pemilu 1955, demikian keterangan foto koleksi Arsip Negara Republik Indonesia. Majalah *Starweekly* edisi 24 September 1955 menulis panduan untuk pemilih, *"Tiang terpenting dari bisa tertjapainja suatu perwakilan rakjat jang demokratis ialah pemilihan umum jang rahasia* [...] *Bila kerahasiaan ini terdjamin, barulah orang bisa memilih setjara bebas."* Sementara itu Bung Karno pada pidato ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus 1945, mengatakan dasar pemilihan umum yang akan digelar pada bulan berikutnya. Menurutnya pemilihan umum merupakan penyempurnaan ketatanegaraan yang memenuhi syarat-syarat demokrasi. "Tetapi, aduh alangkah sakitnya kelahiran itu, alangkah berbahayanya kelahiran itu! Kalau kita tidak berhati-hati, robeklah nanti seluruh tubuhnya Ibu Pertiwi."—**Mahandis Yoanata**